SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG

RASIALISME INDONESIA DI TANAH PAPUA



FILEP KARMA

Filep Karma adalah pemimpin paling berani di Papua Barat. Dia lawan kekerasan dengan taktik non-kekerasan macam Mahatma Gandhi, Martin Luther King dan Nelson Mandela.

Eben Kirksey, antropolog, menulis buku "Freedom in Entangled Worlds: West Papua and the Architecture of Global Power"

Filep Karma's steadfast resistance is an inspiration to all those struggling for human rights and justice for West Papua and elsewhere.

John M. Miller, koordinator East Timor and Indonesia Action Network di New York

Filep Karma is known to many in New Zealand. He is an icon of commitment to justice and freedom.

Maire Leadbeater dari Auckland Aotearoa menulis buku "Negligent Neighbour: New Zealand's Complicity in the Invasion and Occupation of Timor-Leste"

SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANG

RASIALISME INDONESIA DI TANAH PAPUA

FILEP KARMA

Penerbit Deiyai

Seakan Kitorang Setengah Binatang
Rasialisme Indonesia di Tanah Papua
©Deiyai

Cetakan Pertama, November 2014

Interviewer
Basilius Triharyanto
Firdaus Mubarik
Ruth Ogetay
Nona Elisabeth

Editor
Lovina Soenmi

Tata Letak dan Disain
Henry Adrian

Foto Cover Depan
nobodycorp.org

Foto Cover Belakang
Eben Kirksey

Karma, Filep
Seakan Kitorang Setengah Binatang
Rasialisme Indonesia di Tanah Papua
Deiyai, Jayapura, 2014
xvi + 137 hlm; 14,5 x 21,5 cm
ISBN 978-602-17071-4-2

DAFTAR ISI

ix *Pengantar:*
Perjuangan Seorang Pegawai Negeri di Papua
oleh Jim Elmslie

1 Masa Kecil di Wamena dan Jayapura

13 Biak Berdarah

25 Nasionalisme Papua

45 Perjalanan dalam Gambar

65 Dari Penjara ke Penjara

81 Kritik Langkah Perjuangan

101 *Lampiran:*
Keputusan UN Working Group on Arbitrary Detention
oleh Freedom Now

129 *Epilog*:
Menemui Filep Karma
oleh Anugerah Perkasa

PENGANTAR

Perjuangan Seorang Pegawai Negeri di Papua

FILEP KARMA, kelahiran 1959, menjalani hidupnya dalam bayang-bayang militer Indonesia. Dalam pembantaian di Biak pada 6 Juli 1998, satu babak paling kelam sepanjang sejarah Papua Barat, Karma adalah tokoh yang menuntut Papua merdeka secara damai. Protes tanpa kekerasan yang dilakukannya berbuah penyiksaan dari militer Indonesia. Karma selamat dari siksaan pada Juli 1998 namun harus menjalani masa tahanan pertamanya.

Karma dipandang banyak orang Papua sebagai Santo, orang suci, yang siap memberikan apa saja untuk aksi damai agar negerinya merdeka. Dia pernah dipukul, ditembak, dan berkali-kali dipenjara serta diancam bunuh.

Judul bukunya, *Seakan Kitorang Setengah Binatang*, adalah ungkapan kuat yang menjelaskan 52 tahun salah penanganan Papua Barat oleh pemerintah Indonesia. Faktanya, hingga hari ini, orang Papua Barat diperlakukan 'setengah binatang' di seluruh pelosok negeri, dari Jayapura hingga Wamena di Pegunungan Tengah.

Laki-laki dan perempuan ditangkap saat operasi 'pembersihan', atau operasi polisi di jalan atau saat protes biasa atas hak-hak asasi mereka. Mereka dipenjara, disiksa, dibunuh secara acak. Hal paling sadis ketika

tentara pelaku kekerasan dengan gembira merekam tindakan mereka dengan telepon sebagai 'piala'. Mereka berpose, bangga atas orang Papua yang dibantai, lantas menyeringai. Dalam satu video terkenal, para tentara mengejek seorang pria Papua, yang isi perutnya terburai dan sekarat di kampungnya di Serui. Mereka bicara seolah kepada 'setengah-binatang,' mengejek cita-citanya agar Papua Merdeka, seakan-akan karena teriak merdeka, orang Papua berhak diperlakukan sebagai setengah bintang.

Kebiadaban paling memilukan saya dengar dalam sebuah Pengadilan Warga soal Pembantaian Biak, yang digelar di Universitas Sydney, 6 Juli 2003. Seorang perempuan yang selamat dari pembantaian itu, Tineke Rumakabu, menjelaskan perlakuan terhadapnya oleh sekelompok tentara di salah satu fasilitas tentara. Dua belas perempuan dan anak gadis ditelanjangi, dipukul dan diperkosa oleh para tentara. Dengan dingin ia berkisah:

> *Saya melihat seorang pria memperlihatkan kami satu pisau kecil, pisau yang biasa kau pakai bercukur, lantas ia bilang, 'Kita akan pakai ini untuk memotong vagina kalian, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan.' Saya menyaksikan seorang anak perempuan, mereka memperkosanya dan lantas ia tewas. Darah berceceran dimana-mana karena vagina perempuan dan klitorisnya dipotong serta diperkosa berulang kali. Mereka juga memukuli perempuan lainnya dengan bayonet dan lantas memotong leher juga payudara perempuan tersebut.*

Mengapa kejam sekali? Siapa bisa jawab? Mengapa militer Indonesia bisa sesadis itu, seakan-akan wajar mereka lakukan? Dari dua belas perempuan, delapan tewas. Empat lainnya, termasuk Tineke, lolos ketika seorang tentara beragama Kristen minta mereka dibebaskan. Kesaksian Tineke di pengadilan diperkuat dengan laporan puluhan mayat dimutilasi terdampar di pantai Biak, termasuk penemuan seorang wanita telanjang tanpa kepala, pasca kejadian 6 Juli 1998 itu.

Perlakuan sadis tersebut tak hanya dialami Tineke Rumakabu. Bicara 52 tahun pendudukan Indonesia di Papua Barat adalah bicara soal kekerasan seksual ekstrim dan kekejian lainnya, terhadap laki-laki dan perempuan, serta impunitas para pelakunya.

Pertanyaan berikutnya. Akankah para tentara dan polisi melakukan hal kejam tersebut kepada ibu mereka, istri mereka, atau saudari mereka? Tidak. Lantas apakah mereka melakukannya di lokasi tersembunyi? Tidak. Para tentara memperkosa perempuan-perempun Papua di tempat mereka bertugas. Kemungkinan ini diketahui atasan.

Filep Karma menjelaskan perlakuan kejam Indonesia terhadap orang Papua ini karena dasar rasialisme mendalam. Orang Indonesia umumnya, dan tentara khususnya, menganggap orang Papua, dengan identitas Melanesia dan Kristen, lebih rendah dari identitas Indonesia. Begitu rendahnya sehingga mereka membenarkan orang Papua disayat, diperkosa, untuk kesenangan mereka seperti berolahraga.

Bertahun-tahun sebelumnya, John Rumbiak, aktivis HAM terkemuka Papua yang menderita stroke pada 2005, mengatakan pada saya bahwa jantung persoalan di Papua Barat adalah rasialisme. Tak hanya rasialisme Indonesia, namun juga rasialisme negara-negara Barat dan Perserikatan Bangsa-bangsa yang mengizinkan Penentuan Pendapat Rakyat atau Act of Free Choice pada 1969 dengan hanya 1025 orang. Mereka semua memilih integrasi dengan Indonesia. Sekitar 800 ribu warga Papua tak diberikan hak menentukan masa depan mereka.

Mengapa bisa begitu?

Secara umum, negara-negara Barat dan elite PBB sepakat bahwa orang-orang Papua terlalu lugu (primitif, rendah, dan terbelakang) untuk diberi hak memilih dan menentukan masa depan mereka. Jadi pemerintahan Papua Barat, sejak 1969, adalah pemerintahan berdasar rasialisme dengan para pendatang Indonesia dikirim ke sana, besar-besaran, lewat program transmigrasi.

Proses sejarah yang melibatkan sekian juta orang selama 50 tahun ini tentu tak bisa disederhanakan dalam satu kata. Filep Karma sendiri berasal dari keluarga elite. Ayahnya pernah menjadi bupati Wamena dan Serui masing-masing 10 tahun. Filep sendiri seorang pegawai negeri, berpendidikan tinggi, artikulatif dan pernah melakukan perjalanan internasional. Keluarga Karma seolah diuntungkan dengan diberi jabatan tinggi dan segala fasilitasnya. Ketika Filep bergabung dengan protes anti-Suharto pada 1998, dan mulai menyuarakan Papua Merdeka seperti kebanyakan orang Papua Barat, serta memimpin gerakan di Biak,

dia menjadi orang baru yang bisa mereformasi kejahatan-kejahatan pasca Suharto berkuasa.

Buku ini memberikan perspektif baru dari pelopor peristiwa Biak 1998 sehingga pembaca memahami benar bagaimana perlakuan Indonesia terhadap Papua Barat. Ia adalah sebuah perjalanan menuju jurang moral. 'Iblis'nya adalah tentara Indonesia. Dilepas untuk memuaskan hasrat mengerikan mereka. Paranoid buat menimbulkan teror pada penduduk Papua.

Pembantaian Biak membuktikan bahwa 'iblis' masih berkuasa di Papua Barat, bahkan setelah Suharto tumbang. Filep Karma menjelaskan bagaimana bisa sebuah negara yang harusnya melindungi warganya, malah melakukan kekerasan sadis terhadap warganya sendiri?

Menganggap orang Papua 'setengah binatang'?

Ini sama dengan situasi era apartheid di Afrika Selatan dan sebelum perang Amerika Selatan. Memperlakukan manusia dengan tidak manusiawi untuk mengontrol serta membenarkan kekejian. Orang Papua tidak dituduh sebagai Komunis, melainkan Separatis, artinya pengkhianat, musuh negara, sebuah ancaman bagi negara dan harus dimusnahkan.

Filep Karma ingin Papua Barat merdeka. Ia meyakini kemerdekaan adalah hak rakyat Papua. Istilah Papua separatis sesungguhnya masih *debatable*. Menurut Theys Eluay, sebelum dia dibunuh oleh Komando Pasukan Khusus pada 2001, Papua bukan separatis sebab mereka tak pernah -secara sukarela- bergabung dengan Indonesia. Kebanyakan orang Papua Barat sepakat dengan Theys Eluay.

Kini negara Indonesia bisa dikatakan berkuasa penuh atas Papua. Tentu dengan cara memperbanyak kekuatan militer dan aparat semi-militer. Ditambah lagi dukungan internasional bahwa Papua bagian dari Indonesia, kecuali negara Vanuatu. Secara global, sulit sekali buat bisa membela bangsa Papua Barat. Kepentingan bisnis global, yang bernafsu menggali sumber daya alam Papua Barat, praktis membutakan mata dunia internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia di sana. Ini semua bisa menimbulkan keputusasaan, namun orang Papua harus terus berjuang. Menariknya, sesudah 50 tahun, keinginan orang Papua untuk merdeka, untuk bertahan, masih membara.

Saya menghabiskan beberapa tahun di Sungai Sepik, Papua New Guinea, mengurus pondok kecil di pinggir sungai kampung bernama Tambanum. Hidup masih tradisional di sana; mata pencaharian penduduk sebagian besar bertani dan nelayan, serta sedikit pendapatan dengan menjual artefak. Tak ada pemimpin di Tambanum. Ini sesuatu yang khas Melanesia. Ia tak ada di berbagai pulau lain di Indonesia yang punya sultan, bupati, lurah dan sebagainya. Keputusan di Tambanum diambil bersama. Orang-orang berkumpul di *Haus Tambaram* untuk beristirahat dan membicarakan isu yang penting buat desa.

Saya di sana saat terjadi perdebatan besar apakah akan menyerbu atau tidak para pendatang yang menduduki kampung milik warga tradisional Tambanum. Suku lain mengambil tanah itu sehingga warga tak bisa memakainya. Beberapa warga mengatakan bila para pendatang tidak diserang, mereka akan lebih mengakar, tanah tradisional akan hilang. Ini akan berdampak buruk bagi anak-anak dan keturunan mereka. Yang lain berpikir jika mereka menyerang, polisi akan bertindak dan menyerang Tambanum, serta menangkap warga dan membakar rumah mereka.

Diskusi berlangsung berhari-hari. Tak tercapai kesepakatan bersama.

Akhirnya, mereka yang setuju menyerang para pendatang, berkumpul dan berangkat bersenjatakan kapak dan tombak.

Mereka yang tak mau menyerang, tinggal di rumah.

Tentu polisi datang, menangkap dan memukuli beberapa orang, namun tak sampai membakar rumah-rumah. Persoalan belum selesai, tapi bisa diminimalisir melalui dialog panjang.

Dialog membuat pihak penyerang paham mengapa orang lain tidak setuju dengan mereka. Hingga kini pendatang masih ada di sana namun mereka tidak mencuri lahan lagi.

Terpilihnya Presiden Joko Widodo menandakan babak baru Indonesia dimulai. Saat kampanye, Jokowi mengunjungi Papua Barat dua kali dan menyatakan ia berniat menyelesaikan persoalan di Papua. Dia bisa bergerak cepat pada isu-isu kritis yang orang Papua hadapi: kejahatan HAM, pelayanan kesehatan dan pendidikan, persoalan hak tanah, lingkungan dan sumber daya alam. Untuk jangka panjang, keberadaan orang Papua bergantung pada isu-isu tersebut.

Yang terpenting, mereka tak hanya layak mendapat hak pembangunan ekonomi, namun juga berhak berbicara menceritakan kisah mereka, kekerasan yang mereka alami. Mereka perlu didengar dan diakui. Presiden Jokowi juga berkesempatan menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu dan memulai era baru.

Terpilihnya Jokowi menciptakan optimisme di kalangan orang Papua yang telah begitu dikecewakan di masa lalu. Dia bisa menunjukkan rezim baru telah dimulai dengan cara membebaskan tahanan politik, mencabut pembatasan media dan memerintahkan Jaksa Agung dan polisi investigasi pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu, termasuk pembantaian Biak. Dia bisa mengubah situasi dari ketakutan dan sinisme menjadi harapan untuk masa depan lebih cerah.

Jokowi juga perlu memusnahkan 'iblis-iblis' yang berkuasa di Papua Barat. Ini ancaman penting terhadap kepresidenannya. Sarang paling disukai oleh 'para iblis' di Indonesia adalah Papua Barat. Mereka tinggal di sana, bersembunyi di bawah kekuasaan militer, korporasi dan dominasi konglomerat. Bagaimana Anda melawan 'iblis' ini? Dengan mendengar kisah pada korban. Membiarkan cahaya masuk. Dengan memberi orang kesempatan untuk bercerita. Menggunakan kata-kata, bukan peluru.

Perjalanan hidup Filep Karma adalah kisah Papua Barat dan Indonesia. Melalui keberaniannya, kita bisa memahami sifat 'iblis' dan bagaimana mengatasinya. Kisahnya setua umur manusia. Ia orang baik yang mengungkap ketidakadilan melalui senjata kebenaran.

Jim Elmslie
Master International Studies dan Doktor Filsafat Ekonomi Universitas Sydney. Ph.D. tesis berjudul *Irian Jaya Under the Gun: Indonesian Economic Development versus West Papuan Nationalism* diterbitkan Universitas Hawaii tahun 2002.

Masa Kecil Di Wamena dan Jayapura

KELUARGA FILEP KARMA adalah keluarga terpandang di Papua. Mereka berasal dari satu kampung sebelah utara Pulau Biak. Ayahnya, Andreas Karma, termasuk bupati paling populer di Papua. Andreas wakil bupati Jayapura pada 1968 hingga 1971. Lalu dia bupati Wamena pada 1970-an serta Serui pada 1980-an.

Pada 1979, pemuda Filep Karma, sesudah lulus sekolah menengah di Jayapura, belajar ilmu politik di Universitas Sebelas Maret, Solo, Pulau Jawa. Dia lulus 1987 dan bekerja sebagai pegawai negeri di Jayapura. Dia menikah dengan Ratu Karel Lina, seorang perempuan Melayu-Jawa, kelahiran 1960, asal Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mereka punya dua anak, Audryne dan Andrefina, kini masing-masing bekerja sebagai dokter gigi dan ahli farmasi.

Pada 1997, sebagai seorang pegawai negeri, Filep Karma mendapat beasiswa setahun kuliah di Asian Institute of Management, Manila. Ketika terbang dari Manila ke Jakarta pada Mei 1998, dia melihat protes mahasiswa Universitas Trisakti terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Dia hanya dua hari ada di Jakarta ketika Jakarta sedang bergolak.

Pendidikan dan pengalaman tersebut, dari Jayapura sampai Manila, membentuk kepribadian dan pemikiran Filep Karma. Pendidikan membuat dia sadar penindasan terhadap orang Papua. Pendidikan juga

mengubah cara pandangnya terhadap perjuangan kemerdekaan Papua maupun apa yang biasa disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Bapa tinggal di Biak sampai usia berapa?

Saya lahir di Jayapura pada Agustus 1959. Keluarga kami punya kampung di Biak Utara. Saya dibawa ke Biak, selama enam bulan, oleh ayah saya pada tahun 1967 hingga 1968. Saya lalu pindah ke pedalaman, ikut tugas ayah di Bokondini, dekat Wamena, bersama mama dan adik-adik.

Ketika masih kecil bagaimana Bapa tahu cerita pemerintahan militer Indonesia di Papua pada 1963-1969?

Ketika kelas dua SD, saya sudah dengar itu. Saya mendengar cerita dari keluarga yang dianiaya militer, juga dari teman-teman SD.

Ada seorang ibu dari teman SD saya, waktu main ke rumahnya di Jayapura, ibu tersebut menceritakan dia pernah jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong zaman Presiden Soekarno.

Waktu itu, banyak orang Papua ingin New York Agreement dijalankan dengan *one man one vote*. Tapi Indonesia menganggap *one man one vote* tidak cocok untuk Papua. Orang Papua dianggap masih terbelakang, belum siap buat referendum, Indonesia ingin pakai sistem musyarawah. Ibu teman saya lebih suka *one man one vote* maka dituduh mendukung Papua Merdeka. Ditangkap militerlah dia, dipenjara dan diinterogasi.

Ceritanya menambah pemahaman saya soal penolakan terhadap New York Agreement oleh Indonesia. Pada 1969, akhirnya hanya 1.025 orang dipilih Indonesia untuk 100 persen dukung integrasi dengan Indonesia. Mereka diancam dan dipaksa memilih Indonesia. Ini secara prinsip bertentangan dengan New York Agreement. Mereka yang ingin referendum ditangkap tentara. Hanya tidak setuju dipenjara.

Cerita lain saya dengar dari Samuel (Sam) Karma, saudara saya. Dia datang membesuk waktu saya diopname di Rumah Sakit Dok II, Jayapura tahun 2010. Dia bercerita bahwa sejak Tri Komando Rakyat (Trikora) mulai diumumkan Ir. Soekarno Desember 1961, sudah ada

penyusupan mata-mata Indonesia ke Papua. Pada tahun 1962 saat tentara perdamaian PBB masuk ke Papua, tentara Indonesia ikut masuk dan mulai melakukan penangkapan dan teror kepada orang Papua.

Teror semakin meluas pada 1963. Sam Karma cerita, jika mobil patroli polisi atau militer lewat di jalan dan ada dua atau tiga orang Papua berdiri di pinggir jalan, mobil itu berhenti, polisi turun dan perintahkan orang Papua bubar. Bila di antara orang tersebut ada yang vokal, mereka langsung ditangkap dan dibawa ke pos polisi terdekat untuk ditahan.

Cerita lain lagi saya dengar dari A. Rumpaisum, tante saya. Ia menjadi anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) dan dikarantina di asrama STM Dok VII Tanjung. Setiap hari dia didoktrin oleh perwira militer. Kadang-kadang pada malam hari, tante saya diajak jalan-jalan dan ditraktir minum bir sepuasnya, sambil terus didoktrin dan diawasi gerak-geriknya. Waktu Pepera 1969 dilaksanakan, tante saya diancam, kalau memilih opsi Papua Merdeka, maka mulutnya akan disobek dan keluarganya akan dibunuh.

Apa pengalaman pribadi dengan Pepera 1969?

Pada awal tahun 1968, saya usia sembilan tahun, kakek saya mengungsi dari Biak. Sementara kami anak-anak ikut Bapak saya, Andreas Karma, yang baru dapat promosi menjadi wakil bupati Jayapura. Jadi kami tinggal di Kampung Harapan. Bapak jadi wakil bupati Jayapura dari 1968 sampai 1971.

Pernah tentara datang ke rumah kami di Kampung Harapan. Tendang-tendang pintu rumah, gedor-gedor dengan popor senjata, terus dibuka, suruh angkat tangan semua. "Apakah disini menyembunyikan pentolan OPM?" teriak tentara.

Kebetulan masih saudara kami: Samuel (Sam) Karma dan Jan Pieter Karma. Dulu posisinya apa saya tidak tahu. Kalau Jan Pieter Karma salah satu pentolan OPM, di kampung saya di Biak, yang terakhir saya dengar, kalau tidak salah, pangkatnya kolonel.

Dari mereka, kami tahu kalau ada operasi militer. Mereka merasa tidak aman di pedalaman, mengungsi ke kota. Banyak barang rakyat dirampas tentara Indonesia. Kalau baca buku Jusuf Wanandi, *Shades of Grey: A Political Memoir of Modern Indonesia 1965-1998*, juga bisa

dipelajari penjarahan oleh tentara-tentara Indonesia. Jusuf Wanandi waktu itu asisten Letnan Jenderal Ali Moertopo, salah satu penasehat Presiden Soeharto. Pada Mei 1967, Wanandi dikirim ke Papua guna mempelajari persiapan referendum.

Wanandi terkejut lihat barang-barang dijarah tentara Indonesia. Menurut Wanandi, Papua praktis diabaikan oleh pemerintah Jakarta sejak Mei 1963, ketika Indonesia diizinkan oleh United Nations untuk sementara menguasai Papua.

Sebelum Mei 1963, Belanda banyak membangun infrastruktur kesehatan, pendidikan, jalan dan sebagainya di Papua. Ketika militer Indonesia datang resmi ke Papua, mereka menjarah barang-barang peninggalan Belanda dan dibawa pulang ke Jawa. Ali Moertopo terkejut membaca laporan Wanandi. Wanandi usul pemungutan suara dilakukan pada 1969. Wanandi menulis Indonesia pasti kalah kalau diadakan pada 1968.

Maka Ali Moertopo minta izin kepada Presiden Soeharto agar diperbolehkan memakai dana taktis operasi khusus mereka milik Kostrad yang disimpan di bank-bank Singapura dan Malaysia, total US$17 juta guna mengirim barang-barang ke Papua[1]. Soeharto beri izin. Ali Moertopo minta Wanandi beli barang-barang di Singapura dan Malaysia agar dikirim ke Papua. Tapi jumlah US$17 juta, tentu saja, tidak cukup buat mengganti macam-macam barang yang dijarah tentara. Saya pernah lihat rumah sakit di Surabaya memakai lemari baja buatan Belanda untuk rumah sakit Dok II Jayapura. Masih ada stempel Dok II di lemari tersebut.

Kejadian di Kampung Harapan itu bagaimana?

Itu rumah paman saya, adik ayah saya, yang menikah sama marga Rumsowek. Waktu itu baru bangun tidur kan? Kaget! Bingung! Setelah buka pintu terus angkat tangan. Tentara terus bilang, "Kami mencari Sam Karma sama Jan Pieter Karma. Kalian menyembunyikan?" Kami

1 Pada 1963-1965, Letnan Jenderal Soeharto adalah Panglima Komando Strategis dan Cadangan ketika dia memerintahkan Ali Moertopo bikin operasi khusus guna mencairkan ketegangan Indonesia dan Malaysia. Operasi ini memiliki dana yang disimpan di bank-bank Singapura dan Malaysia.

bilang tidak ada. Terus mereka menggeledah, masuk ke kamar tidur, kasur jungkir-balik, pakaian di lemari dihamburkan semua di lantai.

Ada truk tentara, terus ada mobil lain. Rumah itu dikepung, sekeliling rumah, ada yang masuk dari depan, setelah menggedor-gedor, yang lain masuk ke kamar-kamar periksa. Saya tak tahu berapa banyak.

Berapa anak waktu itu tinggal di rumah paman?

Saya, adik saya, paman saya dengan istri, yang belum punya anak, terus kakek saya, adik-kakak, menumpang di situ. Waktu itu situasi kampung-kampung bergolak karena penjarahan dan penindasan tentara. Menjelang Pepera 1969, seluruh Papua bergolak, Biak juga bergolak. Mereka merasa tidak aman di kampung Biak, jadi mengungsi tinggal di kota Jayapura.

Bagaimana Jan Pieter Karma dan Sam Karma bisa diduga ke rumah tersebut?

Memang mereka disebut datang kesitu. Cuma orang memberikan informasi palsu saja. Yang datang dua kakek saya dari kampung itu, kakak-beradik. Mungkin mereka diduga Jan Pieter Karma dan Sam Karma. Tapi yang lucu, pada siang menjelang sore, ada satu kakek kami juga, yang bekerja sebagai polisi, namanya Fritz Karma. Dari cerita keluarga, saya tahu dia informan militer juga. Apakah dia yang melaporkannya? Sebab setelah dia bertamu, malamnya kok ada tentara?

Akhirnya Jan Pieter Karma dan Sam Karma bagaimana?

Kalau Jan Pieter tidak ditangkap. Waktu itu ayah saya melakukan pendekatan dengan mereka supaya menyerah. Kalau tidak menyerah, masyarakat kami di kampung yang terancam. Mereka masih ada sekarang.

Ada pengalaman pribadi lainnya tentang Pepera 1969?

Ada. Waktu saya sekolah di Christus Rex, Jayapura kelas 2 dan 3 SD, saya mulai kenal dengan teman-teman baru, anak Papua juga non Papua. Dari jumlah murid yang ada di kelas, yaitu perbandingan antara Papua

dan non Papua, sangat jomplang. Jumlah murid Papua 9 orang dan non Papua 33 orang.[2]

Ternyata sekolah unggulan milik gereja ini lebih mengutamakan kepentingan anak non Papua dari pada anak Papua. Meskipun data ini kurang valid untuk sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

Pada kesempatan lain, saya dan teman-teman suka bermain, keluar masuk kampung. Suatu hari kami bermain di gudang-gudang milik Pemerintah Kabupaten Sukarnopura. Waktu kami masuk ke kompleks itu, kami melihat tempatnya dipenuhi kendaraan lapis baja.

Menjelang Pepera 1969, situasi politik di Sukarnopura semakin tegang. Setiap hari, entah pagi atau sore, pasti ada konvoi pasukan militer Indonesia menggunakan kendaraan lapis baja itu.

Sesudah Pepera 1969, bagaimana suasana Papua, saat Bapa remaja?

Pada era 1960-an sampai 1980-an, ketika saya remaja, Presiden Soeharto berkuasa dengan dukungan militer Indonesia. Soeharto tak banyak membatasi kekuasaan militer. Di Papua militer berkuasa total. Di Papua tak ada kebebasan berbicara. Kalau ada orang bicara, jangankan

2 Nama teman-teman kelas 2 SD: Edward Manobi (Pensiunan Bank BRI Subang-Jayapura), Leon Wayoi (Swasta-Jayapura), Karolus Poana (PT POS-Jakarta), Arthur Rank, Slamet Widodo, Yani Suryani Satia, Etha Saroge (PNS Pemprov Papua), Usman Triono (PT Wijaya Karya). Nama teman-teman kelas 3 SD: Anjar/Cucu Djumar (anak pamen militer Kodam 17 Cendrawasih), Annanta Djumar (anak pamen militer Kodam 17 Cendrawasih), Arthur Rank (anak pegawai PLN), Bagas/Bugas (anak pamen polisi), Berthus Tamnge (anak pegawai Dinas Pertanian), Carolus Poana (anak pegawai Dinas Sosial), Edhie (orang NTT, anak pegawai), Edward Manobi (anak anggota DPRGR Irian Barat), Endang Saparini (anak Kepala Kantor Agraria Propinsi Irian Barat), Eng/Elisabeth Kwa (anak Rumah Makan Sederhana), Ernawati (anak Panglima Daerah Angkatan Laut Irian Barat), Etha Saroge (anak pegawai kantor), Gustav (Uta) Parinusa (anak pegawai Pemda Irian Barat), Heru Subagio (anak Pegawai Dinas P&P), Jan Christian Gebze (anak pegawai Pemda Irian Barat), Jopie Hehakaya (anak Pegawai Pemkab Sukarnopura), Kristian/Kristianto (anak Ketua Pengadilan Tinggi Irian Barat), Lakhsmi (anak pegawai), Leon Wayoi (anak Pegawai Pemda Irian Barat), Linda Dequeldju (anak pegawai), Lisa Permana (anak Kadapol Irian Barat), Martha Kopong (anak pegawai), Marthinus Hehakaya (anak pegawai Pemkab Sukarnopura), Nikmah (anak militer), Niniek (anak pegawai), Oliva (anak pemilik Toko Capitol), Pangki Poana (anak pegawai Dinas Sosial), Petrus Kawi (anak pegawai PLN), Pieter Kawi (anak pegawai PLN), Ratna Paramita (anak pegawai PMI), Ratna Sutrisno (anak Kasdam 17 Cendrawasih), Retno Cahyaningtyas Sarwo Edhie W (anak Pangdam 17 Cendrawasih), Retno Puji Rahayu/Cipud (anak Pamen Kodam 17), Slamet Widodo (anak pegawai Perindustrian), Sri Rejeki (anak Pamen Kodam 17), Susilo (anak Kadapol Irian Barat), Toni/Edi Sasmita (anak Pamen Polisi), Usman Triono (anak pegawai), Wuriatmoko Kartika Hadi (anak pegawai Kejaksaan Irian Barat), Yani Suryani Satia (anak Sekda Propinsi Irian Barat), Yenni (orang Manado, anak Pama TNI), Yudhi Triwahyudie (anak pegawai)

bicara tentang merdeka, baru nama 'Papua' saja, bukan nama 'Irian', orang sudah dicap separatis. Mereka ditangkap oleh polisi ataupun militer. Mereka ditangkap dan dianiaya lalu dimasukkan penjara, tanpa disidang. Banyak juga yang dihilangkan. Sampai sekarang kita tidak tahu. Kalau sudah meninggal di mana kuburannya? Ada kuburan tanpa nama dan nama tanpa kuburan. Kalau masih hidup di mana tempat tinggal saat ini? Hilang di tangan aparat.

Waktu remaja saya berpikir kalau saya berjuang Papua Merdeka berarti saya harus berjuang dengan kekerasan. Saya harus mempersenjatai diri dan berjuang di hutan-hutan. Tidak mungkin tinggal di kota. Namun itu berarti siap mempertahankan nyawa. Pada umumnya orang Papua semua berpikir demikian.

Setelah saya pulang kuliah dari Jawa, tahun 1998, saya bekerja di pemerintah. Saya melihat masih terjadi perlakuan diskriminasi rasial dari aparat pemerintah Indonesia maupun saudara-saudara non-Papua, yang merantau ke Papua untuk mencari kerja. Mereka memandang, menganggap dan memperlakukan orang Papua sebagai setengah manusia, tidak diakui sebagai manusia pada umumnya.

Kemudian terjadi perampasan hak-hak orang Papua, antara lain tanah, posisi di pemerintahan, ataupun perusahaan-perusahaan swasta, yang dimiliki oleh orang Papua. Perusahaan-perusahaan itu kadang-kadang diambil alih.

Contoh, dulu di Papua, ada perusahaan Nieuwenhuijs, yang dimiliki oleh keluarga saya, Rumpaisum. Itu diambil alih oleh orang asal Manado. Sekarang perusahaan itu milik mereka, bergerak dalam ekspedisi muatan kapal laut.

Contoh lain, di Jayapura, di Jalan Irian–kalangan pejuang sebut Jalan Merdeka—hampir semua toko yang dimiliki oleh orang Papua pada 1960-an, sekarang sudah bukan milik orang Papua lagi. Toko-toko tersebut sudah berpindah tangan kepada non-Papua. Diambil alih dengan cara kasar. Kadang dengan menuduh orang Papua tersebut OPM, maka saat orang itu ditangkap, semua asetnya berpindah tangan ke non-Papua.

Contoh lain lagi. Sebuah pompa bensin Samudra Maya di Dok V Bawah, Jayapura, milik seorang Belanda. Ketika Belanda pulang,

sekitar tahun 1961 dan 1962, pemiliknya menyerahkan pompa bensin kepada almarhum Herman Wayoi, lengkap dengan semua surat-surat hak kepemilikan dan izin usaha. Sewaktu masuk tentara Indonesia, pompa bensin tersebut diambil paksa dari Herman Wayoi. Dia dituduh OPM, ditahan oleh militer, lalu tanpa sidang, beliau dipenjara dalam penjara militer beberapa tahun. Perusahaan tersebut tetap jadi milik Angkatan Darat.

Dari anak seorang pejabat Indonesia, juga pegawai negeri, Bapa berubah jadi orang yang kritis terhadap Indonesia. Apa yang membuat perubahan tersebut?

Ini merupakan kilas balik masa lalu. Saya dapat kesempatan sekolah di Asian Institute of Management, di Manila, Filipina. Di sana saya melihat masalah hak asasi manusia diperhatikan oleh saudara-saudara di Filipina. Mungkin tak seluruhnya. Tapi kebetulan tempat saya bermukim, saya bergaul dengan teman-teman, di daerah Makati tahun 1997-1998, hak asasi manusia dihormati.

Di situ saya mengamati suasana baru. Suasana beda dengan suasana yang saya alami selama kecil di Papua sampai saya merantau sekolah di Jawa. Saya tak pernah dapat perlakuan yang sama seperti yang saya alami di Manila.

Di Manila, saya dihargai sebagai manusia dan tak ada pelecehan, penghinaan atau perlakuan diskriminasi. Itu yang saya rasakan dalam pergaulan. Contoh ketika saya berbelanja di supermarket atau di pasar. Dalam pergaulan dengan masyarakat, saya merasa dihargai, sebagai sesama seperti mereka. Jadi saya dianggap bagian dari mereka atau dalam istilah Jawa *diwongke* atau dimanusiakan, tidak seperti yang pernah saya alami di Papua atau di Jawa.

Selama sekolah di Jawa, kitorang yang dari Papua, sering dianggap setengah binatang. Kitorang dianggap seakan-akan kitorang evolusi dari teori Darwin, proses dari hewan berubah jadi manusia.

Itu saya rasakan dari teman-teman yang kuliah di Solo. Jadi mereka bukan dari masyarakat yang tidak berpendidikan saja, tapi juga dari kalangan berpendidikan. Mereka memperlakukan kami begitu. Seringkali orang Papua dikata-katai, "Monyet! *Ketek*! Begitu."

Di sana juga saya menemui kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berbicara, dan penghargaan terhadap pendapat yang saya kemukakan. Ini motivasi saya. Setelah saya kembali ke Papua, saya lebih berani dalam berbicara, tidak seperti sebelum saya kuliah ke Filipina.

Manila juga mengubah konsep perjuangan saya. Tadinya saya berpikir harus jadi OPM atau berjuang Papua Merdeka harus masuk hutan dan bersenjata. Tapi ternyata tidak harus demikian. Gerakan bersenjata memang salah satu sisi perjuangan tapi ada sisi lain juga: berjuang dengan damai, tidak harus membunuh, tidak harus menembak orang.

Jadi kitorang berjuang damai dan konsisten terhadap apa yang kitorang perjuangkan. Berjuang damai di tengah-tengah komunitas atau dalam kota, tidak perlu lari ke hutan dan sembunyi. Kitorang tetap tinggal dalam kota dan menyampaikan aspirasi secara damai, sopan dan santun, tanpa menindas orang lain. Kitorang menuntut hak tanpa menindas hak orang lain, tapi kitorang punya kebebasan untuk menyampaikan kitorang punya pendapat dan sepantasnya itu didengar oleh pihak lain.

Kalau tidak sependapat atau berbeda pendapat tidak harus menindas salah satu. Tapi mari kitorang bicara supaya ada komunikasi dua arah. Ada dialog, dialektika dalam komunikasi, sehingga bisa ditemukan hal atau nilai yang ada kesamaan. Mungkin ada nilai-nilai yang tidak bisa disamakan atau ada perbedaan di mana kitorang bisa mencapai suatu tingkatan, sepakat untuk kitorang sepakat dan sepakat untuk kitorang tidak sepakat.

Saya dari Manila kembali ke Papua saat Presiden Soeharto mundur bulan Mei 1998. Tanggal 22 Mei 1998 saya tiba di Jayapura saat Jakarta sedang banyak mahasiswa merayakan Soeharto mundur dari kursi presiden.

Apa pengalaman di Filipina yang bikin percaya perjuangan damai itu mungkin?

Saya di Manila saat Presiden Fidel Ramos berkuasa. Kami boleh berbeda pendapat tapi tak harus berantem. Hal ini bisa kami terapkan di Papua. Waktu itu baru saja Soeharto jatuh tapi arogansi dari aparat

masih kental.

Saya mulai berpikir. Ini perjuangan yang bisa kami gunakan untuk memperjuangkan hak-hak kami: tak harus masuk hutan, tak harus bersenjata, tapi dengan ideologi. Kami boleh menyampaikan itu secara bebas kepada lawan kami.

Saya juga terinspirasi dengan *people power* di Filipina pada 1986 yang bikin Presiden Ferdinand Marcos lari. Saya juga belajar dari Jakarta pada 1998. Juga pola yang diajarkan dan dipraktikkan Mahatma Gandhi di India. Martin Luther King Jr. di Amerika Serikat, Nelson Mandela di Afrika Selatan serta Aung San Suu Kyi di Burma.

Biak Berdarah

PADA MEI 1998, ketika Presiden Soeharto mundur, B.J. Habibie naik dari wakil presiden menjadi presiden. Ia masa yang penuh gejolak di Jakarta maupun berbagai tempat di Indonesia. Serangkaian aksi pro-kemerdekaan Papua muncul di Jayapura, Sorong, Wamena, Biak, dan Manokwari antara Juli dan Oktober 1998. Lusinan aktivis ditangkap dan dipenjara.

Di Aceh, Gerakan Acheh Merdeka mengadakan peringatan ulang tahun Acheh Merdeka secara terbuka pada 4 Desember 1998. Mereka juga keluarkan bendera merah bulan sabit. Pada Januari 1999, pada hari Idul Fitri, pecah kekerasan komunal di Ambon –antara Kristen dan Islam—serta di Parit Setia, di daerah Sambas, tiga jam dari Pontianak –antara Madura dan Melayu. Lebih dari 20.000 orang mati dibunuh di kepulauan Maluku, dari Ternate sampai Ambon, antara 1999 hingga 2004. Lebih dari 3.000 orang Madura mati dibunuh di Sambas pada 1999 sampai 2000.

Khusus Timor Timur, pada Januari 1999, Presiden B.J. Habibie bilang lebih baik referendum sekarang daripada ditunda 10 tahun lagi. Maka United Nations segera siapkan referendum buat Timor Timur.

Sebulan berikutnya, 100 delegasi Papua datang ke Habibie dengan pimpinan Theys Eluay, mereka juga minta diizinkan bikin referendum di Papua. Habibie menolak dan menjanjikan otonomi khusus kepada

Papua. Habibie menolak dialog soal pemerintahan di Papua. Ia tahun-tahun yang kelam di seluruh Indonesia.

Filep Karma, sebagai orang kelahiran Biak, merancang aksi damai di Biak pada Juli 1998. Para demonstran menaikkan Bintang Kejora di Tower Air Biak. Human Rights Watch melaporkan bahwa seorang sersan polisi masuk ke kalangan demonstran. Dia dianggap hendak provokasi. Dia dipukul dan beberapa gigi patah. Ini menciptakan bentrok. Ia membuat tentara-tentara Indonesia menembaki demonstran. Banyak mayat dilaporkan dimuat ke dalam truk dan diduga dibuang ke laut dari dua kapal TNI Angkatan Laut. Karma menduga banyak mayat dikubur seadanya di pulau-pulau kecil dekat Biak. Jumlah korban mati hingga kini belum jelas. Karma dan dua orang adiknya, Constan dan Sari, ditangkap dan dihukum penjara.

Pada 6 Juli 2013, 15 tahun sesudah pembunuhan, pembantaian Biak diperingati dalam sebuah pengadilan rakyat (*citizen tribunal*) di Sydney. Sebuah website dibuat untuk peringatan pembantaian tersebut: http://www.biak-tribunal.org/. Beberapa saksi mata, termasuk ibu rumah tangga Tineke Rumakabu dan mahasiswa Amerika Serikat Eben Kirksey, yang kebetulan ada di Biak, datang ke Sydney untuk bersaksi. Filep Karma, yang ada dalam penjara di Abepura, muncul lewat rekaman video.

Dari mana Bapa memulai perjuangan damai itu?

Saya mulai di Biak. Kami mengibarkan bendera 2 Juli 1998 di Tower Air di Biak, dekat Puskesmas. Banyak masyarakat datang bergabung. Pikiran mereka masih terpengaruh dengan pola perjuangan lama. Mereka pikir kita harus bersenjata, harus melakukan perlawanan, pembunuhan yang berdarah-darah. Saya sampaikan pada masyarakat Papua di Biak, "Tidak, ini perjuangan damai, senjata kita hanya Injil."

Hukum Indonesia mengizinkan polisi untuk menembak jika orang yang hendak ditangkap bersenjata, yang membahayakan aparat atau orang lain, atau dia melarikan diri. Tapi kalau kita bersenjata kitab suci, tak ada alasan polisi untuk menembak. Kalau polisi datang menangkap tak harus melarikan diri. Kita tetap di tempat, bukan menyerah. Kita

menunjukkan bahwa kita ksatria, kita berani, kita hadapi.

Jadi kitorang hadapi. Dorang datang ya kita hadapi. Berhadapan muka dengan dorang. Sampaikan kita punya pendapat. Tidak harus kitorang melarikan diri. Jadi itu yang selalu saya sampaikan dalam orasi-orasi pada 2 hingga 5 Juli.

Perjuangan damai ini merupakan hal baru bagi masyarakat saya di Papua. Mereka datang banyak bawa tombak, parang, bom molotov. Ada yang bawa bom, di Papua terkenalnya *dopis,* bom rakitan dari botol dan pipa.

Setelah mereka berkumpul dan itu disampaikan kepada saya, saya bilang, "Maaf ini perjuangan damai. Jadi kitorang tak boleh pakai kekerasan, tak boleh pakai senjata yang bisa membahayakan orang lain."

Saya beritahu adik saya untuk mengumpulkan semua senjata dan dibawa ke pelabuhan lalu dibuang, termasuk pipa-pipa besi, kayu untuk mempersenjatai diri. Saya katakan tidak boleh.

Jadi kalau kita tak bersenjata, tak ada alasan polisi memperlakukan kita semena-mena atau menembak kita. Tapi kalau kita bersenjata ada alasan polisi untuk menembak.

Lalu tanggal 4 sampai 5 Juli, beberapa tokoh masyarakat, juga utusan pemerintah datang membujuk saya untuk menyerah. Maksudnya menurunkan bendera Bintang Fajar atau Bintang Pagi, supaya tidak terjadi pembantaian. Saya katakan: pantang bagi saya menyerah.

Mereka memberikan jaminan bagi keselamatan saya saja. Saya katakan, "Mengapa hanya saya saja yang dijamin? Bagaimana dengan masyarakat kecil ini? Siapa yang menjamin mereka? Tidak bisa! Saya minta jaminan bagi seluruh massa pendukung."

Saya khawatir setelah kami bubar, waktu mereka menjalankan aktivitas sehari-hari seperti berkebun, lalu dibunuh oleh aparat di hutan tanpa satu orang pun tahu. Ini namanya mati konyol. "Dari pada mati konyol, lebih baik mati sebagai pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat. Karena semua orang tahu dan lihat."

Kemudian ada beberapa tokoh agama sekitar 10 orang, datang dan memanggil saya "anak" karena usia saya lebih muda. Mereka bilang, "Anak menyerah saja, kami jamin anak punya keselamatan."

Saya tertawa lalu bilang, "Teman, ko percaya pada janji pejabat-

pejabat Indonesia? Contoh Soekarno. Dia begitu berjasa bagi negara dan rakyat Indonesia. Apa yang terjadi sesudah dia ditahan di rumah?"

Soekarno berjasa memproklamirkan negara Indonesia. Begitu banyak pengorbanannya, keluar masuk penjara Belanda untuk Indonesia Merdeka, cuma karena kekeliruan kecil, sudah diperlakukan semena–mena, hak-haknya dicabut, sampai dia meninggal.

Nah, kalau Soekarno yang berjasa saja diperlakukan begitu, terus saya ini, apa jasa saya kepada negara Indonesia sehingga Anda-anda berani menjamin keselamatan saya?

Saya tidak percaya. Saya katakan dari pada saya menyerah, jadi pengkhianat, lebih baik saya gugur sebagai pahlawan. Mungkin di mata Indonesia saya pengkhianat tapi di mata rakyat Papua, saya adalah seorang pejuang. Itu komitmen saya.

Kemudian saya menanyakan kepada para tokoh agama tersebut dimana sekarang kuburan satu tokoh OPM, tahun 1960-1970-an, bernama Ferry Awom[3]?

Ferry Awom dulu menyerah baik-baik pada panglima militer Indonesia di Papua, Brigadir Jenderal Acub Zaenal.

Ferry Awom dan beberapa ratus anak buahnya turun dan menyerah baik-baik. Dia menyerahkan senjata. Saya pernah nonton film dokumentasinya. Tetapi sampai hari ini, kami tidak tahu dimana Ferry Awom? Kalau sudah mati dimana kuburannya? Kalau masih hidup dimana orangnya?

Lalu para tokoh agama ini jawab, "Ferry Awom, kami tahu dia punya rumah ada di sini."

Saya bilang, "Maaf saya tidak tanya rumah. Saya tanya orangnya. Kalau sudah meninggal dimana kuburannya? Kalau masih hidup dimana orangnya?"

Akhirnya mereka menjawab tidak tahu.

"Nah kalau Ferry Awom saja Bapak tidak tahu, terus bagaimana Bapak percaya pada janji para pejabat Republik Indonesia? Saya tidak percaya kepada mereka. Dari pada saya mati konyol seperti Ferry Awom, yang sudah menyerah dengan sopan, namun sampai sekarang

3 Ferry Awom komandan PVK (Korps Polisi Relawan Papua) tahun 1965 saat Organisasi Papua Merdeka (OPM) berdiri.

kita tidak tahu dimana jejaknya, lebih baik saya tetap bertahan. Kalau saya dibunuh, ditembak mati, saya gugur sebagai pahlawan. Jelas rakyat juga menyaksikan bahwa saya ditembak mati. Daripada saya menyerah baik-baik, tahu-tahu malam hari diculik tanpa berita dan tidak ada yang tahu ke mana saya."

Jadi saya bertekad demikian.

Akhirnya para tokoh agama ini menyerah dan pamit. Lalu kepada masyarakat saya himbau, baik yang mendukung saya maupun para simpatisan yang menonton atau menemani kami di bawah Tower Air, untuk menjaga bendera Bintang Fajar.

Bagi mereka yang sudah siap mati sebagai pahlawan, silahkan bergabung dengan saya. Kalau masih ingin hidup dan masih takut, ragu-ragu, belum kuat imannya, silahkan pulang.

"Kalian pulang dan sembunyi di rumah."

Maksudnya pulang ke rumah, kunci pintu dan berdoa untuk kami yang sudah siap berkorban untuk Papua Merdeka.

"Jangan kalian hanya menyingkir dari Tower Air ini. Lalu kalian menjadi penonton bagaimana kami dieksekusi atau ditangkap dan dianiaya. Sebab kalian akan menjadi korban selanjutnya."

Itu selalu saya himbau terus. Apapun informasi yang saya dapat tentang rencana penyerbuan dari pasukan pembersihan—istilah kasar yang biasa dipakai pihak keamanan "dilibas"—saya selalu beritahu masyarakat. Tidak pernah saya tutup informasi. Saya sampaikan juga rencana mereka: Senin tanggal 6 Juli akan ada operasi militer besar-besaran dan kami akan ditumpas habis.

Saya perlu sampaikan di sini karena di kemudian hari, masih ada juga orang yang menuduh saya tipu rakyat dan rakyat dikorbankan. Saya merasa orang-orang yang menuduh saya begini tidak hadir di lokasi aksi. Mereka hanya mendengar dari mulut ke mulut lalu menuduh seakan saya menipu rakyat Papua untuk mati dan saya cari selamat. Saya tidak demikian.

Saya siap mati. Kalau saya masih hidup sampai hari ini jangan tanya saya. Karena hidup dan mati hanya Tuhan yang menentukan. Kenapa saya diizinkan masih hidup, saya pun tidak tahu. Tapi bagi saya pribadi, masih hidup berarti Tuhan masih izinkan saya berjuang dan saya akan

tetap berjuang sampai Papua Merdeka.

Apakah saya akan melihat Papua merdeka atau tidak, mungkin saya sudah mati duluan. Bagi saya itu tak penting, yang penting rakyat Papua terbebas dari penindasan. Rakyat Papua merdeka di atas tanahnya sendiri. Dia berhak menentukan hidupnya ke depan, mau jadi apa semua ada di tangan rakyat Papua. Bukan bangsa lain, yang datang dan menentukan orang Papua harus begini, harus begitu.

Apa latar belakang aksi di Biak 1998?

Sekian lama rakyat Papua hidup dicekam ketakutan. Mereka tak berani berekspresi apa yang jadi aspirasinya. Pada 1960-an sampai mendekati 1980-an, Biak itu daerah operasi militer. Banyak pembantaian terhadap masyarakat di kampung-kampung Biak: penangkapan, penculikan dan penghilangan paksa. Banyak orang jadi korban penculikan, pembunuhan semena-mena. Ibu-ibu maupun anak gadis remaja yang jadi korban perkosaan.

Di daerah Biak Barat, hingga kini ada anak lahir dari perkosaan. Mukanya kelihatan bukan orang asli Biak. Kadang mirip orang Jawa. Ada satu anak—maaf saya tidak tega sampaikan, tapi perlu saya sampaikan sebagai bukti kekejaman—dipanggil dengan nama "Kodim". Maksudnya dia anak yang lahir dari hasil perbuatan tentara Kodim. Dia tak diberi nama yang baik.

Saya pikir di kalangan kita, masyarakat timur, anak yang lahir di luar pernikahan resmi kadang diperlakukan semena-mena. Padahal, dia tidak minta dilahirkan dalam kondisi demikian, tapi sudah terjadi kondisi begitu dan dia harus terlahir. Tapi masyarakat, mungkin karena keterbatasan pendidikan atau pemahamannya tentang HAM, stigma negatif ditempelkan pada anak yang bersangkutan.

Padahal dia secara psikologi sudah tertekan. Dia lahir tanpa tahu siapa ayahnya tetapi masih lagi masyarakat menghukum dengan stigma atau nama negatif. Sakit hati, kebencian, ketidaksukaan masyarakat terhadap perlakuan oknum-oknum itu, secara tidak sadar ditimpakan pada anak yang bersangkutan. Padahal anak ini tidak tahu apa-apa. Ini menyedihkan masih terjadi di lingkungan kami di Papua.

Pada 2012, ada film dokumentasi "Surat Cinta kepada Sang Prada[4]" tentang seorang perempuan Malind di Merauke, yang dipacari dan melahirkan anak dari seorang tentara Indonesia asal Banten. Anak ini tak pernah sekali pun ditengok ayahnya. Surat-surat dari perempuan itu juga tidak pernah dibalas si tentara bernama Samsul. Bahkan sesudah dijadikan film, menang penghargaan di festival film internasional, tidak juga ada tanggapan dari Samsul.

Ini bagian dari pelanggaran HAM. Ini sangat memprihatinkan saya.

Di daerah–daerah lain pun terjadi demikian. Di Paniai, masyarakat dikumpulkan, lalu mereka tanya, tahu tidak OPM di mana? Tapi masyarakat tidak bisa menjawab karena tidak tahu. Ada juga tidak berani menjawab karena yang menjadi anggota OPM masih keluarga sendiri. Tetapi pasukan yang melakukan operasi militer tidak mau tahu. Akhirnya masyarakat di Paniai disuruh tunduk, lalu besi dibakar sampai menyala lalu ditusuk dari, maaf, anusnya sampai tembus di kepala, mulut, atau entah di mana. Banyak terjadi hal tidak manusiawi.

Ini terjadi di Manokwari, Paniai, di daerah-daerah lain di mana ada aksi perlawanan dari rakyat Papua. Bahkan di daerah yang tidak ada aksi pun perlakuannya semena-mena. Hal itu membangkitkan perasaan sakit yang sama, bahwa kami yang tadinya dianeksasi, sebagai bagian dari Republik Indonesia, tapi dalam perjalanan bersama dalam negara yang disebut Indonesia, kami diperlakukan sangat tidak manusiawi dan itu sangat menyakitkan.

Peristiwa yang terjadi di Paniai, kami di Biak juga merasakan sakitnya. Atau yang terjadi di Biak, di Paniai, di Nabire, di Jayapura, di Wamena, di Merauke, di Sorong, mereka juga ikut merasakan sakit.

Apa tujuan aksi di Biak tersebut?

Tujuan saya mengibarkan bendera di Biak untuk menyatakan pada dunia bahwa bangsa Papua ingin merdeka. Terus terang, dari kecil saya mendengar ada satu teori diajarkan para orang tua kami. Saya belum menemukan referensi apakah teori ini benar. Dikatakan kalau bendera Papua, atau suatu bangsa yang ingin merdeka, jika ia mengibarkan

4 Surat Cinta kepada Sang Prada diproduksi tahun 2012, tonton http://www.engagemedia.org/Members/papuanvoicesmerauke/videos/surat_sang_prada/view

benderanya 24 jam dan tidak diturunkan, kemudian ada pengakuan dari PBB, berarti bangsa itu harus dimerdekakan. Rupanya ini sudah tertanam di benak saya sejak kecil. Saya ingin membuktikan kebenaran teori tersebut.

Saya berusaha supaya bendera jangan diturunkan minimal 24 jam. Saya pelajari sejarah perjuangan Papua yang dilakukan senior-senior. Selama ini pengibaran bendera Papua terjadi di hutan-hutan. Ini sah-sah saja karena tentara tidak sampai ke situ. Tidak ada yang melihat. Tetapi yang saya lakukan di dalam kota. Di depan khalayak ramai dan direkam media massa. Jadi otomatis akan tersebar berita itu ke dunia.

Selama ini tidak pernah terjadi bertahan melebihi 24 jam. Jadi waktu di Biak, saya sampaikan pada adik-adik yang membantu saya, "Kita harus pertahankan ini sampai lebih dari 24 jam."

Ternyata kami bisa bertahan sampai 4x24 jam. Hari Kamis mulai berkibar jam dua pagi sampai hari Senin jam 9 pagi baru diturunkan.

Ini sekaligus membuktikan teori yang mengatakan kalau bendera berkibar 24 jam ada pengakuan dari PBB, ternyata tidak benar. Ada orang Papua yang masih mengingat teori ini dan masih berpegang pada teori tersebut. Saya sudah membuktikan bahwa ajaran tersebut tidak benar.

Jadi mari kita berangkat dari hal-hal yang nyata kita susun. Perjuangan ini ke depan bagaimana? Satu hambatan yang saya lihat selama ini, orang Papua selalu mau tepuk dada, "Saya boleh. Saya boleh. Semua berebut."

Maksudnya ada satu sifat atau karakter yang masih kental dengan kepahlawanan primordialis atau kepahlawanan suku. Setiap orang ingin dibanggakan, dipuji, disanjung, atau terhormat di kalangan sukunya atau kelompok primordialnya. Jadi sulit menerima keberanian, kepahlawanan, kesatriaan, ketokohan, dari orang lain yang tidak sesuku atau sekelompok perjuangan. Masih terjadi masing-masing pribadi tepuk dada sendiri, membanggakan apa yang diperjuangkan. Mungkin saya juga sadar atau tidak sadar. Jadi proses pembentukan *nation* belum selesai. Berproses bersamaan dengan perjuangan kemerdekaan yang sedang berjalan. Ini yang menyulitkan dicapainya konsensus dalam menyatukan organ perjuangan.

Lalu di kalangan Papua sendiri terjadi persaingan. Semua ingin menjadi pemimpin. Tak ada yang mau mengalah, semua mau memaksakan kehendak, keinginan, organisasinya. Yang lain harus berafiliasi dan harus mengikuti kemauan organisasi tersebut. Ini yang membuat persaingan di dalam faksi atau organisasi perjuangan.

Karena masing-masing mempertahankan pendapat dan ego organisasinya, ini jadi lahan empuk Indonesia atau pihak lawan untuk mengadu domba antara faksi perjuangan. Antar pemimpin satu dengan yang lain. Antar Gunung dengan Pantai, pulau Tanah Besar, Kepala Burung dengan daerah Utara, Selatan, Timur lawan Barat. Ini yang selalu dimainkan pihak lawan.

Saat ini bertambah lagi dengan adanya otonomi khusus. Jadi di kalangan kita, faksi-faksi perjuangan saja sudah terpecah belah dan sulit saling menerima dan menyatukan pendapat. Ditambah lagi dari luar faksi perjuangan atau kelompok yang berjuang merdeka. Banyak juga orang Papua yang gampang dibeli dan dipakai pemerintah Indonesia untuk semakin mengacaukan kita sesama orang Papua.

Belum lagi para birokrat yang ambisi terhadap jabatan. Mereka memecah-belah persatuan melalui pemekaran-pemekaran. Di dalam pemekaran itu terjadi sentimen kedaerahan, yang semakin lama semakin meruncing. Juga persaingan antar calon pejabat pemerintah, seperti baru-baru ini kita lihat terjadi di daerah Puncak Jaya. Di mana dua kandidat bupati dari satu partai saling berbunuhan.

Kalau dua pemimpin yang saling berbunuhan, dua oknum pribadi, tidak masalah. Hanya dua yang jadi korban, lalu persoalan selesai. Tapi ini dua yang berambisi, yang jadi korban pengikutnya, rakyat Papua juga. Ini masalah besar bagi kita orang Papua, hingga kitorang orang Papua sulit bersatu. Tidak mau merendahkan hati, saling menerima, saling tukar pendapat, sehingga satu bisa menghargai yang lain. Ibaratnya saya mengerti yang lain, yang lain bisa mengerti, saya kira, saling berbagi, tukar pengalaman.

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya himbau pada orang Papua, kalau lihat sejarah perjuangan kita, kitorang punya senior-senior dulu, mereka lakukan egoisme, fanatisme kelompok, merasa diri paling unggul, merasa penting sendiri. Yang lain harus tunduk terhadap

perintah dia. Ini semua sudah pernah dilakukan oleh kitorang punya senior-senior.

Kenapa kitorang yang baru ini, kembali mengulang hal yang sudah pernah dilakukan senior? Kita harus mengubah pola perjuangan. Kita harus mau merendahkan diri, merendahkan hati, saling mengalah, ada negosiasi, saling terima satu dengan yang lain. Kalau kita saling terima, otomatis ada hal-hal yang mungkin saya merasa ada kepentingan saya, saya rela melepaskan menjadi hak orang lain. Begitupun sebaliknya, ada kepentingan dia yang perlu dia lepaskan, supaya dia bisa diterima pihak lain.

Ini yang sangat perlu bagi orang Papua. Kita mau duduk bersama, saling mendengar, saling mengalah dan kalau kita mau memilih pemimpin, mari kita tempuh cara demokratis. Contohnya, kitorang harus banyak belajar dari pemerintah Indonesia. Bagaimana pemilihan bupati atau gubernur di luar Papua dilakukan? Mereka sudah dewasa dalam politik, mau saling mendengar, saling menerima, saling mengalah. Kalau dia kalah, dia mau terima hasil pemilihan. Dia juga menghimbau kepada pengikutnya untuk mau menerima pihak yang menang. Kekalahan suara bagi pihaknya itu bukan kekalahan pribadi. Kemenangan pihak lawan bukan kemenangan pribadi. Tetapi kemenangan rakyat. Jadi siapapun yang terpilih adalah kemenangan rakyat. Kita bisa bersatu dan membangun organ perjuangan yang kuat karena kita menjadi satu kekuatan, tidak terpecah belah lagi.

Contoh paling gampang ikatan sapu lidi. Kalau sapu lidi satu-satu batang saja, tidak mampu kita pakai sapu. Tapi kalau sapu lidi diikat jadi satu, punya kekuatan untuk memindahkan sampah atau kotoran.

Bagaimana kitorang orang Papua bersatu dalam perjuangan ini? Jadi bersatu bukan sekedar diucapkan, tapi dari semua pihak, mau saling mengalah. Itu sangat penting. Karena selama ini perjuangan kita terbentur karena tak ada persatuan.

Di samping itu, untuk teman-teman pejuang yang sudah berdiaspora ke manca negara, ternyata mengulang hal yang sama, yang pernah dibuat senior atau yang sedang terjadi di dalam tanah Papua. Mereka di luar negeri juga berbagai macam faksi, terjadi persaingan antar mereka. Mereka saling menjatuhkan. Menjelekkan.

Ini menguntungkan pihak lawan. Bukan lawan yang berhadapan dengan kita, tapi antar kitorang sendiri saling menjatuhkan, saling melemahkan. Lawan cuma santai saja. Dia tepuk tangan, tak perlu pakai kekuatan ekstra, mereka sudah menang. Di antara kitorang sendiri, baku saing, baku *gate*, akhirnya kitorang jatuh sendiri, baku pukul sendiri, babak belur sendiri. Ini belum lawan musuh, melawan kitorang sendiri.

Saya tekankan jangan terpengaruh atau mengikuti apa yang senior-senior sudah buat. Anak-anak muda mari bersatu, kalian galang kekuatan bersama, pegang nilai-nilai demokratis. Pilih siapa yang kalian pandang atau kalian setujui untuk memimpin kalian dan kalian bersatu di bawah satu komando sehingga perjuangan bisa lebih baik. Lebih cepat mencapai cita-cita dimana tanah Papua bebas dari tangan penjajah dan rakyat Papua bebas menentukan nasibnya sendiri, ke depan mau jadi apa.

Nasionalisme Papua

PADA 1 DESEMBER 2004, Filep Karma mengatur suatu acara peringatan deklarasi kemerdekaan Papua, 1 Desember 1961, dengan pertemuan kecil di sebuah lapangan di Abepura. Dia berapi-api pidato soal kebangsaan Papua. Dia bicara bahwa "orang Papua" bukan selalu kulit hitam, rambut keriting.

"Di Jawa, ada orang rambut lurus, orang Jawa asli, dia juga peduli pada kita orang. Suatu saat kalau Indonesia kejar dan bunuh orang ini, 'Sobat kau datang!'" katanya. Orang Jawa, orang Manado, siapa pun yang rasa memiliki di kebangsaan Papua adalah bagian dari bangsa Papua. Sebaliknya, banyak orang asli Papua, kulit hitam, rambut keriting, "makan lebih banyak … hatinya lebih Indonesia," kata Karma. Pidato tersebut dimuat di You Tube.

Ia membuat Filep Karma ditangkap polisi, diadili dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri Abepura, terbukti melanggar pasal makar KUHP 106 dan 110. Dia dihukum 15 tahun penjara oleh pengadilan Abepura. Karma naik banding dan kalah terus hingga Mahkamah Agung di Jakarta.

Filep Karma menempuh jalur hukum dan memberi kuasa kepada Freedom Now, sebuah organisasi bantuan hukum di Washington DC, menggugat negara Indonesia soal "penahanan" itu di UN Working Group on Arbitrary Detention di New York, lembaga internasional yang

khusus mengadili persoalan tahanan politik. Sesudah sidang selama hampir setahun, mereka memutuskan pada November 2011 bahwa Karma tak mendapatkan *fair trial*. Pengadilan-pengadilan Indonesia dinilai tidak proporsional memakai pasal makar. UN Working Group on Arbitrary Detention minta pemerintah Indonesia membebaskan Filep Karma "sesegera mungkin" dan "tanpa syarat".

Pemerintah Indonesia menolak membebaskan Filep Karma. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto berpendapat Indonesia tak ada "tahanan politik." Indonesia hanya punya tahanan kriminal dan tahanan khusus (korupsi).

Apa syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh Papua untuk Papua merdeka?

Kalau merdeka, terus terang, bagi saya, dengan situasi saat ini, masih sangat jauh. Secara politik internasional, Papua sudah diterima sebagai bagian dari wilayah negara Indonesia dalam Sidang Umum United Nations pada November 1969. Votingnya, 84 negara setuju dengan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), 30 negara abstain, dan tidak ada satu negara pun yang tidak setuju Papua masuk Indonesia.

Sekarang jumlah anggota United Nations ada 194 negara. Bila Papua hendak menjadi negara berdaulat, mula-mula ia harus mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan United Nations, guna dibahas di Sidang Umum. Ia harus voting dan setidaknya dapat dua per tiga dari total anggota United Nations. Singkatnya, kitorang harus dapat dukungan setidaknya 130 negara, buat bisa merdeka.

Sekarang berapa jumlah negara yang setuju Papua merdeka? Vanuatu mungkin satu-satunya yang terbuka dukung Papua merdeka. Dari kelima anggota tetap Dewan Keamanan–Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, Tiongkok—tidak ada satu pun yang setuju Papua merdeka. Bahkan sebagian mereka punya *interest* di Papua: Freeport McMoran milik Amerika Serikat dengan tambang tembaga dan emas di daerah Timika, British Petroleum milik Inggris dengan gas di Teluk Bintuni serta rencana fasilitas peluncuran satelit milik Rusia di Pulau Biak serta berbagai perkebunan sawit dengan pendanaan dari lembaga-

lembaga keuangan Tiongkok.

Tapi tidak berarti kitorang tidak punya kesempatan. Kitorang bisa belajar dari perjuangan referendum Sudan Selatan pada Januari 2011. Kegagalan negara Sudan –ekonomi gagal, kekerasan merajalela, kekebalan hukum, Presiden Omar al-Bashir beri tempat buat Osama bin Laden tinggal selama lima tahun pada 1990-an serta milisi Janjawid banyak bunuh orang Afrika kulit hitam yang berbeda dengan etnik Arab—mendorong dunia internasional dukung Sudan Selatan merdeka. Sudan Selatan punya organ-organ perjuangan ditata rapi serta diplomat-diplomat di berbagai ibu kota internasional.

Kitorang pertama harus membenahi organ-organ perjuangan dulu, duduk bersama untuk merapikan barisan dan mulai dengan pendidikan politik pada masyarakat, memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa saat ini kalian sedang merasakan dijajah, sakit rasanya.

"Apa kamu mau terus begini?"

"Apakah situasi ini diwariskan kepada kita punya anak-anak? Kita punya cucu–cucu?"

"Kalau kita sudah rasa sakit, jangan kitorang pertahankan situasi ini. Mari kitorang ubah pola perjuangan kemarin yang kurang tepat. Mari kitorang diskusi, cari alternatif yang terbaik sehingga perjuangan bisa lebih baik dibanding kemarin."

Ada pepatah yang mengatakan, "Hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini."

Ini dapat kitorang pakai untuk memberikan penyadaran pada masyarakat untuk menerima perbedaan di antara kitorang dan juga menyatukan tekad untuk berjuang bersama di dalam berbagai perbedaan kita.

Perbedaan tidak bisa dipaksakan jadi satu. Tapi dalam perbedaan kitorang menjadi satu. Misalnya, Orang Gunung tidak mungkin dipaksa jadi Orang Pantai. Orang Gunung tetap Orang Gunung, Orang Pantai tetap Orang Pantai. Tetapi kitorang sama-sama merasa orang Papua, kitorang bangsa Papua, karena penderitaan teman-teman di Gunung rasakan, kami di Pantai juga rasakan. Penderitaan yang teman-teman Pantai rasakan, yang di Gunung juga rasakan.

Kitorang senasib, satu penderitaan. Ini dapat jadi dasar kebangkitan

kita. Karena senasib, seperasaan, sepenanggungan, merdeka bisa didapat.

Saat ini orang Papua dapat banyak belajar dari teman-teman Indonesia. Mereka merdeka dan membangun negara Indonesia dalam kepelbagaian. Sesudah Presiden Soeharto turun, Indonesia mengarah pada pemaksaan kehendak oleh sekelompok orang, atas nama mayoritas, terhadap yang lain. Ini bisa membuat perpecahan bangsa Indonesia.

Kalau ke depan Papua juga dibangun seperti ini, berarti kitorang lebih bodoh dari keledai. Sebab kitorang sudah belajar apa yang Indonesia alami. Soekarno memberikan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tapi mereka satu. Tapi semboyan itu kini dikalahkan dengan argumentasi mayoritas dan minoritas.

Pada awal mereka bersatu, sehingga Indonesia kuat untuk bisa memperjuangkan kemerdekaan melawan Jepang pada 1945, sudah itu terus mempertahankan dari Belanda sampai 1949.

"Merebut dari Jepang" ini dalam tanda petik, sebab sejarah Indonesia juga banyak dikaburkan. Saya masih ragu seberapa besar usaha mereka merebut dari Jepang? Sebab kita lihat juga ada bantuan pemerintah Jepang, antara lain, pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. Jadi ada juga andil orang Jepang dalam mendirikan Indonesia. Jadi apakah itu perebutan atau itu hadiah? Tapi itu tanggungjawab teman-teman Indonesia untuk menjawab sejarah mereka sendiri.

Tapi itu jadi pelajaran bagi kita orang Papua. Kalau kitorang berhasil merebut atau memperjuangkan kemerdekaan, kepelbagaian kita harus dipertahankan dan dibela. Jadi beraneka suku, adat istiadat, tradisi, merupakan kekayaan *nation*, kekayaan bangsa. Jangan itu dipertentangkan. Itu merupakan kekayaan bangsa yang harus kita jaga dalam kelangsungan hidup dari bangsa Papua.

Jadi jangan karena punya musuh, kita bersatu tetapi setelah musuhnya tidak ada kitorang baku pukul sendiri. Jadi sekali pun di Papua, yang mungkin suku minoritas cuma tujuh kepala keluarga, tetapi dia punya hak yang sama dengan suku yang besar.

Ini yang disebut demokrasi. Kita beri hak yang sama. Dia punya hak untuk berbicara, hak hidup, hak untuk berusaha mendapatkan nafkah, hak beragama, hak berserikat, dan dia punya suara diperhitungkan.

Meski dia minoritas, dalam parlemen dia juga mempunyai perwakilan. Dalam hidup ini kadang kalah. Tapi belum tentu minoritas itu pasti kalah atau salah. Kita beri hak yang sama untuk semua kelompok, semua suku, semua etnis untuk menyampaikan pendapat.

Nanti dalam forum resmi, yang lebih luas, kita menilai. Pendapat ini benar meskipun dari kelompok yang minoritas. Itu yang harus bisa digunakan. Ada proses demokratis, betul-betul demokrasi bukan demokrasi sebatas ucapan bibir tapi dalam prakteknya, kebebasan sipil tidak dihargai, macam di Indonesia sekarang.

"Tidak, kita harus mempraktekkan demokrasi yang sesungguhnya. Itu supaya bisa ada kedamaian di antara sesama suku Papua, sebab kita merdeka untuk menjamin kesejahteraan bangsa Papua, setiap warga negara Papua. Apapun suku dan etnis termasuk para pendatang. Kalau dia warga Papua dia punya hak yang sama."

Pendidikan politik macam apa yang Bapa inginkan?

Saat ini lembaga-lembaga pendidikan resmi, dari sekolah dasar sampai universitas, dari suratkabar sampai internet, dikuasai oleh pemerintah. Mungkin kami dapat lewat pendidikan-pendidikan sederhana dari mulut ke mulut, atau lewat pertemuan-pertemuan sederhana. Mungkin lewat arisan keluarga atau ada pelatihan khusus untuk kader politik. Mereka lantas menyebarkan pada masyarakat luas dalam demonstrasi, orasi. Semua berisi pendidikan politik untuk memberikan kesadaran pada masyarakat. Kita juga membuka diri untuk pertanyaan dari masyarakat. Kebanyakan orang mau hanya komunikasi satu arah, harusnya komunikasi dua arah, sehingga ada masukan juga dari masyarakat.

Ada hal-hal yang mungkin masyarakat belum mengerti, disampaikan kepada kita sehingga kita bisa jelaskan itu dengan baik. Tetapi kalau komunikasi satu arah, otomatis tidak terjadi pendidikan masyarakat yang mendewasakan dalam politik. Itu adalah indoktrinasi. Proses pembodohan. Rakyat harus sadar dalam berpolitik dan mengambil keputusan sendiri atas nasibnya secara sadar.

Sekitar 51 persen penduduk Papua adalah pendatang. Bagaimana posisi mereka dalam perjuangan Papua Merdeka?

Bangsa Papua adalah tiap orang yang mengakui bahwa dirinya orang Papua dan mencintai bangsa Papua dan rela berkorban bagi bangsa Papua. Ini tanpa melihat suku, etnis dan bahasa. Memang banyak teman mengatakan bahwa orang Papua itu harus hitam dan keriting.

Saya pribadi melihat bahwa itu rasialis dan sangat sempit. Kalau kita mendirikan negara yang rasialis, saya pikir sulit untuk mendapatkan dukungan internasional. Apalagi di dunia yang sudah global saat ini. Saya berpikir bangsa Papua akan mirip-mirip seperti bangsa Amerika atau Brazil atau Argentina. Di dalam ada orang kulit putih dan ada kulit hitam, ada Mongolia, ada etnis Melayu atau siapa saja. Penting dia mau taat pada hukum negara Papua, mau bayar pajak, artinya rela berkorban untuk bangsa Papua. Dialah orang Papua.

Sebab dalam pengalaman saya ada orang hitam kulit, keriting rambut, tetapi malah menjadi pengkhianat sesama orang Papua. Ini jadi tanda tanya apakah dia orang Papua? Minta maaf kalau di kalangan kami, teman-teman yang pejuang, kami menyebut mereka "orang Irian." Kenapa kami bilang orang Irian? Karena Irian ini dulu, menurut Soekarno, adalah singkatan, Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Jadi saya bilang mereka ini "orang Irian."

Kata Irian sebenarnya berasal dari bahasa Biak: *Irarian.* Artinya berjemur atau terpampang sinar matahari. Nama ini diberikan oleh almarhum Frans Kaisiepo di pertemuan Malino. Untuk menyebut tanah Papua yang terletak dekat khatulistiwa dan terpampang sinar matahari.

Oleh Soekarno dipendekkan menjadi Irian dan dibuat menjadi akronim *Ikut Republik Indonesia Anti Nederland*. Alasan Kaisiepo memberi nama Irarian karena waktu itu nama *Papua* semacam nama penghinaan atau pelecehan, yang dilakukan oleh orang Ambon, Ternate, Sangir, Manado dan suku Melayu lainnya, terhadap orang Papua. Semacam di Amerika Serikat, orang kulit hitam akan sakit hati kalau dipanggil Negro atau Nigger.

Dulu kalau dipanggil Papua, di dalamnya ada penghinaan kulit hitam berdaki (hitam *badaki*), paling kotor (*pangkotor*), berbau busuk tak sedap (*babau*), tidak tahu mandi (*tra tau* mandi), pantat telanjang,

telinga berlubang (telinga *balobang*). Cara melecehkan seperti ini berasal dari orang-orang Melayu yang waktu itu menjadi tukang-tukang bangunan, guru-guru bantu dan staf administrasi yang dipakai oleh para penginjil dan pendeta Eropa untuk membantu kegiatan pekabaran injil di Tanah Papua.

Pelecehan ini membuat Frans Kaisiepo, sebagai seorang intelektual Papua pada zaman itu, tidak suka dengan nama Papua. Beliau memikirkan nama lain: Irarian.

Bangsa Papua, bagi saya, orang yang mau mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan bangsa Papua dan tanah Papua. Itulah yang orang Papua. Tanpa melihat silsilah dan keturunan. Sebab dalam pengalaman saya, selama ini ada juga teman-teman saya, yang ciri-cirinya Melanesia tidak ada pada dirinya, tetapi hatinya Papua.

Misalnya, kami merdeka terus ada teman-teman yang misalnya tidak mau meninggalkan tanah Papua, apakah mereka kami paksa, kami usir atau dibantai? Apakah kami mau mengulang sejarah Bosnia dan Herzegovina? Saya pikir itu akan mencoreng kami.

Ini konsep saya, paling tidak, akan saya sosialisasikan. Saya bagikan pada sesama saya: orang Papua. Sebab saya tahu, bahwa kami berangkat dengan konsep yang berbeda-beda dan landasan konsepsi saya kembali kepada iman, kepercayaan saya dimana Tuhan Yesus, yang saya sembah, mengajarkan saya untuk mengasihi sesama. Juga mengasihi musuh. Jadi tak mungkin saya berjuang dengan melakukan pembunuhan.

Dulu saya pikir berjuang harus membunuh dan masuk hutan. Tapi ada konflik antara membunuh dan iman pada Yesus. Tetapi kemudian dalam proses pendewasaan diri, saya menyadari kekerasan bertentangan dengan iman kepercayaan saya. Sebab di dunia ini hanya sementara saja, yang kekal di akhirat nanti. Jangan sampai saya di dunia ini sudah menderita, di akhirat saya ditolak oleh Tuhan Yesus.

Jadi saya tidak mau.

Saya berjuang Papua merdeka tetapi dalam batas–batas yang sesuai dengan ajaran iman kepercayaan saya.

Saya tidak mau melanggar itu supaya saya pun masih berkenan di mata Tuhan Raja Yesus sesembahan saya.

Bagaimana agar para pendatang, terutama asal Indonesia, dilibatkan dalam pembangunan nasionalisme Papua?

Saya mengutamakan masalah kemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Tapi prinsip ini paling tidak harus saya sosialisasikan pada orang Papua. Sebab ada juga mereka yang sakit hati, dendam kesumat, ingin membalas. Ini memang suatu proses yang berat tetapi kalau berangkat dari sisi iman, sebagai pengikut Yesus Kristus, kami harus mengasihi musuh, mengampuni, mendoakan dan memberkati mereka.

Berangkat dari titik ini, saya rasa orang Papua akan bisa memaafkan, mengampuni. Saya lihat selama ini, semarah-marahnya orang Papua, tapi kalau kita dekati dari sisi keimanan, kita duduk bertukar pikiran, sering membuka ayat-ayat Bible, mereka bisa terima, meski memang berat. Perlu waktu untuk bisa mengampuni, memaafkan, dan mungkin tinggal bersama. Ini berangkat dari penderitaan yang begitu lama, selama ini orang Papua merasa dipinggirkan di tanahnya sendiri. Kekayaan atas tanahnya dirampok, direbut dan dinikmati oleh teman-teman non Papua. Sedang orang Papua, sebagai pemiliknya, hidup miskin dan melarat. Bila dia bicara menuntut haknya, sudah ditangkap dan dipenjarakan. Ini membuat luka-luka cukup dalam bagi mereka.

Bagaimana dengan kekerasan selama ini terjadi terhadap bangsa Papua?

Memang sangat disesalkan kenapa teman-teman yang bertugas sebagai aparat pemerintah Indonesia, yang menjajah kami, terus-menerus bertindak brutal dan sewenang-wenang. Ini berlangsung sejak 1963 ketika Indonesia mendapat mandat United Nations mengelola Papua secara sementara. Saya pikir kesewenang-wenangan ini berangkat dari rasa superioritas. Mereka merasa super, merasa pintar, merasa memegang kekuasaan.

Saya melihat dari latar belakang, khususnya saudara-saudara yang berasal dari Jawa. Dari konsep budaya wayang. Dalam wayang digambarkan tokoh-tokoh Kurawa, keluarga yang jahat, pasti berkulit hitam, keriting. Perangainya kasar, bodoh, brutal, memaksakan kehendak, dan wajib dibinasakan. Secara sadar atau tidak, sudah terpatri di benak teman-teman dari budaya wayang bahwa orang kulit hitam tersebut jahat.

Ini mewarnai sikap dan perilaku mereka waktu berinteraksi dengan kami yang berasal dari Papua. Itu saya rasakan. Juga saya bertanya kepada adik-adik saya yang sekolah atau kuliah di Jawa. Mereka juga merasakan perlakuan yang sama. Perlakuan diskriminasi ras.

Bagaimana Bapa bisa membuktikan bahwa bangsa Papua tidak buruk seperti yang orang Jawa katakan ini?

Kita sama-sama mengakui bahwa kita diciptakan Tuhan. Tentu Tuhan memberikan karunia sama pada setiap bangsa. Ada orang yang pintar, ada orang yang bodoh. Ada yang cerdas, ada yang kurang. Saya kira itu sama. Kami bangsa Papua juga demikian, ada yang pintar, ada yang bodoh.

Tetapi yang saya rasakan, teman-teman Indonesia perlakukan kami di Papua semua sama: bodoh. Kalau saya belajar sejarah Indonesia, cerita-cerita perjuangan zaman Hindia Belanda, orang Belanda memperlakukan orang Indonesia, orang Jawa khususnya, sebagai *inlander*, bau, jorok, kotor, kampungan, bodoh. Rupanya dulu orang Jawa dimaki-maki oleh Belanda begitu. Sekarang setelah Indonesia merdeka, kami orang Papua yang diperlakukan begitu lagi. Gantian.

Ini sekaligus saya himbau lagi kepada orang Papua. Jika kitorang berhasil merdeka, jangan mengulang tindakan yang salah ini kepada siapa pun yang menjadi warga negara Papua. Mungkin dari segi kulit dia sedikit lebih hitam atau dari pengetahuan mungkin dia terbatas, terus kita melecehkan dia, merendahkan dia, tidak menghargai dia sebagai manusia. Berarti kami juga melakukan hal yang bodoh, yang sama, yang dilakukan oleh pemerintah saudara-saudara Indonesia terhadap kami. Jadi kitorang harus arif untuk belajar dari pengalaman waktu dijajah dan bagaimana perlakuan penjajah terhadap kami.

Papua bisa dalam waktu singkat terjadi perubahan-perubahan yang terlihat nyata bahwa orang Papua lebih maju. Contohnya, Timor Leste yang baru merdeka. Saya dapat informasi terakhir, mereka bebas utang luar negeri. Saat ikut Indonesia, mereka hidup dalam keterbelakangan yang sama dengan Indonesia, tetapi sekarang mereka sudah merdeka. Mungkin mereka masih miskin, mungkin penghasilannya kecil, tetapi mereka bebas utang luar negeri. Sehingga pemerintah punya ruang lebih

bebas untuk mengambil kebijakan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

Lain dengan Indonesia yang tertekan oleh utang luar negeri, sehingga dia dikendalikan oleh pihak–pihak asing. Seringkali teman-teman di Indonesia lontarkan istilah, "Papua merdeka sama saja dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya."

Saya jadi tertawa. Sadar tidak yang ngomong begitu? Memangnya Indonesia tidak di bawah cengkraman modal asing? Apakah Indonesia bebas? Buktinya Indonesia sendiri ada dalam cengkraman modal. Istilahnya, lepas dari Belanda, jatuh dalam cengkraman modal asing. Jadi Indonesia pun lepas dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya.

Tapi kalau Papua dikelola dengan baik, bisa seperti Timor Leste. Lepas dari Indonesia tetapi dia bisa lebih baik. Tak punya utang luar negeri. Begitu.

Bagaimana melihat perbedaan Timor Leste dengan Papua? Mengapa mereka lebih cepat dapat kemerdekaan?

Persoalan paling mendasar adalah status hukum. Sidang Umum United Nations belum pernah lebih dari dua pertiga anggotanya setuju Timor Timur integrasi dengan Indonesia. Timor Timur masih dianggap daerah bermasalah. Portugal juga terus mempermasalahkan pendudukan Indonesia di Timor Timur.

Pada 1 Desember 1976, ketika persoalan invasi Indonesia terhadap Timor Timur dibawa ke Sidang Umum United Nations, ada resolusi menolak klaim Indonesia bahwa Timor Timur sudah integrasi dengan Indonesia. Resolusi tersebut didukung 68 negara, ditentang 20 negara, dan 49 abstain. Artinya, hanya 50 persen anggota United Nations setuju Timor Timur masuk Indonesia.

Pada 28 November 1977, sekali lagi persoalan Timor Timur dibahas di Sidang Umum United Nations. Resolusi kurang lebih sama. Mereka sepakat bahwa warga Timor Timur berhak untuk menentukan nasib diri mereka sendiri (*self-determination*). Resolusi tersebut didukung 67 negara, ditentang 26, dan 47 abstain.

Indonesia dilawan terus dengan kampanye internasional Timor Timur. Pada 13 Desember 1978, sekali lagi ada resolusi. Hasilnya, 59

negara minta Indonesia meninggalkan Timor Timur, 31 setuju integrasi, dan 44 abstain. Intinya, Indonesia tak pernah bisa mendapatkan suara lebih dari dua per tiga negara-negara anggota United Nations untuk integrasi Timor Timur.

Saya melihat Timor Leste juga bisa cepat karena mereka punya bahasa nasional: Tetun. Organ-organ perjuangannya lebih solid. Mereka cepat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Tadinya mereka punya faksi-faksi tapi menyadari bahwa berbenturan sendiri membuat mereka lemah. Akhirnya mereka mau duduk bersama dan menyatukan persepsi perjuangan.

Jadi faksinya tetap berbeda, termasuk Fretilin dan UDT (União Democrática Timorense), tapi mereka punya badan perjuangan yang merangkul semua jadi satu. Kalau tidak salah namanya Conselho Nacional de Resistência Timorense. CNRT dan Xanana Gusmao merangkul semua sehingga mereka cepat bisa terus kampanye internasional.

Mereka punya diplomat ulung, antara lain, Jose Ramos-Horta dan Mari Alkatiri. Dua orang ini punya banyak bantuan lewat anak-anak muda Timor Timur, yang berangkat ke luar Indonesia, berjuang di Afrika, Amerika, Australia maupun Eropa. Kemudian dukungan dari Gereja Katolik. Pada 1989, Paus Paulus II berkunjung ke Dili, sebagai satu-satunya kepala negara yang mengunjungi Timor Timur, waktu itu provinsi Indonesia. Baik Indonesia maupun CNRT memakai kunjungan tersebut sebagai pertarungan citra internasional mereka. Titik balik Timor Timur adalah pembantaian Santa Cruz pada 1991 dimana ada wartawan internasional mengabadikan lewat kamera video. Ia digunakan dengan baik sekali oleh CNRT.

Sedang kami di Papua? Kami banyak orang Protestan dengan berbagai denominasi. Orang Katolik dan Islam jumlahnya kecil. Kami sulit berharap Paus Francis mau datang ke Jayapura.

Bahasa pemersatu juga tak ada. Dahulu memang Belanda mengajarkan bahasa Melayu, dilanjutkan oleh Indonesia. Di Papua, sedikit sekali orang Papua bisa bahasa Inggris. Di Timor Timur, anak muda bisa bahasa Portugis, yang sekeluarga dengan bahasa Inggris. Kami tak punya bahasa pemersatu yang kalau kami gunakan, pihak

lawan tidak mengerti, tidak membaca. Kami pakai bahasa Melayu. Orang Indonesia juga mengerti bahasa itu. Jadi kami tak bisa berkomunikasi secara rahasia.

Antar kami juga banyak suku dan bahasa yang berbeda. Ada setidaknya 250 bahasa asli di Papua. Tapi saya melihat ini juga merupakan kekayaan kami, sekaligus kesulitan, dengan banyaknya budaya, bahasa, adat istiadat. Ini harus kami olah menjadi satu kekuatan. Jadi kekuatan untuk mempersatukan bukan mencerai-beraikan kami.

Dengan kondisi seperti itu, bagaimana kitorang bisa percaya bahwa bangsa Papua bisa bersatu?

Perlu pendidikan kesadaran masyarakat, kepedulian pada masyarakat. Sebab tanpa itu, tidak mungkin bisa bersatu. Contohnya, sebelum ada Otonomi Khusus, masyarakat dalam berbagai bahasa yang berbeda, tapi mereka merasakan penderitaan yang sama. Akhirnya sama-sama bangkit untuk teriak Papua merdeka. Ini berarti ada kesamaan penderitaan, kesamaan nasib dan sepenanggungan. Itu memotivasi mereka bangkit untuk teriak. Cuma kami kurang waspada atau kurang cerdik dalam mengelola persatuan ini. Ia dengan mudah dimainkan oleh pihak Indonesia untuk memecah-belah bangsa Papua.

Ada sejarah peralihan kekuasaan yang berbeda antara Timor Leste dan Papua. Bagaimana melihat peralihan kekuasaan Belanda terhadap Indonesia dan Papua?

Waktu peralihan kekuasaan, dari kerajaan Belanda ke Republik Indonesia Serikat, pada Desember 1949, Papua bukan bagian dari Hindia Belanda. Kalau saya tidak salah ingat, pada tahun 1951, parlemen Belanda menyatakan Papua menjadi provinsi tersendiri dan langsung di bawah Kerajaan Belanda.

Waktu Perang Dunia II, Amerika Serikat memimpin pasukan Sekutu berperang lawan Jepang. Strategi "loncat katak" dari Jenderal Douglas MacArthur –Australia ke Papua New Guinea, Morotai, Filipina, sampai Jepang— membuat Papua jadi salah satu target pertama Amerika Serikat. Pada pertengahan 1943, Papua dibebaskan dari pendudukan Jepang lebih dulu, ketika Jawa-Sumatera masih dikuasai Jepang sampai

Jepang menyerah sesudah dibom atom pada Agustus 1945.

Papua langsung dikelola oleh pemerintah militer Amerika kemudian diserahkan kepada Belanda ketika Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang.

Jadi Amerika, dari Biak lalu meloncat ke Morotai, kemudian menyerbu ke Filipina. Sedangkan di Jawa dihampiri oleh tentara Amerika setelah tentara Amerika balik dari Filipina. Baru pasukan Sekutu, termasuk Belanda, mulai masuk ke Surabaya pada Oktober 1945. Waktu itu namanya NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Ada satu jenderal Inggris, A.W.S. Mallaby, mati dibunuh. Ini membuat Inggris hendak menghukum arek-arek Surabaya. Terjadilah pertempuran besar pada November 1945.

Papua secara politik saat itu sudah terlepas. Tak ada urusan lagi dengan Hindia Belanda. Papua bukan bagian dari Hindia Belanda karena Papua sebuah *overseas territory* yang langsung berada di bawah Kerajaan Belanda. Papua adalah daerah jajahan langsung di bawah Kerajaan Belanda. Nama resminya, Netherlands New Guinea. Indonesia merupakan bagian lain. Namanya, NICA dengan pimpinan Hubertus Johannes van Mook. Di Papua lain lagi pimpinannya, antara lain, Simon Lodewijk Johan van Waardenburg.

Bagaimana mengatur gerakan?

Di era globalisasi sekarang, orang-orang Papua, khususnya yang berjuang untuk merdeka, harus membangun jaringan juga dengan teman-teman bangsa lain. Teman-teman dari komunitas lain di luar Papua. Ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi atau pulau-pulau lain. Juga yang di luar negeri.

Mari belajar sejarah Indonesia.

Waktu Soekarno dan Mohammad Hatta menyatakan Indonesia merdeka, serikat buruh Australia ikut mendukung dengan memboikot rencana Belanda memindahkan sekitar 2.000 karyawan mereka, termasuk sekelompok tahanan politik Indonesia, yang sementara ditaruh maupun dipenjara di Australia. Para tahanan politik –kebanyakan orang komunis yang dipenjara Belanda—hendak dipindahkan ke kamp konsentrasi di Netherlands New Guinea. Kapal, barang dan jasa Belanda

juga diboikot dengan tidak membiarkan kapal-kapal Belanda pergi dari pelabuhan Australia.

Waktu Timor Leste mau merdeka juga dibantu serikat buruh dan aktivis Australia. Mereka melakukan berbagai aksi untuk menekan pemerintah Australia agar membantu perjuangan Timor Leste.

Selama ini perjuangan Papua masih bersifat kedaerahan. Hanya melibatkan orang Papua. Tidak perlu dengan komunitas lain. Jadi orang Papua hanya sibuk mengurus kepentingannya sendiri. Dia meneriakkan penderitaannya. Dia mengekspresikan itu dengan cara-cara yang masih mengangkat tarian daerah, budaya tradisional, sehingga menutup akses teman-teman dari komunitas lain untuk bergabung.

Padahal teman-teman dari komunitas lain: orang Jawa, Madura, Makasar, Minahasa, Batak, Banjar atau siapapun dia, yang menghargai kemanusiaan, yang punya empati, mereka ingin terlibat. Namun dengan aksi yang terlalu bersifat budaya Melanesia, bersifat hanya orang Papua, ciri khas orang Papua, akhirnya merupakan tembok yang membatasi mereka untuk bisa ambil bagian.

Padahal kitorang tahu bahwa Timor Leste merdeka juga banyak dari teman-teman komunitas non-Timor Leste. Macam George Aditjondro, yang punya kepedulian, simpati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kejujuran, turut terlibat. Jangan salah, George Aditjondro bekerja lebih dulu soal Papua dari Timor Leste.

Mereka juga tidak setuju dengan perlakuan pemerintah Indonesia terhadap rakyat Timor Leste. Mereka juga turut menyuarakan, turut berjuang mengadakan seminar-seminar. Mereka juga yang menyelamatkan aktivis Timor Leste, yang waktu itu dikejar-kejar tentara atau intelijen. Mereka bantu menyelamatkan. George Aditjondro dan Arief Budiman, dosen-dosen di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, ikut membantu mahasiswa Timor Leste merancang dan melompati pagar kedutaan Amerika Serikat di Jakarta pada November 1994 ketika Presiden Soeharto jadi tuan rumah Asia Pacific Economic Cooperation. Aksi lompat pagar tersebut mendapat liputan media internasional. Mereka menggeser agenda APEC, dari sekedar bicara soal kerjasama ekonomi menjadi persoalan Timor Leste.

Jadi itu karena ada hubungan individual yang baik, hubungan

psikologi dengan teman-teman aktivis dari Timor-Timor, sehingga terjalin keakraban, sebab untuk melindungi pun mempertaruhkan nyawa juga.

Kitorang di Papua juga harus belajar untuk mengubah pola-pola perjuangan. Misalnya, kalau di Jakarta saat ini ada demonstrasi buruh menuntut perbaikan gaji, kitorang di Papua juga harus turun jalan mendukung apa yang teman-teman buruh di Jakarta suarakan. Ada ketidakadilan pada perempuan di Jakarta kita di Papua juga harus ikut aksi itu. Menyatakan solidaritas! Sehingga pada saat kitorang di Papua punya masalah dan kitorang turun demo, masalah itu kitong bagikan kepada teman-teman di Jawa. Mungkin di Malaysia, di Australia. Mereka pun akan ikut mendukung aksi yang kita lakukan di Papua. Mereka akan menekan pemerintah mereka supaya memperhatikan aspirasi yang diperjuangkan oleh orang-orang di Papua.

Dengan ikut demonstrasi buruh, kesetaraan hak perempuan, kitorang juga belajar menghormati hak buruh, menghormati hak perempuan. Jadi manfaat banyak sekali. Jangan kita kalau Papua merdeka, kitorang takkan punya masalah perburuhan atau diskriminasi perempuan.

Bagaimana konsep perjuangan damai Bapa?

Selama kitorang menuntut kitorang punya hak mungkin kitorang dianiaya oleh polisi atau militer Indonesia. Tapi kitorang tidak membalas dengan hal sama. Kitorang lebih menyatakan apa yang menjadi kitorang punya keinginan atau aspirasi secara damai. Sekalipun kitorang dipukul atau dianiaya, kitorang tidak membalas. Kita memaafkan dan mengampuni.

Saya melihat video teman-teman Afrika-Amerika tahun 1960-an, saat mereka berjuang untuk menghilangkan rasialisme di Amerika Serikat. Ada seseorang orasi. Dia dipukul oleh orang kulit putih. Polisi datang dan mengatakan apakah dia mau supaya diproses? Memperkarakan orang kulit putih yang sudah memukul dia. Dia katakan saya datang di sini bukan untuk membuat masalah. Saya datang kemari untuk menunjukkan kasih sayang. Me-wujud-nyata-kan kasih sayang. Dia tidak mau mengadukan mereka. Ya memaafkan saja. Tapi

dengan kata-kata dia ini, sangat terekam di hati pemuda kulit putih, yang memukul dia. Sampai pemuda kulit putih tersebut tidak bisa tenang dalam hidupnya.

Dia berusaha mencari si korban. Akhirnya dia bisa ketemu, menemui pemuda kulit hitam itu di kantornya. Dia mengakui, "Saya yang dulu memukul kamu dan saya datang untuk minta maaf."

Pemuda kulit hitam yang menjadi korban itu mengatakan, "Saya sudah memaafkan kamu dan saya tidak menyimpan itu. Baru hari ini, saya tahu bahwa Anda yang memukul saya. Bagi saya tidak jadi masalah karena saya datang untuk menyatakan kasih sayang."

Saya lihat ini cukup bagus. Dapat dijadikan pelajaran untuk orang Papua juga dalam menuntut haknya. Untuk merdeka. Jadi kita boleh bicara terus terang, secara berani, pada pemerintah Indonesia. Kepada aparat, kepada teman-teman kita non Papua. Bahwa kami ingin merdeka. Dan itu hak kami, tapi kita hanya sebatas berbicara, tanpa melakukan tindakan-tindakan kekerasan untuk membalas. Jadi kita lebih mengutamakan keinginan secara damai. Dengan kasih, tanpa niat untuk melakukan pembalasan, untuk melakukan kekerasan atau tidakan brutal lainnya.

Bagaimana aksi damai itu lebih jauh?

Dalam aksi damai itu, antara lain, kita siap untuk mengorbankan diri. Kenapa saya katakan demikian? Tanpa kita siap untuk mengorbankan diri pun, kitorang sudah dikorbankan, diperlakukan semena-mena. Apa salahnya sekali lagi, kitorang mengorbankan diri? Artinya menyediakan diri untuk dianiaya, diperlakukan semena-mena? Tapi ini depan umum, bisa dilihat banyak orang, ada teman-teman dari media massa, yang bisa meliput itu.

Sebab tanpa kita berbuat demikian juga, kita sudah diperlakukan semena–mena dan saat itu tidak diliput media. Hak-hak kita dirampas, tapi tak diliput, karena keadaannya berlangsung lama, kadang-kadang di tempat-tempat terpencil. Kita diperlakukan semena-mena oleh aparat dan itu tidak ada nilai publikasi atau nilai dokumentasi untuk kepentingan bersama. Baiknya, kita bersama secara sadar, merelakan diri dianiaya di depan umum.

Ini punya nilai yang lebih besar. Tentu yang menganiaya juga sebagian manusia. Dia pasti bertentangan dengan suara hati nuraninya. Jadi kita tetap perjuangkan perjuangan dengan damai.

Banyak orang bilang dengan damai, tidak dapat apa-apa. Tetapi bukti sudah nyata. Mahatma Gandhi, berjuang dengan damai, akhirnya menundukkan Kerajaan Inggris. India masih merdeka sampai sekarang. Di Filipina, juga dengan *people power,* dengan damai mereka menantang Presiden Marcos. Marcos punya kekuatan buat menggerakkan tentara dan polisi. Tapi akhirnya Marcos kalah. Presiden Soeharto jatuh juga. Hanya dengan perjuangan damai. Aksi mahasiswa duduki gedung DPR dengan damai, tanpa kekerasan. Mereka bertahan satu minggu kira-kira. Akhirnya Soeharto menyerah dan mundur. Ini cara-cara perjuangan damai yang dapat kita ambil dan gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi Papua. Kita tak menjiplak mentah-mentah, tapi jiwa perjuangan kita ambil. Kemudian kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang saat ini ada di Papua.

Bagaimana peluang perjuangannya?

Saya melihat situasi saat ini di Indonesia, pengakuan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, cuma ucapan bibir mulut. Banyak pejabat Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bicara soal Islam yang moderat, toleransi antar iman, kerukunan beragama dan seterusnya. Keadaan nyata di lapangan, banyak terjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama, antara lain, hak memilih agamanya maupun tidak memilih agama, dan bagaimana cara dia beribadah, hak mendirikan rumah ibadah, hak untuk berkumpul, berserikat atau melakukan ibadah secara damai. Saat ini, mungkin masalah kebebasan beragama, terhadap minoritas Ahmadiyah, Bahai, Kristen, Syiah maupun agama-agama leluhur di Indonesia, adalah persoalan hak asasi manusia paling banyak disorot media.

Lebih dari 20 negara –Amerika Serikat, Australia, Jepang, Jerman, Mexico, Qatar, Uni Eropa—mempertanyakan tanggungjawab pemerintah Indonesia saat Universal Periodic Review terhadap catatan hak asasi manusia dalam sidang UN Human Rights Council di Geneva tahun 2012. Ada aturan-aturan yang diskriminatif terhadap

minoritas agama –termasuk aturan soal penodaan agama serta aturan membangun rumah ibadah—membuat kelompok-kelompok intoleran main hakim sendiri di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Saya lihat di televisi Indonesia soal Front Pembela Islam di Jawa, sering menyerang golongan minoritas atas nama agama.

Kalau orang Papua tidak belajar dari situasi sekarang di Indonesia, artinya kitorang juga akan jadi bom waktu di Papua. Kitorang sendiri dari suku yang begitu banyak, ada sekitar 250 sampai 300 etnik dan bahasa, di keluarga besar Melanesia di Tanah Papua.

Ada sub-etnik, sub-sub-etnik, kemudian bahasa berbeda, tradisi budaya berbeda, belum lagi agama. Kemudian pandangan politik, seperti faksi-faksi dalam perjuangan, belum ditambah lagi dengan konsep-konsep memecah-belah persatuan, *divide at impera*, dipraktekkan secara sistematik oleh pemerintah Indonesia dengan pemekaran–pemekaran wilayah. Sudah ada dewan adat dibuat lagi lembaga adat.

Baru-baru ini dibikin raja-raja lagi. Jadi mau diangkat raja-raja tiap suku di Papua. Ini seperti suatu kesengajaan oleh pemerintah. Ini dibuat secara sistematis untuk meninggalkan bom-bom waktu bila suatu saat dirasakan sudah tepat untuk digunakan. Ini akan dimainkan untuk mengacau-balaukan kita sesama orang Papua lagi.

Kitorang harus waspada terhadap masalah di Papua yang cukup komplek. Sebelum kita berdiri menjadi suatu bangsa tersendiri, yang diakui dunia dan berdaulat, kitorang harus banyak belajar, bercermin dari apa yang sudah terjadi dari bangsa Indonesia.

Pelanggaran terhadap kebebasan beragama itu kita rasakan bahwa itu tidak memenuhi nilai–nilai kemanusiaan, keadilan, kejujuran ataupun nilai–nilai agama. Kitorang harus waspadai dan mempunyai sikap untuk menolak hal-hal yang demikian. Kita lebih mengutamakan kebersamaan. Kita harus menghormati kaum minoritas agama maupun etnik. Kitorang harus melihat kebersamaan penderitaan yang dirasakan oleh orang Papua. Jadi apa yang dialami oleh orang–orang di Nabire atau di Wamena itu juga merupakan penderitaan dari orang-orang yang ada di Jayapura, Biak, Sorong, Manokwari, Fakfak, Merauke, Pegunungan Bintang. Jadi satu orang Papua teraniaya, itu sama saja dengan sakitnya seluruh orang Papua.

Jadi kitorang tidak terkotak-kotak. Penderitaan satu orang Papua, kitong rasakan sebagai penderitaan semua orang Papua. Kitorang bisa bersatu. Persatuan ini karena kesamaan penderitaan yang kitorang rasakan.

PERJALANAN DALAM GAMBAR



Filep Karma saat berusia 3 tahun.
©Dokumentasi Keluarga.



Keluarga Filep Karma. Bagian atas, kiri-kanan: Magriet Karma,
Penina Karma, Filep Karma, Ratu Karel Lina, Sari Karma.
Bagian bawah: Andreas Karma, Eklefina Noriwari. ©Dokumentasi Keluarga.



Filep Karma bersama istrinya orang Melayu-Jawa, Ratu Karel Lina.
©Dokumentasi Keluarga.



Filep Karma dan istrinya Ratu Karel Lina menikah pada Februari 1986 di Jakarta. ©Dokumentasi Keluarga.



Filep Karma bersama istri dan anak pertama saat wisuda S1 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS di Solo, tahun 1987. ©Dokumentasi Keluarga.



Filep Karma bersama kedua putrinya, Audryne dan Andrefina di Jayapura, tahun 1990. ©Dokumentasi Keluarga.



Keluarga Filep Karma saat Natal tahun 1993 di Jayapura. ©Dokumentasi Keluarga.



Filep Karma bersama teman-temannya saat sekolah di Asian Institute of Management, Manila, Filipina, tahun 1997. ©Dokumentasi Keluarga.



Pada tanggal 2-6 Juli 1998, bendera Bintang Kejora dikibarkan di atas Tower Air setinggi 35 meter dekat Pelabuhan Laut Biak, Papua. ©Eben Kirksey.



Kapal TNI-AL yang diduga mengangkut orang yang telah ditembak mati dan dibuang ke laut dekat Biak, Juli 1998. ©Eben Kirksey.



Saat sidang kasus Biak Berdarah tahun 1998 di Pengadilan Biak.
©Dokumentasi Keluarga.



Filep Karma bersama kedua orang tuanya, Eklefina Noriwari dan Andreas Karma di penjara Abepura-Jayapura, tahun 2005. ©Audryne Karma.



Filep Karma di penjara Abepura-Jayapura, tahun 2007. ©Eben Kirksey.



Filep Karma bersama teman seperjuangannya, tahanan politik Yusak Pakage di penjara Abepura-Jayapura, tahun 2007. ©Eben Kirksey.



Program International Committee of the Red Cross: Filep Karma dipertemukan dengan kedua anaknya yang saat itu sedang kuliah di Bandung.
Lokasi penjara Abepura-Jayapura, tahun 2007. ©Dokumentasi Keluarga.



Filep Karma bersama dengan beberapa mahasiswa dan aktivis di Jayapura. Mereka membantu mencari dana pengobatan operasi agar Filep dapat berobat di Jakarta. ©Dokumentasi Keluarga.



Filep Karma menahan sakitnya dengan menaikkan kaki di penjara Abepura, Agustus 2009. Ia kena gangguan prostat. ©Hendrik Yance Udam.



Filep Karma saat menerima pemeriksaan rutin oleh salah seorang perawat di RS Cikini, Jakarta, sebelum operasi pada Juli 2010. ©Andreas Harsono.



Filep Karma bersama ibunya, Eklefina Noriwari di RS Cikini, Jakarta, Juli 2010, saat Filep Karma akan menjalani operasi prostat. ©Andreas Harsono.



Filep Karma bersama kedua putrinya tahun 2010 di Bandara Soekarno Hatta, saat akan mengantarkan Filep pulang kembali ke Jayapura setelah operasi prostat di RS Cikini, Jakarta. ©Dokumentasi Keluarga.



Filep Karma dan adiknya, Kostan Karma, di Jayapura, tahun 2011. ©Dokumentasi Keluarga.



Filep Karma bersama adiknya Magriet Karma saat di penjara Abepura-Jayapura, tahun 2011. Magriet Karma tinggal di Jayapura dan sering mengunjungi Filep di penjara. ©Dokumentasi Keluarga.



Ulang tahun Filep Karma ke-54 pada 14 Agustus 2013 bersama keluarga dan kawan-kawan. ©Dokumentasi Keluarga.



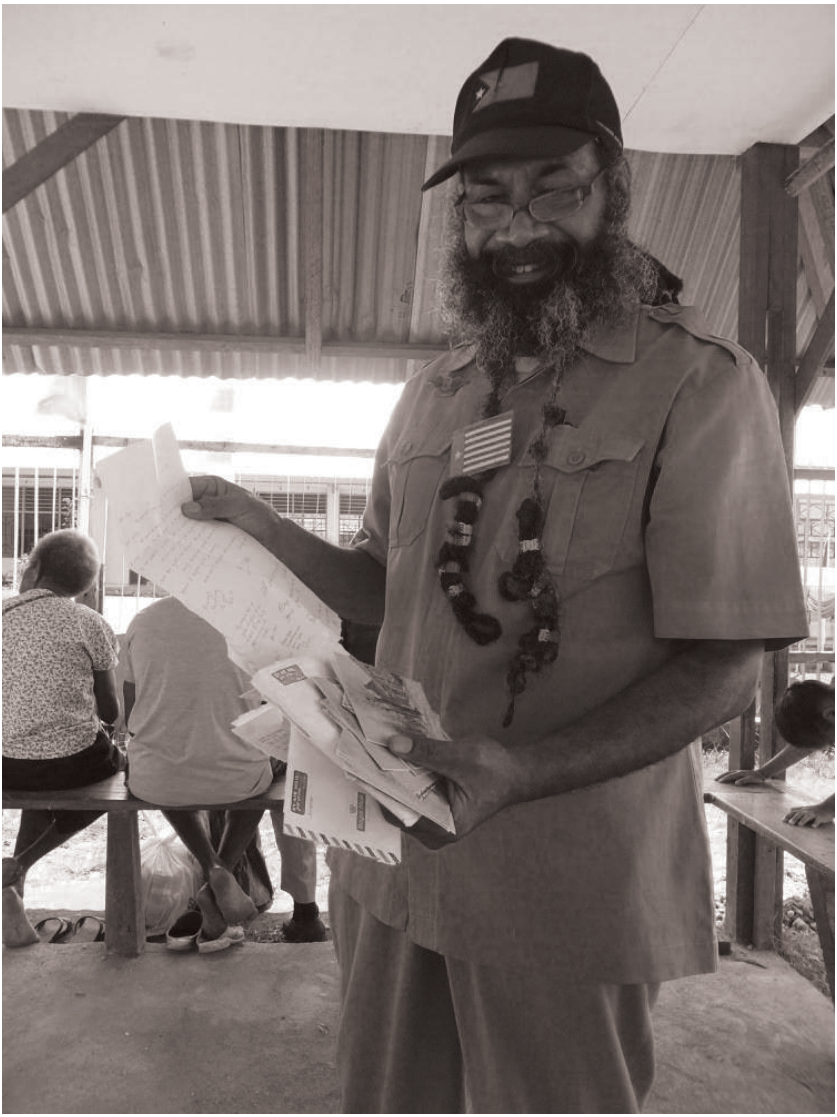
Ulang tahun Filep Karma tahun 2013 bersama anak keduanya Andrefina dan keponakan-keponakan. ©Dokumentasi Keluarga.



Demonstrasi "Free Filep Karma" di depan Gedung Putih, Washington DC tahun 2011. ©Audryne Karma.



Salah satu relawan yang ikut demonstrasi "Free Filep Karma" di depan Gedung Putih tahun 2011. ©Audryne Karma.



Filep Karma terlihat senang menerima surat-surat dukungan yang rata-rata berasal dari Amerika dan beberapa negara di Eropa. ©Dokumentasi Keluarga.



Filep Karma mogok makan dan duduk memohon keadilan Tuhan, 19 Agustus 2014.
©Victor Yeimo.



Dari Penjara Ke Penjara

FILEP KARMA termasuk orang Papua yang sering masuk penjara, pindah dari satu penjara ke penjara lain. Saat militer dan polisi Indonesia menyerang Tower Air Biak pada 6 Juli 1998, Filep Karma terluka di kaki oleh tembakan peluru karet. Polisi menangkap 150 orang. Hanya 19 orang diadili termasuk Filep Karma.

Filep Karma ditahan di kantor polisi Biak dari 6 Juli sampai 3 Oktober 1998. Pada 25 Januari 1999, pengadilan negeri Biak menyatakan dia bersalah dengan tuduhan makar karena memimpin aksi dan pidato. Pengadilan Biak jatuhkan hukuman penjara 6,5 tahun. Karma ajukan banding. Dia dipenjara di Biak dan belakangan dipindah ke penjara Abepura. Dia bebas demi hukum pada 20 November 1999. Filep Karma kembali bekerja sebagai pegawai negeri untuk pemerintahan provinsi Papua.

Pada 1 Desember 2004, sesudah yakin program otonomi Papua disabot oleh militer dan intelijen Indonesia, antara lain lewat pemecahan Papua dalam banyak kabupaten, Karma mengorganisir sebuah upacara peringatan 1 Desember 2004 —untuk menandakan ulang tahun kedaulatan Papua pada 1 Desember 1961. Peristiwa ini dihadiri ratusan pelajar dan mahasiswa Papua. Mereka juga menyerukan penolakan terhadap otonomi yang dinilai gagal.

Dia ditangkap lagi, mula-mula ditahan di kantor polisi Jayapura, diadili di pengadilan negeri Abepura. Pada 27 Oktober 2005, pengadilan

negeri Abepura menghukum Karma 15 tahun penjara dengan vonis makar. Rekannya, Yusak Pakage, yang ikut merancang aksi, divonis 10 tahun penjara. Mereka dipenjara di lembaga pemasyarakatan Abepura. Kini Filep Karma mungkin satu dari pemimpin Papua yang paling populer, antara lain, karena berada di balik jeruji penjara serta konsisten menolak remisi setiap tahun. Karma berpendapat menerima remisi berarti tersirat mengakui dia bersalah.

Dari 2005 sampai 2010, dia sudah menerima sekitar 20 ribuan surat di penjara dari berbagai orang di berbagai negara. Karma berpendapat dia tak melakukan kekerasan. Dia seharusnya dibebaskan sesuai keputusan UN Working Group on Arbitrary Detention, New York. Dia diterima di kalangan orang Gunung maupun orang Pantai di Papua.

Bagaimana pengalaman Bapa di penjara-penjara Indonesia?

Kami tahanan politik masih ada perlakuan buruk, antara lain, kesempatan berobat masih sulit. Untuk berobat, walau sudah jelas sakit, perlu waktu. Harus ada negosiasi. Ada tarik-ulur untuk seseorang bisa berobat. Ada kesan tapol yang sakit mendapat penanganan terlambat.

Pada umumnya, tapol sekarang tidak disiksa dengan kejam, tidak dicambuk dengan kawat duri. Mereka juga tidak dipindah ke tahanan militer, yang terjadi pada zaman Soekarno dan Soeharto. Pada zaman Soekarno, sesudah dia kasih perintah Tiga Komando Rakyat (Trikora) Desember 1961, tapol Papua diperlakukan semena-mena dan sangat kejam.

Di era reformasi sekarang, jadi tahanan politik lebih terhormat dibanding tahanan kriminal. Itu yang saya rasakan. Tapi banyak orang Papua masih berpikir menjadi tahanan politik, masih seperti era Soekarno dan Soeharto. Mereka masih ketakutan, trauma. Ini memang sudah tertanam dibenak orang Papua.

Teman-teman tahanan kriminal, mereka segan kalau sama tahanan politik. Mereka tahu bahwa tahanan politik, bukan kepentingan dia pribadi. Dia masuk tapi untuk kepentingan banyak orang. Hingga, secara otomatis, ada penghargaan yang diberikan oleh tahanan maupun narapidana kriminal. Jadi, tak perlu takut jadi seorang tahanan politik.

Saya himbau, untuk teman-teman aktivis atau masyarakat yang

ingin bicara tentang haknya sebagai rakyat bangsa Papua, jangan takut-takut atau segan-segan menjadi tahanan politik. Anda masuk ke dalam, Anda punya status tersendiri. Tahanan politik di era reformasi, dapat perhatian yang cukup besar dari teman–teman aktivis pergerakan, LSM dalam maupun luar negeri.

Saya bisa berobat di Jakarta, dua kali, Agustus 2010 dan September 2012, karena bantuan teman-teman, baik di Jawa, Papua, dan dari berbagai negara. Mereka ikut membantu pendanaan dan ikut mengawasi proses saya sampai bisa ada di rumah sakit. Meski ada tarik ulur dalam proses administrasi dan sebagainya.

Saya sampaikan bahwa jangan takut jadi tahanan politik untuk cita-cita Papua merdeka. Yang kitorang perjuangkan harus ada harga yang dibayar tapi harga itu tidak seberat atau semahal zaman Soekarno maupun Soeharto. Jadi, era reformasi ini, kita tahanan politik sudah lebih baik kondisinya dibanding dulu.

Di era reformasi, masih ada polisi dan tentara sewenang-wenang. Tapi ini jangan kitorang ketakutan atau terkungkung dalam ketakutan. Kita bebaskan diri dari rasa ketakutan itu dan menyampaikan apa yang sebenarnya ada di hati nurani kita.

Contohnya, Boaz Solossa[5] setelah isi gol, lalu keluarkan bendera negaranya.

"Kitorang orang Papua, Boaz!"

Apa salahnya, kalau Boaz angkat baju, di dalamnya ada gambar bendera Papua. Itu juga bagian dari pernyataan jati diri dia. Sebagai *striker* atau pencetak gol yang subur, tidak mungkin dia akan disingkirkan. Dia sangat dibutuhkan. Mereka tidak akan menyingkirkan dia, karena dia sangat dibutuhkan di dalam kesebelasan Indonesia.

Mungkin waktu pertama orang kaget, "Kenapa dia begitu?"

Tapi kalau itu terus-menerus dia lakukan, lama-lama orang akan menganggap hal ini biasa. Ini efeknya sangat besar bagi masyarakat. Itu menumbuhkan kepercayaan diri, kebanggaan akan nasionalisme Papua. Begitu juga mungkin atlet-atlet di bidang lain atau juga masyarakat waktu nonton Persipura main di Mandala. Apa salahnya mengibarkan bendera saat Persipura isi gol?

Kalau polisi mau tangkap. Tak usah takut, kita hadapi saja. Jadi tidak

5 Boaz Theofilius Erwin Solossa striker Tim Nasional Indonesia asal Sorong, Papua

usah melarikan diri, karena melarikan diri itu jadi alasan untuk mereka pukul, tendang, dan tembak. Tapi duduk saja, tunggu dorang datang. "Okay Bapak, saya siap ditangkap, tapi saya tidak memukul orang, tak merusak barang. Saya hanya mengibarkan bendera untuk menyatakan identitas saya sebagai bangsa Papua."

Jadi ikut saja ke kantor polisi dan diperiksa dan ditanya, "Kamu mau merdeka?"

"Memang betul kami mau merdeka. Tapi kami berjuang dengan damai, tak memukul orang, tak merusak fasilitas lapangan atau mencaci-maki, tapi kami bicara aspirasi yang ada dalam hati."

Indonesia akan kelihatan dungu bila terus-menerus kasih penjara orang yang aksi damai dengan bendera Papua.

Itu antara lain bentuk-bentuk yang bisa dibuat. Atau mungkin misalnya, sakit sampai sudah napas-napas terakhir. Sudah keluarga bawa turun depan kantor polisi. Lari dengan bendera Papua. Masuk ke dalam Polres kemudian berteriak merdeka. Jatuh mati depan pos polisi. Itu polisi repot akan menjawab pertanyaan yang masuk, "Kenapa ada orang mati di depan pos penjagaan?"

Itu bentuk-bentuk perjuangan damai, antara lain, yang bisa kitorang lakukan. Kemudian bisa juga dengan setiap hari ada saja yang mengibarkan bendera. Jadi, dua atau tiga orang, atau sendiri datang ke DPR Papua, kibarkan bendera dan nyatakan mau merdeka. Kalau polisi datang tangkap ikut saja. Tidak usah melawan, ikut ke kantor polisi, diperiksa diproses, supaya lama-lama penjara–penjara di Papua itu penuh dengan tahanan politik.

Kalau penjara di Papua penuh dengan tahanan politik ini akan menjadi sesuatu yang sangat memalukan bagi pemerintah Indonesia.

Sebab Indonesia kampanye bahwa ia negara demokrasi, dibuktikan pemilihan presiden yang langsung dan ada bukti juga pemilihan gubernur. Kita baru saksikan beberapa hari lalu persaingan antara dua kandidat calon gubernur Papua dimana dimenangkan oleh seseorang yang lebih merakyat.

Jadi kitorang bisa tunjukkan pada dunia bahwa negera Indonesia yang mengaku negara demokrasi: ada kebebasan berbicara, kebebasan mengemukakan pendapat, tetapi itu hanya berlaku di wilayah Indonesia

lain. Tidak berlaku, khususnya, di tanah Papua, terbukti: kitorang ini, hanya sekedar mengibarkan bendera, sekedar berteriak merdeka, dan berbicara bahwa kami bangsa Papua ingin merdeka, tapi kita ditangkap, diproses dengan pasal 110 dan 106 KUHP dan dinyatakan melakukan makar dan ini menjadi *treatment* terhadap bangsa Papua dalam perjuangan ini.

Bagaimana dukungan pemerintah Indonesia dalam hal pengobatan Bapa?

Proses pengobatan saya, lebih banyak didukung teman-teman aktivis di Papua maupun Jawa, keluarga di Papua, juga di luar Indonesia, antara lain, Amnesty International, Barisan untuk Kebenaran, Human Rights Watch, Freedom Now, dan lain-lainnya. Juga dari gereja pimpinan pendeta Socratez Yoman dan ada juga pribadi-pribadi. Mereka dengan sukarela kampanye, menyumbangkan uang untuk saya bisa berobat ke Jakarta. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dari teman-teman aktivis, LSM, gereja.

Pihak pemerintah mungkin hanya memberikan izin untuk berobat ke Jakarta. Meski dengan tenggat waktu cukup lama, baru kami peroleh dan juga tentang tawar-menawar mengenai biaya pengobatan dan transportasi. Dari sisi hukum, sebenarnya ini tanggungjawab negara, tanggungjawab pemerintah sebagai penyelenggara negara dan yang menahan kami. Tapi pemerintah Indonesia lepas tangan terhadap biaya. Malah petugas penjara pun masih disuruh saya yang menanggung. Tetapi karena bertahan tidak mau, akhirnya, petugas ditanggung oleh pihak lapas sendiri. Tetapi petugas polisi di saat terakhir mau berangkat, ditodong pada kami, pihak keluarga, untuk menanggung. Sesampainya di Jakarta, petugas dari penjara Abepura pergi begitu saja, mau pulang ke kampung di Jawa. Kami terpaksa menanggung ongkos petugas lain, pesawat dari Jayapura ke Jakarta. Jadi kami tanggung biaya satu polisi dan satu petugas lembaga.

Ini menjadi pelajaran untuk teman-teman yang sudah jadi tahanan politik atau pun yang mungkin akan jadi tahanan politik. Di kala sakit dan mau berobat ingat bahwa kita ini seharusnya menjadi tanggungjawab negara. Tapi dalam praktik, biasanya, mereka berusaha

untuk melepaskan tanggungjawab ini.

Bagaimana nasib tahanan–tahanan politik Papua di Papua saat ini?

Teman–teman tahanan politik yang lain ada yang sakit. Ada yang kena stroke dua orang di Nabire. Ada yang sakit ingatan di Wamena. Banyak yang sakit pusing karena siksaan dalam masa penahanan dan tidak diobati dengan sempurna. Tidak ada itikad baik dari pemerintah untuk membebaskan, setidaknya mengobati tahanan politik.

Kalau melihat pengalaman di penjara Abepura, ada mantan pejabat dihukum korupsi dan dipenjara. Setelah sakit stroke, dia dibebaskan dengan alasan sakit. Tapi untuk tahanan politik di Papua, yang sakit ingatan maupun stroke, masih dalam tahanan.

Cuma saya dapat informasi, ada tahanan yang sakit ingatan di penjara Wamena, menurut petugas di Abepura, dia dipulangkan sementara ke keluarga anaknya di Wamena. Namun dia meninggal di rumah anaknya di Wamena.

Bagaimana dukungan terhadap perjuangan Bapa dari negara-negara lain?

Saya melihat secara politik dukungan langsung dari negara tidak ada. Negara yang mendukung Papua merdeka mungkin hanya Vanuatu. Tapi kalau dari sisi kemanusiaan, banyak yang menyuarakan. Cuma kadang mereka terbentur antara kepentingan negara mereka, kepentingan ekonomi, dengan kemauan membantu orang Papua.

Sebagai contoh, Amerika Serikat, di satu sisi melalui anggota Kongres, dua kali minta saya dibebaskan. Pada Agustus 2008, ada 40 anggota Kongres, dengan sponsor Patrick J. Kennedy dari Vermont, mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta saya dibebaskan.

Pada Agustus 2011, 26 anggota Kongres Amerika Serikat, pimpinan Joseph Pitts dan James Moran, juga menyurati Presiden Yudhoyono untuk meminta saya dan teman-teman tahanan politik dibebaskan. Tapi itu bersifat pribadi ya. Mereka kumpulan anggota Kongres, bukan suara resmi dari Amerika Serikat.

Pada 2011, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menyuarakan tentang perlakuan yang manusiawi di Papua, menghentikan tindak kekerasan serta melakukan dialog dengan bangsa Papua, baru sebatas itu saja. Jerman pada 2012 juga minta Indonesia membebaskan tahanan politik dalam acara Universal Periodic Review di Jeneva. Kalau dari sisi kemanusiaan, banyak teman LSM di luar negeri maupun di Jawa, Sumatera, dan tempat-tempat lain, yang menyatakan simpati.

Kalau dari pribadi-pribadi banyak saya mendapatkan surat-surat pernyataan simpati. Dari sisi kemanusiaan, mereka mendoakan. Mereka bilang jangan putus asa, bertahan dan mereka juga ikut mendoakan. Mereka sedang memperjuangkan untuk saya dibebaskan. Saya mendapat surat-surat setiap minggu. Kalau saya kumpulkan semua, sudah ada 20 ribu lebih surat yang masuk.

Sejak kapan surat itu?

Pada Desember 2004, saya baru masuk tahanan. Kemudian kampanye-kampanye mulai muncul. Mulai dengan Natalan 2005. Itu sudah mulai surat-surat berdatangan, jadi tahun 2012 ini saja, surat yang sempat didata sudah 6 ribuan lebih. Itu baru tahun 2011, 2012. Jadi kalau ditambahkan dengan yang dari 2005 sampai 2010 sudah sekitar 20 ribuan surat saya terima.

Surat diterima Bapa langsung?

Surat itu dikirim lewat teman-teman LSM di Jayapura, lalu mereka datang besuk, mereka antarkan. Tetapi ada juga dari kantor pos. Itu dikirim sampai satu karung begitu. Jadi kantor pos langsung mengantar ke lembaga pemasyarakatan dan diberikan petugas. Karena alasan keamanan, mereka buka disortir semua.

Saya tidak tahu kalau misalnya teman-teman mengirim kenang-kenangan atau apa, mungkin diambil. Saya pernah lihat juga ternyata kartu-kartu pos buat kami tahanan politik maupun senior saya, yang lebih dahulu, ternyata ada di meja-meja petugas, di laci-lacinya. Berarti ini tidak disampaikan. Juga pernah ada petugas, yang saya tegur, karena saya lihat mereka melepas-lepas perangko-perangkonya.

"Bapak sebagai pejabat negera, kenapa mencuri? Itu bukan hak

Bapak, itu hak kami. Ok, Bapak dengan alasan keamanan, boleh melihat, mensortir, tetapi kalau Bapak mencuri? Beritahu dapat kiriman ini, tetapi ini terlarang. Jadi ini kami tahan dan harus ada berita acara. Tapi ini Bapak dengan seenaknya mengambil perangko-perangkonya."

"Lho, kami ini apa? Kenapa tidak dihargai hak kami? Itu kan ditujukan kepada kami bukan kepada Bapak?"

Jadi itu yang saya lihat. Ada juga surat-surat yang tercecer tidak disampaikan.

Kira-kira berapa negara yang kirim surat-surat itu?

Saya sempat melihat dan mendapat dari Kanada, Amerika Serikat dari beberapa negara bagian, Perancis, Jerman, Polandia, Inggris dan seterusnya. Kanada itu dari beberapa anak-anak sekolah, yang level taman kanak-kanak.

Jadi rupanya mereka dari taman kanak-kanak pun sudah diajarkan tentang hak asasi manusia, kepedulian terhadap orang–orang yang diperlakukan tak adil sehingga itu diajarkan oleh guru-gurunya. Mereka lucu-lucu gambarnya. Mereka bilang, "Filep jangan takut. Kami bersama engkau, tetap semangat, kami mendoakan engkau, engkau tidak seorang diri." Itu dikatakan anak-anak kecil dari level taman kanak-kanak. Dari gambar-gambarnya saya bisa melihat ini anak–anak kecil yang gambar.

Masih ingat gambar apa?

Ada gambar bunga matahari, ada satu juga menggambar jendela terali ada manusia terus dibilang, "Filep ini engkau." Lucu-lucu. Kemudian sampai level SD, SMP, SMA, juga ada mahasiswa dari universitas dan juga sampai ada profesor, ada doktor yang mengirim surat dan mengatakan simpati dan dukungan.

Kalau ini bisa sampai ke mereka, apa yang ingin Bapa katakan setelah menerima surat ini?

Saya sangat senang, saya terharu akan kepedulian dari teman-teman di luar negeri. Di mana saja kalian berada, saya mengucapkan terima kasih atas nama saya pribadi, juga teman-teman tahanan politik dan rakyat

Papua kami berterimakasih untuk dukungan pribadi-pribadi yang Anda berikan, dari anak-anak kecil di tingkatan taman kanak-kanak sampai dengan profesor-profesor, doktor, guru-guru besar, juga ada orang-orang yang sudah sangat tua tetapi mereka punya kepedulian, mereka mengirim surat.

Jadi dari Amerika, Kanada, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Singapura, Afrika, ada beberapa negara di Afrika, Eropa, Inggris, Irlandia, Irlandia Utara, dari Belfast. Malah saya dapat dari Belfast dengan foto. Jadi waktu ulang tahun ke-50, mereka di sana buat kue ulang tahun ke-50 dan mengirim fotonya.

Kemudian dari New Zeland, Australia, Italia, Prancis, Swedia, Belgia. Arab juga kalau tidak salah ada, tapi saya lupa dari negara mana.

Dari ribuan surat yang masuk, ada orang-orang tertentu yang sangat berkesan?

Saya pikir saya menghargai semua. Semua saya hargai karena mereka tidak kenal saya. Mereka hanya mungkin melihat gambar yang disebarkan teman-teman Amnesty International dan LSM-LSM lain. Tetapi mereka punya kepedulian dan menyurat ke saya. Artinya, mereka mau menyisihkan waktu untuk menuangkan pikiran atau perasaannya di sebuah kartu pos untuk saya dan teman-teman.

Anak-anak kecil yang mau menggambar, ini kan perlu pemikiran. Mereka dengan kesederhanaan, kepolosannya, membuat sesuatu untuk saya. Itu sangat menyentuh bagi saya. Ini jadi catatan khusus bagi saya bahwa hal ini harus dan layak dicontoh oleh orang Papua. Kalau seandainya kami sudah merdeka, kami juga harus mulai menanamkan tentang masalah hak asasi manusia sejak dini, sejak anak-anak, sehingga mereka tumbuh dewasa sudah bukan hal yang aneh.

Mereka sudah punya kepedulian terhadap orang lain tanpa memandang agama, keyakinan, suku, ras, golongan. Bahwa kita ini semua bersaudara. Kita sebagai manusia, kita punya hak yang sama dan juga menghargai perbedaan pendapat.

Bisa ceritakan kegitan di penjara itu? Bagaimana rutinitas Bapa?

Rutinitas saya sehari-hari berseling. Saya tak membuat jadwal ketat. Kadang-kadang saya mengisi dengan membaca, terus ada kegiatan konseling agama, ibadah dan lain-lain. Kadang-kadang saya berkunjung ke teman-teman di kamar lain, kami diskusi, tukar pikiran.

Kadang kala, saya advokasi teman-teman, adik-adik kasus kriminal, bila mereka diperlakukan tidak adil. Mereka tidak mau menuntut haknya walau masa penahanan sudah habis. Saya membantu mereka berbicara ke petugas, sebab kalau yang tahanan politik, mendampingi mereka, mereka diperlakukan dengan lebih baik. Kalau mereka sendiri, kadang-kadang petugas dengan nada kasar, temperamen yang tinggi, langsung memaki mereka. "Kalian *nggak* usah tanya-tanya. Tunggu saja di bawah. Nanti kami yang mengurus." Jadi, itulah yang kadang-kadang saya lakukan. Apalagi kalau ada narapidana lain dianiaya oleh petugas. Saya kadang-kadang hadir untuk menguatkan mereka, menghibur mereka, dan membuat laporan ke lembaga-lembaga hak asasi manusia.

Di pagi hari apa yang pertama kali Bapa kerjakan setelah bangun tidur?

Bangun tidur, sebagai orang yang beriman, saya berdoa. Kemudian saya menyiapkan sarapan. Saya seharusnya mengambil jatah makan saya di dapur penjara. Tetapi pencernaan saya sensitif, saya tak bisa makan pada umumnya teman-teman lain. Saya mesti mengolah sendiri makanan saya. Harus agak lembek dan tidak terlalu memakai bumbu.

Apakah juga soal makan minum itu menjadi persoalan di Abepura?

Kami di Papua, dengan harga yang begitu mahal, tentu mutu makanan lebih buruk. Informasi dari seorang kepala lembaga pemasyarakatan, Liberty Sitinjak, katanya jatah makan kami dihargai Rp 10.000 untuk tiga kali makan sehari.

Apa saja yang diberikan?

Nasi, sayur terong, tempe-tahu. Ada ikan asin atau ikan laut, sekali-kali ayam. Ayam satu kali. Ikan laut satu kali, lalu ikan asin. Karena saya tidak ambil jatah makan, sepertinya ikan asin dua kali seminggu.

Kadang kala, karena banyak orang, saya ambil makan belakangan, hanya dapat nasi putih saja. Kadang sayur hanya kuahnya saja. Makanan yang tidak cukup itu menimbulkan teman-teman berebutan. Saya lihat ini membentuk sifat yang tidak baik. Orang jadi berebutan, membuat mereka setelah keluar, jiwanya masih tertanam, selalu berebutan.

Seharusnya kita mengantri dengan tenang, tak usah berebutan, kita akan dapat hak yang sama dengan teman-teman lain. Jadi ini ditanamkan untuk jiwa yang saling berebutan itulah yang saya lihat. Kalau di luar, kita nonton di televisi ada orang membagi sedekah, yang datang antri itu berebutan. Akhirnya terjadi korban, ada yang diinjak-injak. Meninggal.

Ini sebenarnya mentalitas yang kurang baik, pola pembinaan dan mental yang tidak baik. Seharusnya tanpa berebutan setiap orang dengan antri tenang tertib, tidak usah khawatir.

Bagaimana jatah sabun, sikat, baju?

Baju hanya dibagi baju narapidana. Seragam itu kalau mau 17 Agustus baru diberikan. Sabun jarang-jarang. Nanti kalau sudah kami tuntut, baru diberikan. Kalau tidak, ya dibiarkan saja. Kecuali ada kunjungan, entah dari gereja atau dari teman-teman Muslim dari luar. Ada sumbangan. Itu baru dibagi-bagikan pada semua.

Alas tidur pun tidak dikasih, tikar pun tidak ada. Pada tahun 1999, waktu saya dipindah dari penjara Biak ke Abepura, saya diberi kasur yang baru di Abepura. Tiap bulan dibagi sabun cuci, sabun mandi, odol, sikat gigi, pisau cukur. Tapi tahun 2004, saya masuk ke penjara yang sama, tidak diberikan apa-apa. Kasur pun tidak. Saya bilang terjadi kemunduran dari tahun 1999. Tahun 2004 harusnya sudah lebih baik karena ada dana Otonomi Khusus dan sebagainya.

Berapa jumlah sumbangan untuk penjara Abepura?

Kapasitas penjara 250 orang. Kalau ada yang mau sumbang, kami minta jumlahnya 300, mungkin 315, supaya semua bisa dapat dengan rata. Kalau ada kelebihan bisa cadangkan untuk tahanan baru. Kadang-kadang petugas juga main ambil. Jadi ini mencegah ada kekurangan-kekurangan. Kadang petugas ya, saya juga heran, mereka sudah punya

baju bekerja, mereka lebih bebaslah, kami ini terkurung tidak bisa keluar belanja tapi jatah kami pun kadang-kadang mereka masih ambil. Apalagi yang bersifat makanan seperti nasi kotak. Itu makanya selalu kami patok sampai 300-325 kotak supaya kalau petugas yang jaga dapat, teman-teman juga masih kebagian.

Kegiatan apa yang bisa menghibur di dalam penjara?

Teman-teman secara umum saya lihat olah raga. Sebenarnya teman-teman ingin ada kegitan keterampilan, tapi kami tidak tahu kenapa tidak diadakan. Dulu ada beberapa tahanan politik, yang dipenjarakan di Wamena lalu dipindahkan ke Makassar. Di Makasar, mereka belajar keterampilan membuat pigura foto dari kertas koran. Mereka dipindahkan ke Abepura. Mereka tularkan pada teman-teman di dalam. Akhirnya, membuat pigura menjadi primadona.

Tetapi ada beberapa teman yang ikut membantu di bengkel kerja. Itu kalau ada pesanan dan ada bahan. Kalau tidak, mereka nganggur juga. Beberapa orang membuat batu-bata. Peralatannya ada sumbangan dari luar. Mereka dilibatkan atau ditentukan untuk melakukan pencetakan batu bata.

Membuat pigura dari koran ini kalau keluarga berkunjung, kami minta kertas koran. Atau ada pelayanan dari gereja atau masjid. Minta koran? Kalau diantar, baru teman-teman bisa membuat.

Ada satu keterampilan membuat tas untuk anak sekolah dari bungkus Supermie, bungkus kopi Nescafe, bungkus Energen, bungkusan Milo, atau susu kental sachetan. Dari bahan-bahan itu mereka buat tas-tas tangan.

Ada yang sampai membuat tas wanita. Cuma itu harus datangkan ritssluiting sehingga bisa dijahit. Cuma belum diarahkan supaya lebih bagus lagi. Juga motifnya. Tetapi ada teman yang membuat motif dari warna yang ada dalam sampah-sampah itu. Dibuat jadi manis kelihatannya.

Di sana ada televisi, koran, atau majalah untuk dibaca atau ditonton?

TV hanya satu di aula. Kalau jam pembukaan bisa duduk di aula nonton. Tapi anak muda mau nonton sinetron. Jadi tergantung siapa

yang pegang remote. Kalau remote dipegang kami, ya lihat berita-berita. Tapi anak muda bilang, "Aduh Bapa sinetronkah? Kitong mau nonton ini." Kami juga mengerti. Ini milik bersama. Jadi yang penting kami sudah mendapat beberapa berita, lalu ganti *channel*, sinetron. Ya, sudah kami pergi.

Jadi sangat kurang televisi di dalam. Memang ada teman pernah mengusulkan bagaimana kalau kami membawa dari luar. Cuma ini belum sempat kami bicarakan dengan pimpinan penjara. Kalau bagi teman-teman yang mampu, bagaimana kalau mereka mau upayakan sendiri? Sehingga kami ada hiburanlah. Sebab, hiburan saya cuma pakai radio kecil pakai tenaga baterai. Saya bisa mengikuti perkembangan di luar. Kebetulan ada radio lokal yang menyiarkan VOA dan KBR 68H. Kalau berita-berita dunia, saya ikuti di situ, tidak dari RRI. Tidak ada koran maupun majalah. Sangat menyedihkan.

Bagaimana dengan isteri. Seberapa sering isteri menggunjungi Bapa?

Kalau masalah keluarga, mungkin saya tidak libatkan di sini. Saya menjaga privasi keluarga saya. Mereka sudah cukup banyak tantangan. Jadi jangan menjadi perhatian umum, perhatian media. Mereka ingin mereka bisa bertahan. Sudah banyak pengorbanan mereka. Saya membatasi diri tidak mau melibatkan mereka supaya mereka bisa *survive*.

Apa arti keluarga buat Bapa?

Keluarga merupakan pendukung saya juga, memberikan motivasi, memberikan dorongan, dan kekuatan bagi saya di saat seperti begini.

Apa arti hidup bagi Bapa menjalani sembilan tahun penjara?

Saya berarti kalau saya bisa mempraktekkan ajaran iman saya. Sebagai pengikut Yesus, saya ingin bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Saya rela mengorbankan diri saya untuk kepentingan orang banyak. Yang penting orang banyak bisa sejahtera. Mendapat kehidupan yang lebih baik.

Pemerintah Indonesia bersikeras takkan membebaskan Bapa walau ada keputusan New York. Masih ada enam tahun lagi Bapa di penjara, apa rencana Bapa ke depan?

Untuk lima tahun ke depan, saya mengevaluasi kembali perjuangan yang sudah kami lakukan dan menilai kembali apa yang menjadi kegagalan-kegagalan kami. Kenapa demikian dan itu kami harus memperbaiki bagaimana ke depan lebih baik lagi.

Kritik Langkah Perjuangan

SALAH SATU KEPRIHATINAN Filep Karma adalah egoisme banyak tokoh Papua. Karma berpendapat kalau saja egoisme ini bisa diatasi, mungkin persoalan Papua bisa diselesaikan dengan lebih baik.

Pada 1950-an di Hollandia, Markus Kaisiepo dan Nicolaas Jouwe, *bakurebe pangaruh* di Nieuw Guinea Raad. Tak ada persatuan, tak ada kompromi, tak ada kerja yang baik guna melawan wacana Papua dimasukkan ke Indonesia. Dua politisi ini sama-sama mengungsi ke Belanda ketika Pemungutan Pendapat Rakyat dilakukan dengan manipulasi Indonesia pada 1969. Di Belanda, mereka tidak baku bicara.

Karma berpendapat elite Papua suka sekali klaim sebagai "presiden Papua Barat" walau negara Papua, ironisnya, belum merdeka, belum pernah ada. Mereka suka dengan teori bahwa negara akan ada bila ada pemerintah. Maka mereka berebut jadi "presiden" atau "perdana menteri." Mereka lupa bahwa kedaulatan negara adalah persoalan dunia internasional.

Pada 1972 sampai 1990, dua tokoh Papua, Seth Rumkorem dan Jacob Pray, *bakurebe* jadi "presiden" Papua Barat. Pada 1988 muncul Dr. Thomas Wanggai juga *bakurebe* jadi presiden. Wanggai bahkan memperkenalkan bendera baru. Wanggai berpendapat bendera Bintang Kejora dari 1961 warnanya terlalu Eropa: merah, putih, biru.

Ketika Indonesia bergolak sesudah kemunduran Presiden Soeharto

pada 1998, muncul dua tokoh Papua, Theys H. Eluay dan Thomas Beanal, lagi-lagi *bakurebe* jadi orang nomor satu di Papua. Eluay dibunuh tentara-tentara Kopassus pada November 2001.

Karma mencoba membuktikan bahwa dia bersedia ikut dalam perjuangan, tanpa pamrih, tanpa berpikir buat jadi presiden, perdana menteri atau apapun. Dia menunjukkan contoh dengan pengorbanan di balik jeruji penjara Indonesia.

Apa yang Bapa pikir ketika ditangkap dan dipenjarakan untuk kedua kali pada 1 Desember 2004?

Saya mengibarkan bendera dalam rangka hari ulang tahun Papua. Kemudian saya ditangkap dan didakwa pasal makar. Ya saya terima itu sebagai bukti bahwa kami ini masih dijajah dan itulah penjajahan, perlakuan pemerintah penjajah terhadap rakyat yang dijajah. Saya ditahan semena-mena dan dituduh dengan pasal-pasal karet buatan Hindia Belanda, yang digunakan sesuai dengan kemauan penguasa, Hindia Belanda maupun Indonesia. Padahal kegiatan saya tergolong penyampaian aspirasi secara damai. Tanpa kekerasan tetapi sudah dituduh melakukan tindakan makar.

Apa reaksi Bapa ketika dituduh makar?

Saya menerima ini sebagai suatu ketidakadilan. Saya mengerti bahwa itulah penjajah. Ketidakadilan penjajah. Sesuai dengan maksudnya, semau-mau dia, apa pun yang mau dituduhkan pada saya. Saya ditangkap dengan sewenang-wenang, dipenjarakan kemudian divonis hukuman 15 tahun. Saya menerima sebagai bagian dari perjuangan atau sumbangan saya untuk bangsa dan rakyat saya.

Aksi saya belum memenuhi kriteria makar. Hanya pesta ulang tahun. Tapi di sidang pengadilan Abepura, saya ditanya cita-cita saya. Saya ungkapkan: Papua merdeka. Karena cita-cita ini saya dihukum.

Apa penjara akan menghentikan perjuangan Bapa?

Saya melihat dengan ditahan dan dihukum cukup lama, maksudnya,

supaya menimbulkan ketakutan dan seakan-akan supaya menjadi pembelajaran bagi orang-orang Papua lain untuk jangan berteriak lagi, jangan perjuangkan aspirasi kalian. Jika kalian berani menentang Indonesia, kalian akan mendapat perlakuan demikian.

Tapi itu tidak membuat saya surut. Saya tetap bersemangat. Sebab saya melihat, setelah Bapa Theys Eluay gugur, orang Papua kehilangan figur yang bisa jadi panutan dan jadi inspirasi rakyat Papua. Teman-teman lain, yang tadinya sudah dipilih lewat Kongres, ternyata mereka bersembunyi di balik punggung Bapa Theys.

Mereka berani, karena ada Bapa Theys di depan sebagai *bumper*. Setelah Bapa Theys gugur, mereka ketakutan dan masing-masing cari selamat sehingga rakyat Papua juga kehilangan figur. Siapa yang berani berbicara tentang aspirasi dan keinginan rakyat Papua? Sebab tadinya mereka yang kami sudah percayakan, kami berikan mandat kepada mereka, mereka malah menghindar, cari selamat, *safety* diri sendiri dan membiarkan rakyat mengalami perlakuan semena-mena.

Saya juga kena kampanye pembusukan oleh teman-teman pejuang yang lain. Bahwa saya ini dipakai oleh pemerintah Indonesia sebagai antek bahwa saya berjuang ini hanya suatu kepura-puraan saja. Waktu itu saya menjawab bahwa nanti waktu yang akan menjawab siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh dalam perjuangan.

Apa maksud pembusukan-pembusukan itu?

Saya juga tidak tahu motivasinya apa? Apakah mereka karena merasa sudah tokoh tetapi terus merasa disaingi atau merasa takut tersaingi oleh orang lain. Saya tidak tahu, tapi saya rasakan.

Saya dikampanyekan negatif oleh mereka. "Lihat dia berjuang Papua merdeka masih pakai pakaian pegawai, pakai motor ke sana ke mari tak pakai helm, mengibarkan bendera di motor, tetapi tidak ditangkap." Jadi itu dipakai kampanye negatif kepada masyarakat untuk tidak mempercayai saya.

Tetapi saya bilang saya bisa lakukan begini itu karena berani-beraninya saya sendiri. Bukan karena saya dipakai sebagai agen pemerintah. Tetapi memang karena saya berani menunjukkan jati diri.

Saya bisa tunjukkan identitas sebagai seorang yang berjuang untuk menentang ketidakadilan dan menyuarakan aspirasi rakyat Papua.

Siapa tokoh sesudah Theys Eluay, yang bisa memimpin bangsa Papua?

Sampai saat ini tidak ada. Sebab orang yang bisa memimpin adalah orang yang harus teruji dengan berbagai ancaman, hambatan, tantangan dan juga bersedia mempertaruhkan hidup dan nyawa untuk sebuah perjuangan. Kalau seorang yang berjuang tetapi takut mati, takut masuk penjara, dia tidak memenuhi kriteria itu.

Karena bagaimana dia mau dipercaya? Saat ada aparat, apakah itu TNI, polisi atau pihak-pihak lawan, terus dia menyelamatkan diri, melarikan diri untuk mencari selamat dan membiarkan rakyat berjalan sendiri mengalami penderitaan? Dia tidak berani berbicara.

Saya berpikir begini. Saya punya kelebihan dalam hal saya punya pendidikan dan tentu saya punya pemahaman lebih baik, dibanding masyarakat saya kebanyakan. Ada yang pendidikannya terbatas. Mereka selama ini hidup dalam trauma, teror, intimidasi. Jadi mereka ketakutan mengungkapkan apa yang ada dalam hati mereka. Saya mendapat pendidikan lebih tinggi. Artinya sudah pernah kuliah, lalu punya pemahaman, ya tidak terlalu luas, tetapi masih luas dibanding teman-teman yang lain. Saya harus berani tampil untuk berbicara bagi mereka.

Bagaimana Bapa melihat orang-orang muda yang jadi aktivis, adakah potensi melahirkan seorang pemimpin?

Kalau saya melihat senior-senior saya, atau seangkatan saya, di Papua kebanyakan diam. Mereka cukup banyak di luar negeri, termasuk Andy Ayamiseba[6] (Vanuatu), Benny Wenda[7] (Oxford), John Otto Ondawame[8]

6 Andy Ayamiseba tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM), mengorganisir organisasi West Papua National Coalition For Liberation. Mantan manajer dan pelopor Black Brothers, grup band Papua yang terkenal era 1970-an

7 Benny Wenda tokoh perjuangan Papua Merdeka. Awal era reformasi, Wenda memimpin organisasi Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (Demmak) menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat serta kepercayaan masyarakat suku Papua.

8 John Otto Ondawame akademisi dan aktivis Papua Merdeka. Kepala Kantor Perwakilan Rakyat Papua Barat di Port Vila, Vanuatu. Juru bicara internasional untuk Organisasi Papua

(Vanuatu), Leonie Tanggahma[9] (Den Haag), Octovianus Mote[10] (New Haven), Rex Rumakiek[11] (Canberra). Tapi yang di Papua, mungkin salah satunya Forkorus Yaboisembut[12]. Dia berani juga tampil untuk berbicara begitu Bapa Theys jatuh.

Pada 2001, sesudah Bapa Theys gugur, saya lihat masyarakat dicekam ketakutan, trauma. Saat itu saya tampil aksi sendiri dengan penampilan saya yang berbeda. Saya berani memakai bendera Bintang Kejora, berjalan pakai motor, pasang bendera di motor. Saya mau tunjukkan sama orang Papua, "Mari sepanjang kita tidak membuat sesuatu yang mengancam nyawa orang lain, atau menggangu ketertiban umum, kenapa mesti takut. Bangkitlah."

Maksud saya untuk membakar motivasi teman-teman yang bekerja sebagai pegawai negeri. Saya juga pegawai negeri. Terikat dalam sistem. Tetapi saya berani lakukan.

"Marilah kalian bersama-sama. Kalian juga harus berani tampil, menyuarakan aspirasi orang Papua. Sebab kalian juga orang Papua. Jangan kalian juga dicekam ketakutan, hingga tak berani bersuara dengan benar."

Sebab dalam percakapan pergaulan, saya tahu juga bahwa pegawai negeri juga ingin merdeka. Tapi mereka sangat ketakutan. Seandainya ada situasi politik yang berubah, saya takut mereka bisa bertindak lebih brutal dari apa yang pernah saya lakukan. Mereka selama ini ketakutan. Mereka meredam aspirasi, semangatnya itu. Tapi begitu ada peluang bisa-bisa mereka akan bertindak melampaui batas–batas. Yang selalu saya tekankan bahwa ini perjuangan damai.

Sekalipun kita punya peluang saat itu, untuk membalas perlakuan, yang pernah kita alami, tak pantas untuk kita lakukan. Saya pernah dianiaya. Tapi kalau saatnya sudah berbalik dalam posisi mempunyai kewenangan, saya tak pantas melakukan hal yang sama, seperti yang

---

Merdeka dan anggota Presidium Dewan Papua. Penerima Reconciliation Award 2001 dan Presiden Soeharto Award untuk Keunggulan Akademik 1972.

9 Leonie Tanggahma aktivis Papua Merdeka, tinggal di Belanda.

10 Octovianus Mote aktivis Papua Merdeka, tinggal di New Haven, kota ketiga terbesar di Connecticut, terletak antara wilayah metropolitan New York dan daerah New England.

11 Rex Rumakiek Ketua Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan

12 Forkorus Yaboisembut Ketua Dewan Adat Papua. Oktober 2011 berpartisipasi dalam Kongres Rakyat Papua III yang berujung dipenjara atas tuduhan makar. Ia sudah dibebaskan.

pernah dilakukan terhadap saya. Dulu saya dipukul. Jangan waktu saya punya kekuatan, punya kekuasaan, punya peluang, saya juga balas memukul, berarti saya tidak beda dengan orang yang pernah memukul saya. Saya harus mengampuni, memaafkan dia yang melakukan itu.

Bagaimana Bapa melihat kepemimpinan Forkorus Yaboisembut?

Saya kilas balik Bapa Theys Eluay dulu. Saya perlu bicara jujur tentang proses terpilihnya Bapa Theys. Waktu kongres kedua berlangsung, 29 Mei sampai 4 Juni 2000, ada tahapan pengajuan calon-calon pemimpin atau siapa yang dituakan untuk diusulkan ke depan. Nama-nama itu dihimpun lalu diadakan proses seleksi, lalu voting untuk siapa yang dipilih. Ternyata Bapa Theys merebut kepemimpinan dari meja sidang dengan langsung mengklaim, "Saya ketua presidium dan saudara Tom Beanal sebagai wakil ketua dewan presidum."

Jadi tanpa suatu proses pemilihan. Pak Theys langsung mengklaim diri. Itu sempat *stagnant* sebentar karena Tom Beanal tidak setuju. Bapa Tom mungkin juga berambisi jadi ketua presidium. Terjadi tawar-menawar, dialog yang cukup alot. Sidang molor. Setelah Bapa Tom dibujuk, akhirnya beliau mau menerima. Baru diputuskan Theys Eluay ketua, Tom Beanal wakil ketua presidium.

Waktu Theys umumkan, langsung Satgas Papua dan orang-orang pendukungnya, setuju, angkat tangan dan tepuk tangan. Mereka memainkan emosi peserta sidang. Ini bukan sesuatu yang demokratis. Orang secara tidak sadar langsung mendukung semua. Padahal tokoh bukan Bapa Theys saja. Ada banyak tokoh juga di situ.

Bisa sebutkan siapa saja?

Ada Tom Beanal[13], pendeta Herman Awom[14], Elieser Awom (mantan tapol Papua). Ada Clemens Runaweri dari PNG, ada Frans Albert Yoku, ada Simon Messet. Untuk Frans Albert Yoku dan Simon Messet sekarang sudah berubah haluan politik. Tapi dulu kami sama.

13 Tom Beanal aktivis perjuangan Papua Merdeka di bidang politik, Ketua Presidium Dewan Papua.

14 Herman Awom pendeta, seorang di antara tiga moderator Prresidium Dewan Papua (PDP). Ia pernah menjabat Wakil Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) Irian Jaya.

Ada John Mambor[15], ada Terrianus Yoku, ada Terrianus Aronggear, ada Theopilus Toto. Ada James Tauruy, banyak tokoh-tokoh OPM, yang sudah masuk penjara bertahun-tahun, yang dulu ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya.

Jadi kalau dibanding senior-senior itu, saya masih anak muda. Pada tahun 2000, saya baru umur 48. Mereka senior-senior cukup banyak ya. Jadi itu yang terjadi waktu Kongres II.

Kemudian Kongres III pada Oktober 2011, pola sama juga dipakai Forkorus Yaboisembut. Ini informasi saya dengar dari Selpius Bobii, ketua panitia Kongres III. Ia terjadi pada tahapan diskusi tentang calon presiden atau siapa yang ditokohkan pemimpin di Papua.

Padahal, ada banyak tokoh. Mereka tadinya membentuk suatu dewan kepemimpinan bersama atau kepemimpinan kolegial. Ada Forkorus Yaboisembut, ada pendeta Herman Awom, ada Elieser Awom, ada Semuel Paiki, ada Albert Kaliele, ada Terrianus Yoku, dan ada Edison Waromi[16]. Waktu datang, Edison Waromi langsung mengatakan, Forkorus Yaboisembut jadi presiden, lalu Forkorus menunjuk, Edison Waromi jadi perdana menteri. Otomatis tokoh-tokoh lain terus menarik diri.

Negaranya belum ada tapi rebutan jadi presiden. Proses ini tak masuk akal. Proses ini tidak demokratis, menurut Selpius Bobii. Nama-nama orang yang ditokohkan, menurut Selpius Bobii, sekitar 33 orang, akan didata semua. Lalu dimasukkan dalam satu proses pemilihan yang sudah ditetapkan sistemnya: bakar batu. Jadi nama-nama tokoh ini akan dimasukkan, lalu mereka bakar batu. Entah dijepit di daun atau di makanan atau apa? Nanti setelah dibuka, dijepit pada daun dan daunnya matang, berarti itu yang jadi pemimpin. Jika daunnya masih mentah itu berarti gagal.

Selpius ini kan pendidikannya calon pastor. Saya lihat dia mengawinkan metode yang dipakai dalam pemilihan Paus dengan metode tradisional suku Mee. Proses pemilihan seorang pemimpin atau proses pengambilan keputusan terhadap sesuatu yang menyangkut

15 John Mambor salah satu pentolan Presidium Dewan Papua. Ia meninggal tahun 2003 secara mendadak.

16 Edison Waromi pengacara dan Presiden Otoritas Nasional Papua Barat, organisasi yang mengkampanyekan kemerdekaan Papua.

kepentingan kehidupan orang banyak.

Mengapa tidak menggunakan one man one vote?

Ini yang kontradiksi. Di situ orang Papua menuntut proses referendum yang demokratis dimana *one man one vote*, tapi mereka sendiri, yang punya keinginan menjadi tokoh atau pemimpin, mengabaikan *one man one vote*. Bagaimana demokrasi kita mau bangun, kalau kita sendiri tidak mematuhi aturan-aturan atau kriteria demokrasi?

Apa yang terjadi setelah Kongres III?

Beberapa tokoh yang hadir pada kongres mereka menarik diri dan tidak mau bergabung. Menurut Selpius Bobii, waktu mau dipaksakan dengan proses seperti yang direncanakan, dia menarik diri. "Kalau begitu, saya pulang saya tidak ikutan lagi kongres ini. Silahkan kalian lanjutkan."

Kemudian satgas-satgas, yang ada di bawah kendali Forkorus, mengamuk, mengancam Selpius Bobii. "Kamu tahu tidak, ini kongres dilakukan dimana? Ini di tanah kami. Tanah suku Tabi."

Saya jadi bertanya, apakah perjuangan ini bukan perjuangan seluruh bangsa Papua? Kenapa datang seorang pemimpin, terus mengangkat nama suku tertentu? Kepentingan suku tertentu?

Harusnya mari kita duduk bersama, kita bicara bersama, mencari kesepakatan atau melakukan pemilihan yang demokratis. Sehingga apapun hasilnya, diterima semua lapisan rakyat Papua. Tapi karena pemaksaan kehendak, sehingga dari suku-suku lain, tokoh-tokoh lain, terus menarik dukungannya. Mereka mundur, tak mendukung lagi. Saya lihat sekarang Forkorus berusaha meminta dukungan, tapi sulit.

Rakyat Papua, rakyat kecil, mereka tahu apa yang disebut dengan *one man one vote*. Mereka sangat mengetahui, tapi kalau yang mau jadi pemimpin Papua, tidak memberlakukan atau tidak mau mematuhi aturan *one man one vote*, mereka juga kecewa.

Siapa saja tokoh-tokoh yang lalu menarik dukungan?

Selpius Bobii menyebut 33 orang. Lainnya saya tidak tahu. Dari orang yang tadi saya sudah sebutkan, mereka hadir dan terus menarik

dukungan: Albert Kaliele, Socratez Sofyan Yoman[17], Benny Giay[18], Semuel Paiki, Herman Awom, Elieser Awom. Kemudian ada tokoh lain juga saya tidak tahu.

Merujuk pada dua kongres ini, apa tantangan ke depan buat perjuangan bangsa Papua dalam memperjuangkan demokrasi?

Saya lihat tantangannya bukan level masyarakat di bawah, tapi justru level para pemimpin. Apakah mereka menyadari dan memaknai apa arti *one man one vote* atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi kalau bicara dengan pihak Indonesia selalu tuntutannya, Pepera itu tidak demokratis, tidak *one man one vote*.

Tetapi kalau ada pemilihan di kalangan kita sendiri, kok *one man one vote* tidak dipertahankan? Kenapa mau memakai cara-cara yang di luar *one man one vote?* Itu juga menjadi tanda tanya bagi saya pribadi.

Saya pribadi juga tidak mau pakai cara-cara tidak terpuji, mencederai demokrasi. Saya ingin supaya dilakukan yang demokratis. Saya tidak mau memakai *money politic* dan sebagainya. Saya tidak mau pakai cara-cara manipulasi.

Adalah cara-cara praktek money politic di kongres-kongres ini?

Kalau *money politic*, saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat adalah trik-trik untuk merebut peluang seperti yang Bapa Theys lakukan.

Apakah proses demokratis ini jadi tantangan bagi perjuangan Papua?

Ya, betul. Memang saya melihat demokrasi di kalangan elit itu, belum dimaknai atau dipahami dengan benar. Dan banyak yang belum punya maksud atau punya komitmen untuk bisa melakukan itu dengan konsekuen. Jadi ini sering saya bertanya, di satu sisi kita selalu mengatakan bahwa Indonesia tidak demokratis, khususnya, dengan Pepera tahun 1969. Di mana di situ ditekankan untuk *one man one vote* tetapi ternyata Indonesia memakai sistem perwakilan yang penuh rekayasa dan intimidasi.

17 Socratez Sofyan Yoman pendeta dan aktivis pejuang kemerdekaan Papua. Menerbitkan autobiografi Suara Gembala: Menentang Kejahatan Kemanusiaan di Tanah Papua tahun 2012

18 Benny Giay antropolog, pendeta, dan ketua Gereja Sinode Kingmi Papua

Nah, ini tidak diterima oleh orang Papua, apalagi di kalangan elit. Mereka mengerti itu. Tapi, kenapa kalau terjadi pemilihan untuk memilih seorang tokoh sebagai pemimpin ternyata juga tidak konsisten? Maksud saya tidak punya komitmen untuk melakukan *one man one vote* itu secara benar. Jadi kalau yang jadi elit pemimpin saja sudah begitu, bagaimana memberikan contoh yang baik pada rakyat. Sebab rakyat di bawah melihat contoh yang diperagakan oleh orang yang ditokohkan, atau yang dianggap pemimpinnya.

Kalau dari dia sendiri, ada kesadaran untuk mempertahankan nilai–nilai demokratis itu, maka saya pikir rakyat akan mengikuti dan sepanjang rakyat itu diperlakukan adil, jujur, tidak ada kecurangan mereka akan menerima itu sekalipun tidak sesuai dengan pendapat pribadi. Misalnya dalam pemilihan tokoh mungkin saya senang ini, tokoh ini, tetapi ternyata setelah berjalannya pemilihan demokratis yang terpilih ini tokoh lain, ya sudah saya akan menerima itu sebagai hasil sebuah demokrasi.

Apa solusi untuk para elit ini?

Kalau kita berteriak atau bersuara menuntut keadilan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan kita berada dalam posisi menyelenggarakan kegiatan yang bersifat kenegaraan atau untuk kepentingan orang banyak, kita harus mempertahankan nilai-nilai demokrasi itu. Jangan kita menuntut ketidakadilan yang Indonesia lakukan, tapi kita sendiri sebagai subjek atau pelaku juga berbuat atau mengulang tindakan yang sama. Berarti kita tidak konsisten. Kalau kita menuntut diperlakukan adil, kita pun harus berlaku adil terhadap orang lain.

Garis besar politik itu apa saja?

Secara umum, saya melihat, bahwa secara garis besar itu ada tiga atau empat garis perjuangan. Pertama, memperjuangkan referendum. Kedua, memperjuangkan dekolonisasi. Ketiga, memperjuangkan pengakuan kedaulatan.

Pengakuan kedaulatan ini melanjutkan dari 1 Desember 1961, kemudian ditegaskan lagi pada 19 Oktober 2011.

Kemudian yang keempat itu yang netral tidak memihak

manapun, tapi siap mendukung manapun yang lebih progres atau lebih memungkinkan, untuk mencapai tujuan. Istilahnya mengakses ketiga garis perjuangan ini, artinya dia tidak fanatik terhadap salah satu tetapi mana yang akan berhasil itu didukung. Jadi mungkin dapat disebut oportunis.

Cuma oportunis terbagi dua: oportunis untuk diri sendiri. Kepentingan diri. Ada juga oportunis untuk kepentingan orang banyak. Jadi belum tentu selalu oportunis itu negatif. Oportunis bisa dilihat dari sisi positif kalau untuk kepentingan orang banyak.

Apa pandangan Bapa mengenai kegagalan demokrasi dalam Kongres III?

Kegagalan kongres ketiga itu mengulangi kegagalan kongres kedua. Di mana proses pemilihan pemimpin tak terjadi secara demokratis. Di mana diberikan kesempatan pada rakyat atau peserta kongres ataupun mereka yang ditunjuk sebagai wakil-wakil masyarakat dalam kongres untuk memilih secara aklamasi atau secara bebas siapa yang ingin dimunculkan sebagai pemimpin. Yang terjadi adalah perebutan antara pemimpin-pemimpin ini. Masing-masing ingin memajukan dirinya dan itu membuat pertentangan di antara mereka. Edison Waromi langsung mengambilalih.

Ya saya tidak tahu mengambilalih atau apa istilahnya? Pokoknya bersuara keras untuk mengatakan, kalau begitu Pak Forkorus menjadi presiden dan Forkorus langsung menunjuk Edison Waromi menjadi perdana menteri.

Ini saya dengar dari cerita Selpius Bobii, ketua panitia penyelenggara kongres. Saya melihat ini kegagalan. Karena kami sebagai orang Papua menuntut Indonesia harus melakukan Pepera secara *one man one vote* berarti kami pun dalam melakukan pemilihan seorang pemimpin secara demokratis, berarti kami harus berpegang pada metode *one man one vote*.

Saat kongres pertama atau kedua, apa Bapa terlibat?

Kongres pertama saya belum terlibat karena tahun 1961. Kongres kedua saya mulai terlibat, waktu diadakan musyawarah besar sebelum kongres jadi pra kongres di hotel Sentani Indah.

Terlibat sebagai peserta tadinya datang sebagai peserta penggembira. Tetapi terus saya didaulat oleh teman-teman eks tahanan politik untuk terlibat langsung duduk dalam kelompoknya eks tahanan politik TPN/ OPM. Di kemudian hari saya didaulat untuk mengisi posisi sekertaris jendral tapol-napol.

Jadi di kongres kedua saya terlibat disitu karena saya sebagai sekretarisnya Tapol Napol. Kemudian, ya, sebagai pengurus otomatis saya juga mewakili teman-teman dalam pertemuan-pertemuan mempersiapkan kongres itu.

Di kongres ketiga itu saya dalam penjara jadi saya tidak terlibat. Tapi saya didatangi Selpius Bobii untuk meminta persetujuan saya saat dilakukan kongres. Saya bilang yang penting pegang syarat-syarat bahwa pemilihan calon pemimpin Papua untuk menjadi pemimpin harus secara demokratis dan itu kalau kehendak rakyat banyak saya mendukungnya. Selpius menjelaskan tentang mekanisme bakar batu yang akan digunakan, saya bilang, sepanjang itu berlangsung secara adil jujur dan terbuka untuk siapa saja saya mendukungnya.

Bagaimana peran Bapa di kongres kedua?

Di kongres kedua kami mengajukan beberapa anggota kami duduk dalam dewan presidium, antara lain: almarhum John Mambor, saudara kami Elieser Awom, dan mungkin ada teman lain. Saya sudah lupa karena sudah sekian lama kongres kedua itu.

Kelompok mana yang dominan di kongres ketiga?

Kalau di kongres ketiga kemarin, yang saya tangkap, dari cerita Selpius Bobii, kelompok yang menuntut pengakuan kedaulatan. Jadi kelompok Forkorus Yaboisembut, tadinya kelompok lain juga ada di situ tetapi begitu tiba pemilihan pemimpin terus didominasi oleh kelompoknya Forkorus Yaboisembut yang menuntut pengakuan kedaulatan.

Apakah Bapa juga akan menyampaikan pada Forkorus?

Itu pernah kami diskusikan tetapi Forkorus tidak hadir. Cuma Edison Waromi yang hadir dan beliau merasa tidak terima. Dia mengatakan bahwa kami dipilih oleh Tuhan. Saya cuma tersenyum saja

mendengarkan itu. Boleh saja orang mengklaim demikian, tapi mari kita buktikan di lapangan apakah benar demikan atau itu memang kita yang merekayasa. Rekayasa dalam pengertian kita sudah menyiapkan aktor-aktor di lapangan untuk memberikan suara yang mendukung kita, begitu.

Apa pendapat Bapa mengenai arus referendum yang begitu kencang disuarakan oleh elemen-elemen kaum muda?

Di sini saya posisi netral, jadi referendum bagi saya ok, saya menerima itu atau pun dekolonisasi atau pun misalnya yang dimainkan oleh Forkorus Yaboisembut dan kelompoknya, saya netral. Artinya begini, apapun cara yang digunakan yang penting itu demokratis dan pasti membawa kemenangan bagi rakyat Papua, saya mendukungnya. Jadi saya tidak fanatik terhadap salah satu garis perjuangan. Saya berusaha posisi netral dan saya terbuka terhadap ketiga arus perjuangan ini.

Dalam sepuluh tahun atau lima belas tahun, bagaimana pertumbuhan dan pergerakan tiga arus besar ini?

Saya melihat terjadi fanatisme arus atau fanatisme faksi dan terjadi pembenturan faksi-faksi perjuangan yang ada, mengecilkan perjuangan ini sendiri. Teman–teman yang berjuang ini bukannya mengadu kelihaian politik, kekuatan politik, dengan pihak lawan yaitu Indonesia tetapi terjadi perebutan wilayah kekuasaan dalam hal penguasaan massa, penguasaan pengaruh, di antara kami sendiri. Lebih mementingkan kelompok.

Jadi energi habis terbuang karena beradu antara faksi-faksi perjuangan sendiri, bukan dipakai untuk berhadapan dengan lawan. Jadi belum berhadapan dengan lawan, antar kami sendiri sudah saling berbenturan. Membuang energi. Seharusnya kami bersatu atau lebih disinergikan untuk bisa optimal pada perlawanan itu. Tetapi ini tidak terjadi, yang ada berbenturan sendiri, menguntungkan pihak lawan.

Lawan tak mengadu kami. Kami sudah saling beradu sendiri. Ini yang sangat-sangat disayangkan.

Apa gagasan Bapa untuk menyatukan faksi-faksi ini?

Saya lebih mengibaratkan tiga arus perjuangan ini ibarat bahan yang harus kami gunakan untuk melawan Indonesia. Sedangkan kami berada pada satu organisasi atau badan yang bersatu. Jadi kami bisa pakai dekolonisasi, berjuang pada lembaga dekolonisasi PBB. Bisa juga lewat referendum, tentunya kami pelajari dahulu kira-kira cara apa yang bisa dipakai untuk menggolkan tujuan ini. Juga bisa memakai cara yang dipakai Forkorus. Tinggal dipelajari mana yang ada ketentuan-ketentuan hukum atau ada peluang-peluang untuk bisa kami gunakan.

Jadi tidak harus salah satu, tetapi ini harus dicoba. Jadi kita bisa coba ketiganya atau salah satu, tetapi yang lainnya juga siap. Dicoba yang satu, dicoba lagi yang lain. Seperti menembak sasaran memakai tiga anak panah. Mereka tidak saling bertentangan tetapi semua diarahkan pada lawan.

Seberapa besar benturan antar arus itu terjadi di internal pergerakan rakyat Papua?

Saya melihat karena benturan ini sehingga lawan tidak merasakan adanya bahaya. Dia merasa aman, karena di antara mereka sudah berbenturan sendiri. Sehingga sulit bagi kami mendapat dukungan dari internasional sebab mereka juga bingung, ini mau mendukung yang mana.

Seperti saat ada delegasi kami dari Presidium Dewan Papua (PDP) menghadiri pertemuan negara-negara di Pasifik Selatan, cuma saya lupa persisnya di mana.

Setelah utusan PDP maju, lalu utusan bintang empat belas juga masuk. Waktu itu terpecah dua: bintang fajar dan bintang empat belas dengan grupnya almarhum Thom Wanggai[19].

Mereka masuk, berbenturan di dalam, akhirnya disuruh keluar. Kalian Papua keluar dulu, kalian selesaikan dulu masalah kalian sehingga satu orang saja yang masuk di sini untuk mewakili kalian semua.

Ini jadi pembelajaran elit-elit politik di Papua bahwa benturan kami tak menguntungkan dan mengurangi simpati negara pendukung kami.

19 Dr. Thomas Wapai Wanggai menjalani hukuman 20 tahun penjara karena aktivisme politik memperjuangkan Papua Merdeka. Ia dibunuh di penjara Cipinang, 12 Maret 1996.

Tetapi melihat kami pecah, akhirnya dia tak berani dukung sebab dia akan berpikir saya salah dukung nanti.

Jangan sampai ini terjadi seperti di Rwanda, suku Tutsi dan suku Hutu saling berbunuhan sebab mereka ketakutan. Di dalam kasus Papua, jangan dukung salah satu faksi. Karena faksi yang kuat akan membunuh faksi yang lain, sehingga nantinya negara itu juga akan dinyatakan ikut terlibat dalam aksi pembunuhan kelompok.

Apakah TPN/OPM memiliki kekuatan yang mungkin selama ini tidak terlihat dalam forum resmi semacam kongres?

Saya tidak bisa berbicara tentang itu karena saya tidak terlibat di situ. Saya berbicara tentang faksi–faksi yang bergerak secara politik karena saya bermain di sisi politik.

Saya buta tentang apa yang dilakukan TPN/OPM. Yang saya tahu, di kalangan TPN/OPM sendiri sudah ada kesepakatan untuk sementara mereka menahan diri dan memberi kesempatan orang politik berjuang ke arah damai. TPN/OPM menahan diri karena tidak mau rakyat jadi korban lagi. Kalau kami dari faksi politik berjuang dengan cara damai, korbannya paling kami masuk penjara, tidak ada rakyat yang terbunuh.

Bagaimana Bapa melihat tentang masa depan Papua?

Saya melihat benturan di tingkat elit yang harus kami dudukkan bersama. Ini mungkin butuh waktu lama untuk saling mengerti dan memahami, sehingga bisa saling mengalah. Tak ada saling rebut posisi dan memaknai benar apa itu demokrasi.

Sehingga kalau pun dia kalah dalam pemilihan, berbesar hati untuk mengakui temannya lain. Mengucapkan selamat dan mendukung teman yang terpilih menjadi pemimpin.

Contoh paling gampang, saya lihat pada pilkada DKI baru-baru ini. Saat kalah, Fauzi Bowo dengan besar hati langsung mengucapkan selamat pada Joko Widodo dan juga menyatakan dukungannya siap membantu kalau diperlukan untuk masukan-masukan atau hal-hal yang masih perlu dikomunikasikan. Sikap seperti ini yang harus dimiliki para elit-elit politik Papua.

Bagaimana melihat pemimpin-pemimpin Papua Mako Tabuni[20], Danny Kogoya[21], Victor Kogoya[22]?

Ini merupakan strategi dari pihak lawan untuk memutuskan rantai kepemimpinan. Anak-anak muda yang baru naik dengan semangat, dengan keberanian yang kuat luar biasa, menyatakan pendapat dengan damai dan berani di depan pemerintah, dimusnahkan.

Mereka merupakan figur pimpinan yang punya kharisma, sehingga pemerintah khawatir akan tumbuh menjadi besar dan sulit diredam. Jadi selagi masih tumbuh, langsung dimusnahkan. Ini salah satu bentuk teror dan intimidasi terhadap rakyat Papua.

Anak-anak muda yang akan jadi pemimpin dengan berbagai cara dihilangkan, dibuat cacat. Tujuannya menanamkan teror dan ketakutan kepada adik-adik muda yang akan menjadi penerus mereka. Ini semakin membuktikan bahwa yang terjadi di Papua sekarang ini adalah penjajahan. Ini sama seperti yang Belanda lakukan dulu terhadap Indonesia, dengan cara menangkap Soekarno, memburu Tan Malaka, juga Hatta. Mereka ditangkap, diasingkan, dan dipenjarakan.

Bagaimana melihat perbandingan Belanda dengan Indonesia?

Saya melihat Belanda menghargai dan menghormati Soekarno-Hatta, sebagai calon pemimpin Bangsa Indonesia. Meskipun mereka ditangkap dan dipenjara tetapi hak-hak mereka tidak dirampas. Saya baca itu dari buku Muhamad Hatta. Dia menceritakan bahwa waktu dia dibuang ke Banda Neira, harta kekayaannya adalah buku-buku dengan peti-peti. Semua itu turut diangkat dengan kapal. Hatta juga dikasih uang saku dalam penjara itu. Mereka diperlakukan lebih manusiawi.

Di era ini dimana ada Undang-Undang Dasar, ada pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, dan Indonesia juga punya Kementerian Hukum dan HAM, tetapi kami diperlakukan dengan, misalnya, harta

20 Mako Tabuni aktivis Papua dan wakil ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Ia meninggal karena luka tembak dan kehabisan darah pada 14 Juni 2012 dalam sebuah operasi penangkapan oleh Kepolisian Papua.

21 Danny Kogoya tokoh Organisasi Papua Merdeka. Ia meninggal Desember 2013 karena infeksi kaki kanan akibat ditembak saat ditangkap anggota Polres Jayapura September 2012.

22 Victor Kogoya Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) konsulat Indonesia Tengah. Ia meninggal Juli 2012 di RSUD Wamena. Kematiannya masih misterius.

milik kami disita semena-mena lalu buku-buku kami di-sweeping atau dipindahkan ke Polda. Barang-barang kami diangkat dan dilempar. Itu semua saya alami sendiri.

Ini terasa aneh di era modern, di mana Indonesia menyatakan diri sebagai negara demokrasi terbesar setelah Amerika dan India, tetapi perlakuan yang kami dapat berbeda sekali dari apa yang disebut demokrasi.

Dengan teror-teror di Papua, apakah Indonesia menyelesaikan persoalan ini atau membiarkannya?

Saya melihat ada itikad tidak baik dari pemerintah Indonesia dan tidak ada niat untuk menyelesaikan masalah ini. Janji untuk menyelesaikan masalah di Papua bukan baru. Sudah lama. Namun sekian lama berjalan di tempat.

Program apapun yang ditawarkan sebatas *lip service* saja. Pemanis bibir saja. Contoh, saat Papua masih bernama Irian Barat, waktu dianeksasi Soekarno mengatakan kembali ke bawah pangkuan ibu pertiwi. Diberikan otonomi khusus yang seluas-luasnya. Tapi di dalam otonomi khusus yang seluas-luasnya operasi militer berjalan dan pembunuhan terjadi terus. Penyiksaan, penghinaan, pelanggaran hak asasi manusia yang sangat besar terjadi.

Ada ladang-ladang pembantaian di tanah Papua. Sayangnya, waktu itu, kami terbatas dalam teknologi dan kemampuan untuk menyimpan data sehingga semua itu hilang lenyap begitu saja. Kami tak bisa mengumpulkan atau mengungkapkan fakta ini.

Tetapi ada beberapa teman yang berdinas di militer maupun di kepolisian memberitahukan kami bahwa seperti markas-markas militer itu kadang-kadang di bawahnya ada ladang pembantaian. Sebagai contoh, pembangunan asrama Brimob di Timika. Waktu di buldozer banyak ditemukan tulang belulang. Jadi kalau bekas ladang pembantaian terus dibangun komplek militer atau polisi, siapa yang akan berani kesitu untuk menggali-gali dan menemukan bukti itu?

Kapan peristiwa di Timika itu terjadi?

Saya tidak tahu persis. Yang jelas saat peristiwa di Timika itu, almarhum

Kelly Kwalik[23] masih eksis. Saat itu banyak operasi militer dilakukan di Timika, mungkin sekitar tahun 1980-an sampai 1990-an.

23 Kelly Kwalik komandan sayap militer Organisasi Papua Merdeka. Ia meninggal di Timika, 16 Desember 2009, ditembak polisi di tempat persembunyiannya di Gorong-gorong, lingkungan Timika. Kepolisian Indonesia menuduh Kwalik bertanggung jawab atas serangkaian insiden penembakan dan serangan yang menargetkan pekerja maupun properti dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan, yang mengoperasikan tambang tembaga dan tambang emas besar di Papua. Dalam pertemuan 2009 dengan kepolisian, Kwalik berulang kali membantah bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut.

LAMPIRAN

PETISI KEPADA:
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
KELOMPOK KERJA TERHADAP PENAHANAN SEWENANG-WENANG

Ketua-Pelapor: Malick El Hadji Sow (Senegal)
Wakil Ketua: Shaheen Sardar Ali (Pakistan)
Roberto Garretón (Chile)
Mads Andenas (Norwegia)
Vladimir Tochilovsky (Ukraina)
DEWAN HAK ASASI MANUSIA
MAJELIS UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Mengenai Kasus
FILEP JACOB SEMUEL KARMA,
Warga Negara Republik Indonesia
vs
Pemerintah Republik Indonesia

MEMOHON TINDAKAN MENDESAK
Petisi Pengajuan Bantuan Berdasarkan Resolusi 1997/50, 2000/36, 2003/31, 6/4 dan 15/18

Diajukan oleh:
Frederick Fedynyshyn dan Eva Deitz
Hogan Lovells LLP
555 Thirteenth Street, NW
Washington, DC 20004
Amerika Serikat
+1 (202) 637 5600 (telp); +1 (202) 637 5910 (fax)
frederick.fedynyshyn@hoganlovells.com
eva.deitz@hoganlovells.com

Michael Sulmeyer
Stanford Law School
+1 (202) 210 7532
msulmeyer@gmail.com

Tarun Chhabra
Harvard Law School
+1 (318) 623 4308
tchhabra@gmail.com

Maran Turner and Sachiko Jensen
Freedom Now
1776 K Street, NW, Suite 811
Washington, DC 20006
Amerika Serikat
+1 (202) 223-3733 (tel); +1 (202) 223-1006 (fax)
mturner@freedom-now.org
sjensen@freedom-now.org

16 Mei 2011

LANDASAN PENGAJUAN "TINDAKAN MENDESAK"

Sebagaimana dipaparkan dalam Petisi terlampir, Pemerintah Indonesia secara sewenang-wenang merampas kebebasan Filep Semuel Karma selama lebih dari 6 tahun karena mengorganisir dan berpartisipasi dalam upacara pengibaran bendera memperingati hari kemerdekaan Papua dari Belanda pada 1961. Selain itu, kondisi tahanan yang buruk membahayakan kehidupan dan kesehatannya. Kami meminta kasus Filep Semuel Karma bisa dipandang memenuhi prosedur "Tindakan mendesak". Selain itu, kami juga meminta segera dilakukan komunikasi dengan Pemerintah Indonesia guna memastikan Karma mendapat makanan, air bersih, dan perawatan medis memadai.

Sejak ditangkap pada 1 Desember 2004, Karma dipenjara di dua tempat berbeda, yaitu LP Abepura dan Polresta Jayapura. Dia dipenjara di LP Abepura sejak hari penangkapannya, dan dipindahkan ke Polresta Jayapura pada 3 Desember 2010. Pemerintah Indonesia mengeluarkan tuduhan kabur dan ngawur bahwa ia memicu kerusuhan di LP Abepura sebagai dasar pemindahannya. Pada kenyataannya, pemerintah menjatuhkan tuduhan palsu itu untuk memindahkan Karma karena ia dikenal memperjuangkan gerakan damai menuntut kemerdekaan Papua. Pemerintah Indonesia secara resmi tidak menjatuhkan dakwaan ke pengadilan terkait kerusuhan bulan Desember di LP Abepura dan menutup akses bantuan hukum untuknya. Ia dipindahkan kembali ke Abepura pada 7 Maret 2011.

Polresta Jayapura bukanlah penjara dengan fasilitas jangka panjang karena tidak bisa menyediakan makanan atau bantuan medis memadai dalam waktu lama. Namun, Karma ditahan 3 bulan dalam sel penuh tikus dan terpapar langsung pipa pembuangan asap. Dia tidak mendapat makanan, obat-obatan, dan perawatan kesehatan memadai karena sebagian besar keluarga dan teman-teman, yang bisa membantu memenuhi kebutuhannya, tidak berdomisili di Jayapura. Hal ini membuat kesehatan Karma terganggu secara serius dan memburuk. Dia menderita prostat kronis, nyeri lutut dan punggung serta infeksi pernapasan kronis,

yang diperburuk oleh paparan terus-menerus dengan pipa pembuangan. Waktu menipis bagi Karma yang terus menderita akibat penahanan tidak sah di Polresta Jayapura.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon Petisi dengan ini meminta Kelompok Kerja (Pokja) PBB menindaklanjuti Petisi ini sebagai prosedur "Tindakan Mendesak." Selain itu, Pemohon meminta Petisi ini dianggap sebagai permintaan resmi atas fatwa Kelompok Kerja PBB terkait Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 1997/50, sebagaimana ditegaskan oleh Resolusi 2000/36, 2003/31, dan Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 6/4 dan 15/18.

KUESIONER UNTUK DIISI OLEH PIHAK YANG MENGADUKAN PENANGKAPAN ATAU PENAHANAN SEWENANG-WENANG

I. IDENTITAS

1. *Nama Keluarga:* Karma
2. *Nama depan:* Filep Jacob Semuel
3. *Jenis Kelamin:* Laki-laki
4. *Tanggal lahir:* 14 Agustus 1959 (51 tahun)
5. *Kebangsaan: Indonesia*
6. (a) *Dokumen identitas (jika ada):* KTP
   (b) *Dikeluarkan oleh:* Pemerintah Republik Indonesia
   (c) *Pada (tanggal):* 12 Mei 2010 (berlaku hingga 14 Agustus 2015)
   (d) *Nomor:* 9171.009.7048
7. *Profesi dan/atau kegiatan (jika diyakini relevan dengan penangkapan/ penahanan):*
   Filep Jacob Semuel Karma adalah aktivis HAM Papua ter kemuka dan mantan PNS di Departemen Pendidikan dan Pelatihan. Dia adalah pejuang gerakan damai menuntut kemerdekaan Papua.
8. *Alamat tinggal:*
   Alamat surat: Jl. Macan Tutul No 33 Dok V Atas Distrik Jayapura Utara / Kota Jayapura

II. PENANGKAPAN

1. *Tanggal penangkapan:* 1 Desember 2004.
2. *Lokasi penangkapan (sedetail mungkin):* Abepura, Papua, Indonesia.
3. *Kesatuan yang menangkap atau diyakini telah melakukannya:* Kepolisian Republik Indonesia.
4. *Apakah mereka menunjukkan surat perintah atau keputusan lainnya oleh otoritas publik?:* Tidak.
5. *Otoritas yang mengeluarkan surat perintah atau keputusan:* Kejaksaan Distrik Jayapura.
6. *Peraturan yang relevan diterapkan (jika diketahui):* Pasal 106, 110,

154 dan 155 KUHP, yang berhubungan dengan "mengganggu keamanan negara" dan "mengganggu ketertiban umum", termasuk tuduhan penghasutan dan makar.

III. PENAHANAN

1. *Tanggal penahanan:* 1 Desember 2004
2. *Jangka waktu penahanan (jika tidak diketahui, perkiraan lama penahanan):* Karma telah ditahan sejak tanggal penangkapannya pada 1 Desember 2004.
3. *Pihak yang bertanggung-jawab atas tahanan:* Pemerintah Republik Indonesia
4. *Lokasi penahanan (sebutkan pemindahan dan lokasi penahanan saat ini):* Karma awalnya ditahan di Polresta Jayapura ketika menjalani persidangan pada 2005. Dia dipindahkan ke LP Abepura pada pertengahan 2005. Pada Desember 2010, ia dipindahkan kembali ke Polresta Jayapura. Dia dikembalikan lagi ke Abepura pada 7 Maret 2011. Kesehatannya terus memburuk. Ia mengalami gangguan prostat baru-baru ini yang memerlukan operasi, cedera kaki dan punggung serta masalah pernapasan kronis.
5. *Pihak berwenang yang memerintahkan penahanan:* Pada 1 Desember 2004, Kepolisian Republik Indonesia mendapat instruksi menangkap Karma di Lapangan Trikora, Abepura. Kejaksaan Distrik Jayapura mengajukan surat perintah penahanan pada hari berikutnya. Pada 26 Mei 2005, Pengadilan Negeri Jayapura menghukumnya atas tuduhan menghasut, konspirasi untuk melakukan penghasutan, dan mengganggu ketertiban umum.
6. *Alasan penahanan yang dituduhkan oleh pihak berwenang:* Pengadilan Negeri Jayapura memvonis Karma dengan hukuman kurungan penjara selama lima belas tahun atau tiga kali lebih lama dari tuntutan jaksa. Pengadilan Tinggi Jayapura dan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengesahkan hukuman itu, yang dijatuhkan masing-masing pada 11 Juli 2005 dan 27 Oktober 2005.
7. *Peraturan terkait yang digunakan (jika diketahui):* Pasal 54, 67, 106, 110, 154, 155, 158, 198 dan 244 dari KUHP yang berhubungan

dengan "mengganggu keamanan negara" dan "mengganggu ketertiban umum," termasuk hasutan dan tuduhan makar.

GAMBARKAN SITUASI PENANGKAPAN DAN/ATAU PENAHANAN DAN SEBUTKAN ALASAN JELAS MENGAPA PENANGKAPAN ATAU PENAHANAN INI DINILAI SEWENANG-WENANG

PERNYATAAN FAKTA

I. Pendahuluan

Pada 1 Desember 2004, Filep Semuel Karma ditangkap karena mengorganisir dan berpartisipasi dalam perayaaan ulang tahun kemerdekaan Papua dari penjajahan Belanda 1961 yang berlangsung di Lapangan Trikora di Abepura, Papua. Ratusan warga Papua berkumpul dalam upacara tersebut, menyerukan kata "merdeka" dan mengelukan penolakan Otonomi Khusus Papua, serta mengibarkan bendera Bintang Kejora, simbol kemerdekaan Papua. Upaya Kepolisian Republik Indonesia membubarkan paksa unjuk rasa itu disambut dengan lemparan kayu, batu dan botol. Polisi merespons dengan melakukan tembakan ke arah kerumunan massa. Karma dan Yusak Pakage, peserta lain dalam upacara tersebut, ditangkap dan keesokan harinya dituduh melakukan penghasutan. Pada Mei 2005, Karma dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan Pakage dihukum 10 tahun. Pakage mendapat pengampunan bersyarat dan dibebaskan pada Juli 2010[1]. Karma yang kesehatannya kini memburuk menolak pengampunan bersyarat dan berstatus tahanan politik.

II. Tahanan Politik Damai Dihukum 15 Tahun Akibat Pengibaran Bendera

a. Latar Belakang dan Keterlibatan Politik Terhukum

Filep Karma, 51 tahun, adalah salah satu tokoh terkemuka penyeru kemerdekaan Papua. Dia mantan PNS di Departemen Pendidikan dan

1 Lihat *Most Political Prisoners in Papua Refuse to Ask for Pardon*, THE JAKARTA POST, July 10, 2010, *available at*http://www.thejakartapost.com/news/2010/07/10/most-political-prisoners-papua-refuse-ask-pardon.html

Pelatihan Jayapura. Ia telah menikah dan memiliki dua anak perempuan.

Karma lahir pada 14 Agustus 1959. Andreas Karma, ayahnya merupakan seorang PNS dengan latar belakang pendidikan di Belanda yang menjabat sebagai Bupati Wamena dan Serui[2]. Filep Karma meraih gelar sarjana ilmu politik di Universitas 11 Maret di Solo, Jawa, dan mulai bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada tahun 1987[3]. Ia menjadi penyeru kemerdekaan Papua pada 1998[4]. Pada Juli tahun yang sama, ia berpartisipasi dalam upacara pengibaran bendera di rumahnya di Biak. Karma terluka di kaki karena tembakan peluru karet militer Indonesia dan kemudian ditangkap atas tuduhan penghasutan[5]. Dia dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara tetapi dibebaskan di tingkat banding pada 20 November 1999[6] setelah menjalani hampir 1½ tahun kurungan.

Karma secara eksplisit menolak penggunaan kekerasan melalui pernyataannya: "Kami ingin terlibat dalam dialog yang bermartabat dengan pemerintah Indonesia, dialog antara dua orang bermartabat, dan bermartabat berarti tidak menggunakan kekerasan." [7] Pemerintah Indonesia memang belum menyatakan bahwa Karma terlibat kekerasan (yang spontan, tidak direncanakan) yang terjadi setelah aparat berusaha membubarkan upacara pada Desember 2004. Amnesty International telah menetapkannya sebagai "tahanan politik."

b. Penangkapan, Persidangan dan Penjara

Lebih dari 200 orang berkumpul bersama Karma merayakan Hari Kemerdekaan dan mengibarkan bendera Bintang Kejora di Abepura, pada 1 Desember 2004.[8] Awalnya, Polisi berusaha membubarkan kerumunan massa. Ketika mendapat perlawanan dari sejumlah pengunjuk rasa, polisi melancarkan tembakan dan memukul peserta

2 HUMAN RIGHTS WATCH, PROSECUTING POLITICAL ASPIRATION: INDONESIA'S POLITICAL PRISONERS 30 (22 Juni 2010) [Selanjutnya disingkat PROSECUTING POLITICAL ASPIRATION].

3 *Id*

4 *Id,* halaman 29

5 *Id*

6 *Id*

7 *Id* halaman 29

8 Kesaksian Filep Karma, Catatan Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Sidang, atas nama Filep Karma, dalam kasus pidana No. 04/Pid.B/2005/PN-JPR, p. 14 [selanjutnya disebut Catatan Pengacara].

upacara dengan menggunakan tongkat.[9] Berbagai laporan menyebutkan 4 orang menderita luka-luka, termasuk dua luka di kepala.[10] Seorang petugas pemantau dari Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia juga dipukuli ketika mencoba memotret kekerasan yang terjadi.[11] Aparat kemudian mundur sesaat sembari menunggu datangnya bala bantuan dan kemudian mengakhiri upacara tersebut dengan kekerasan. Karma ditangkap di tempat kejadian dan aparat memukuli serta menginjak-injaknya selama perjalanan ke kantor polisi setempat.[12]

Kejaksaan mengajukan tiga dakwaan untuk Karma: makar penghasutan (dakwaan primer), penghasutan (dakwaan subsider) dan mengobarkan "kebencian atau penghinaan" terhadap pemerintah (dakwaan subsider). Pembahasan lebih rinci mengenai ketiga dakwaan ini dapat dilihat dalam Bab II.[13]

Di persidangan, pengacara Karma mengajukan dokumentasi pembelaan prosedural yang menyoroti keberpihakan Hakim A. Lakoni Hernie. Tim Pembela juga menunjukan beberapa pernyataan spesifik dari sang hakim yang melanggar pasal 158 KUHP mengenai ketidakberpihakan pengadilan.[14] Sebagai contoh, hakim tercatat berkata "hantam kepala Filep kalau dia berulah"[15] dan mengatai Karma "jangan bawa nama Tuhanmu di tempat ini, Tuhanmu sudah lama mati."[16] Pengacara juga menunjukkan bahwa dalam suatu insiden di

9 Amnesty International, Indonesia: Special Case Focus on Filep Karma and Yusak Pakage, *available* at http://www.upr-info.org/IMG/pdf/AI_IND_add9.pdf.

10 *Id*

11 *Id*

12 *Id*

13 *Lihat* Berkas Perkara Kejaksaan Wilayah Jayapura: Kasus No. PDM-111/T.1.10/Ep.2/12/2004, hal. 1-2.

14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sering disingkat sebagai KUHAP dan mengacu pada Peraturan No. 8 Tanggal 31 Desember 1981: "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa". Terjemahannya dalam bahasa Inggris: *A judge is prohibited from showing by his attitude or by a remark during the trial whether or not he thinks the defendant is guilty*. *Lihat* http://www.kontras.org/uu_ri_ham/Kitab%20Undang-undang%20Hukum%20Acara%20Pidana_KUHAP.pdf.

15 Hakim memakai pernyataan ini ketika memerintahkan polisi menghentikan pidato Karma pada 19 April 2005. *Lihat* Catatan Pengacara, *supra* note 8, at 7. Lihat Juga Ringkasan Permohonan Tim Bantuan Hukum atas nama Filep Karma, dalam kasus pidana No. 04/Pid.B/2005/PN-JPR, hal. 14 [selanjutnya disebut Ringkasan Permohonan Banding].

16 Hakim membuat pernyataan ini kepada Karma dalam Dengar Pendapat 19 April 2005. *Lihat* Catatan Pengacara, *supra* nota 8, poin 7 dan Ringkasan Permohonan Banding, *supra* nota 15, pada 4-6.

luar pengadilan, Hakim Lakoni Hernie memukul seorang perempuan pendukung Karma dan melempar pendukung lainnya seraya berteriak "Diam kamu. Pingin mati *ya*?"[17] Bukti ini dan lainnya memperlihatkan pengadilan berat sebelah.[18]

Karma juga mengajukan pembelaan prosedural kedua bahwa haknya untuk berhubungan dengan pengacaranya telah ditolak secara tidak adil. Hal ini melanggar Pasal 54 dan Pasal 198 (2) KUHP.[19] Pasal 54 berbunyi: "Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mencari bantuan hukum dari satu atau lebih penasehat hukum selama dan setiap persidangan..." Pasal 198 (2) berbunyi: "Jika penasehat hukum berhalangan hadir, ia akan menunjuk pengganti dan jika pengganti tidak dapat hadir atau berhalangan maka sidang akan dilanjutkan."[20] Pada 10 Mei 2005, Pengadilan memulai persidangan tanpa pemberitahuan memadai kepada pengacara Karma, termasuk sejumlah pesan SMS dan panggilan telepon dari pengacara Karma yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya mampu dan berencana hadir dalam sidang.[21]

Kedua pembelaan prosedural Karma dimentahkan. Saat pembacaan hukuman, Majelis Hakim memvonis Karma tiga kali lebih lama dari tuntutan yang diajukan pada awal persidangan. Jaksa menuntut hukuman penjara 5 tahun, tapi Majelis Hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara bagi Karma.[22]

Persidangan itu menyulut bentrokan lebih lanjut antara pendukung Karma dengan aparat keamanan, dan pengacara Karma juga menjadi sasaran intimidasi. Dalam satu kesempatan, kepala anjing terpenggal disertai catatan berisi nama-nama pengacara Karma ditemukan

17 *Lihat* Catatan Pengacara, *supra* nota 8, poin 8 dan Ringkasan Permohonan Banding, *supra* nota 15, pada 5.

18 *Lihat* Catatan Pengacara, *supra* nota 8, poin 7 dan Ringkasan Permohonan Banding, *supra* nota 15, pada 4.

19 *Lihat* Catatan Pengacara, *supra* nota 8, poin 7 dan Ringkasan Permohonan Banding, *supra* nota 15, pada 5.

20 *Id*

21 *Id*

22 Keputusan Pengadilan Tinggi Jayapura menanggapi Pembelaan oleh Pengacara Filep Jacob Semuel Karma, Nomor 21/PID/2005/PT.JPR, 11 Juli 2005 [selanjutnya disingkat Keputusan Pengadilan Tinggi Jayapura].

tergeletak di depan kantor LBH Jayapura.[23]

Prosedur hukum yang cacat dan tak wajar juga mewarnai permintaan banding Karma di Pengadilan Tinggi. Pada 11 Juli, Pengadilan Tinggi menolak banding[24] tapi mengaku tidak pernah menerima dokumen ringkasan banding milik Karma, yang seharusnya diteruskan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi.[25] Meskipun terdapat ketidakberesan, Mahkamah Agung tetap menolak kasasinya pada 27 Oktober 2005.[26] Mereka tidak menyebutkan alasan penolakan itu.[27]

c. Status Sekarang

Karma saat ini ditahan di LP Abepura, Papua, di mana banyak pelanggaran HAM telah dilaporkan terjadi. Ia mendekam selama 6 tahun dan masih memiliki 9 tahun masa tahanan. Pengajuan grasinya pun masih belum jelas.[28]

Karma mengalami gangguan prostat akut selama bertahun-tahun. Penyakitnya semakin memburuk pada 2009. Setelah tertunda hampir 1 tahun ia kemudian dipindahkan ke sebuah rumah sakit di Jakarta untuk menjalani konsultasi kesehatan dan operasi pada Juli 2010. Sebelum dipindah, Karma tidak mendapat akses kesehatan memadai, meski pendukungnya bersedia mengganti biayanya. Setelah Karma melaporkan kesakitan ketika buang air kecil dan masalah terkait lainnya, petugas penjara menyuruh Karma banyak minum dan berbaring dengan posisi kaki terangkat.[29] Ia akhirnya mendapat izin menemui dokter di Rumah Sakit Dok Dua, tidak lama setelah foto dirinya yang tidur dengan posisi kaki ke atas terpampang di koran Bintang Papua. Pada Oktober 2009, dokter rumah sakit tersebut merekomendasikan pemindahan Karma ke Jakarta untuk menjalani operasi urologi. Namun, otoritas penjara

23 *Diteror dengan Kepala Anjing*, PAPUA POS, 20 Mei 2005, dan *PH Filep Karma Dikirimi Kepala Anjing*, PAPUA POS, 25 Mei 2005, dikutip PROSECUTING POLITICAL ASPIRATION, *supra* nota 4, pada 13

24 Keputusan Pengadilan Tinggi Jayapura, *supra* nota 22.

25 *Id*

26 "Sari Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Atas Nama Pengacara: Dr. Filep Jacob Semuel Karma, Nomor Dokumen 688/TU/2005/1710, 24 November 2005, hal. 2.

27 *Id*

28 PROSECUTING POLITICAL ASPIRATION, *supra* nota 2, pada 33.

29 *Id* pada 33.

baru mengizinkan pemindahan 8 bulan kemudian.[30] Bahkan, Karma harus menolak upaya pemerintah Indonesia untuk memindahkannya ke sebuah penjara di Jakarta—yang membuatnya rentan disiksa—sebelum dia dipindah ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Selain penyakit prostat, ia juga menderita cedera kaki tertembak peluru karet aparat saat upacara pengibaran bendera di Biak pada 1998.[31] Karma juga sempat dipindah ke rumah sakit di Jayapura untuk menjalani perawatan cedera punggung.[32]

Kondisi penahanan Karma memburuk secara dramatis akibat insiden di bulan Desember tahun lalu.[33] Pada 3 Desember 2010, sejumlah narapidana di LP Abepura berusaha melarikan diri. Petugas menangkap satu narapidana dan menembak mati satu lainnya. Narapidana lain di Abepura kemudian meminta Karma mewakili mereka guna menghindari kekerasan lebih lanjut dan memediasi keluhan mereka. Pada saat negosiasi awal dengan petugas penjara dan seorang wakil dari Komisi HAM Papua, beberapa narapidana melemparkan batu dan petugas penjara bereaksi dengan melepas tembakan. Karma mengimbau para tahanan menghentikan aksinya guna meredakan ketegangan dan berusaha mengumpulkan mereka dekat gereja penjara. Ketika otoritas penjara memerintahkan semua tahanan kembali ke sel masing-masing, Karma menganjurkan narapidana mematuhi perintah itu. Meski demikian, Karma bersama beberapa tahanan lain tidak lama kemudian dipindahkan ke Polresta Jayapura. Keluarga dan pengacaranya tidak mendapat pemberitahuan mengenai pemindahannya. Buruknya kondisi penahanan di Polresta Jayapura, termasuk makanan yang tak memadai dan paparan langsung dengan tikus membuat kesehatannya turun tajam. Pada 7 Maret 2011, Karma dikembalikan ke Abepura.

30 *Id*

31 PROSECUTING POLITICAL ASPIRATION, *supra* nota 2, pada 29

32 *Convicted Papuan Speaks Out*, AUSTRALIAN BROADCASTING CORP., 4 Mei 2006, *bisa diunduh di* http://www.abc.net.au/lateline/content/2006/s1631133.htm.

33 Keterangan ini didapat dari pernyataan tertulis yang ditandatangani Karma tanggal 14 Desember dan ditulisnya dari penjara Jayapura. Pernyataan itu ditujukan kepada Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom Now, Direktur Eksekutif Imparsial, dan Kepala Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.

III. Latar Belakang Konflik di Papua

Wilayah Papua menempati separuh pulau Papua Nugini bagian barat dan saat ini terdapat dua provinsi di sana, yaitu Papua dan Papua Barat. Keseluruhan wilayah ini menyumbang lebih dari seperlima total daratan Indonesia, tetapi menjadi rumah bagi sekitar 3,9 juta orang atau 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Papua menjadi satu wilayah paling terpencil Indonesia dan isolasi ini diperburuk oleh penerapan pembatasan akses menuju wilayah tersebut oleh pemerintah.

Papua menjadi koloni Belanda hingga 1961. Sebelum menarik diri dari wilayah itu, Belanda menawarkan kemerdekaan pada 1970. Namun, Presiden Indonesia Soekarno meluncurkan kampanye untuk menguasai Papua, termasuk melakukan beberapa pertempuran bersenjata dengan pasukan Belanda yang bergerak mundur. Perundingan yang diperantarai Amerika Serikat menyepakati serah-terima wilayah Papua ke tangan perwalian PBB dan kemudian ke Indonesia pada Mei 1963. Sesuai perjanjian, Indonesia mengatur pertemuan dengan beberapa perwakilan Papua pada 1969 untuk voting mengenai nasib Papua. Banyak pihak menuduh pemungutan suara itu dipenuhi kecurangan dengan pemilihan perwakilan yang tidak transparan, pengawasan militer atas proses voting, dan pemaksaan terbuka. Pemerintah Indonesia keberatan dengan tuntutan referendum.

Pemerintah Indonesia menafsirkan dan meletakkan kedaulatan warga Papua dalam konteks kekhawatiran umum dan mengurat-akar mengenai potensi disintegrasi politik di negara yang sangat multietnis, multikultural, dan multibahasa dengan geografi yang sangat terpecah-pecah. Kemerdekaan Timor Timur dan konflik berkepanjangan di Aceh mengafirmasi kekhawatiran ini.

Pada 2001, Papua mendapat status otonomi khusus yang memberikan kesempatan warga Papua memiliki pemerintahan sendiri melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) yang terdiri dari tetua suku. Namun, ketidakpuasan atas laju pembangunan ekonomi dan perhatian hak-hak sipil dan politik warga Papua memicu kerusuhan baru-baru ini. Di musim panas 2010, misalnya, MRP menyetujui mosi tidak percaya

terhadap status otonomi khusus Papua,[34] dan pengunjuk rasa mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Papua melakukan hal yang sama.[35]

a. Catatan HAM Indonesia di Papua

Sejak integrasi Papua ke Indonesia, sekelompok kecil gerilyawan di bawah Organisasi Papua Merdeka (OPM), yakni Tentara Pembebasan Nasional (TPN), melakukan penculikan dan serangan kilat terhadap pos militer dan situs pertambangan. Serangan kecil pemberontakan ini memicu kehadiran militer yang didukung taktik berbasis alat berat.

Dalam menanggapi pemberontakan berkepanjangan di Papua, Indonesia meresponse keras dan tidak proporsional, khususnya di bawah era Soeharto. Hingga Oktober 1998, Papua resmi ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer, yang memungkinkan pasukan keamanan Indonesia menangkapi kelompok oposisi sipil, selain pemberontak bersenjata. Ada berbagai laporan kekejaman yang dilakukan oleh pasukan keamanan terhadap warga sipil, termasuk penyiksaan dan eksekusi di luar pengadilan.[36] Pengamat PBB melaporkan bahwa suasana mencekam masih melekat di Papua.[37]

b. Reformasi Politik di Bawah Presiden Yudhoyono

Indonesia telah memperbaiki iklim kebebasan berekspresi secara signifikan sejak jatuhnya Soeharto, dan gerakan masyarakat sipil yang luas untuk kemerdekaan Papua telah muncul dalam semangat liberalisasi. Namun, hukum Indonesia mengenai pencemaran nama baik, penghinaan dan pengkhianatan seringkali dipakai untuk menekan sentimen pro-kemerdekaan di Papua. Human Rights Watch (HRW) menduga lebih dari 170 orang di penjara di seluruh Indonesia atas tindakan berekspresi secara damai.[38]

---

34 *Papua Parliament to Review Special Autonomy: Mass Demonstrations Call for End to Status*, RADIO NEW ZEALAND INTERNATIONAL (13 Juli 2010), http://pidp.eastwestcenter.org/pireport/2010/July/07-14-05.htm.

35 *Id.*; Karishma Vaswani, *Papua Autonomy Protests Challenge Jakarta*, BBC NEWS (9 Juli 2010), http://www.bbc.co.uk/news/10565860.

36 *Lihat, e.g.*, PROSECUTING POLITICAL ASPIRATION, *supra* nota 2.

37 *Lihat e.g.*, Report of the Special Representative of the Secretary-General on the Situation of Human Rights Defenders, A/HRC/7/28/Add.2 20-22 (January 28, 2008).

38 Human Rights Watch, *Indonesia: Release Papuan Flag-Raisers* (18 November 2009), http://

Pada Mei 2010, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menyatakan Pemerintah Indonesia berencana melepas sejumlah tahanan politik Papua, tetapi ia menambahkan bahwa tahanan yang didakwa terlibat konflik bersenjata atau—bahkan yang melakukan aksi damai—pengibaran bendera Bintang Kejora Papua tidak akan diampuni.[39]

IV. Kunjungan Pokja PBB ke Papua 1999 terkait Penahanan Sewenang-wenang

Pokja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang (WGAD) mengunjungi Papua pada 1999. WGAD mengemukakan keberatan terkait HAM atas dua pasal KUHP Indonesia—tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan Terhadap Ketertiban—dan secara khusus menggarisbawahi pengibaran bendera:

> Sebagian besar ketentuan ini, terutama yang memiliki unsur kesengajaan atas kejahatan yang dimaksud, dirancang dengan istilah umum dan rancu sehingga dapat digunakan sewenang-wenang untuk membatasi kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul dan berserikat. Peraturan itu dapat dipakai untuk menjerat wartawan, kegiatan politik damai oleh oposisi dan serikat buruh, seperti yang sering terjadi di bawah rezim sebelumnya.[40]

WGAD juga secara khusus merujuk pada penahanan Karma pada 1998, di antaranya, akibat pengibaran bendera yang dinilai melawan hukum menurut Kategori II seperti yang dimaksud Pokja.

---

www.hrw.org/en/news/2009/11/18/indonesia-release-papuan-flag-raisers

39 Human Rights Watch, *Indonesia: Release Papuan Flag-Raisers* (18 November 2009), http://www.hrw.org/en/news/2009/11/18/indonesia-release-papuan-flag-raisers

40 Komisi HAM PBB, Laporan Pokja Penahanan Sewenang-Wenang dalam Kunjungan ke Indonesia (31 Januari–12 Februari 1999), E/CN.4/2000/4/add.2, pada 13 (12 Agustus 1999) [selanjutnya disingkat Laporan Kunjungan Pokja].

ANALISIS

Atas dasar alasan berikut ini, penahanan sewenang-wenang Karma karena mengorganisir dan mengikuti upacara bendera perayaan ulang tahun kemerdekaan Papua dari Belanda tahun 1961 melanggar hukum domestik dan internasional.

V. Pelanggaran Hukum Indonesia dan Internasional

Karma didakwa dan divonis atas tiga tuduhan:
(1) "...melakukan atau memberikan perintah partisipasi dalam tindakan penghasutan dengan maksud menyebabkan perpecahan Republik Indonesia";
(2) "konspirasi untuk memberontak dengan maksud menyebabkan perpecahan Republik Indonesia dan menyebabkan keresahan sosial"; dan
(3) "secara terbuka menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Republik Indonesia."

a. Hukum Indonesia

Dakwaan 1 dan 2 di atas, didasarkan pada Pasal 110 dan 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[41] Pasal 110 mengkriminalisasi konspirasi untuk melakukan pemberontakan; Pasal 106 memperkenankan hukuman penjara untuk penghasutan, yang berlanjut pada pemisahan, atau percobaan pengalihan wilayah Indonesia ke kewenangan negara lain.[42]

Secara bersamaan, pasal-pasal KUHP Indonesia tersebut dianggap membahayakan Keamanan Negara.[43] Meskipun sering digunakan sebagai alat untuk mendakwa anggota atau simpatisan kelompok separatis bersenjata, pengertian yang luas dari Pasal 106 dan 110 memungkinkan Pemerintah Indonesia juga menerapkan ketentuan tersebut terhadap pelaku aksi damai. Dakwaan utama makar yang

41 Indonesian Criminal Code (KUHAP), *supra* nota 14.
42 *Id*
43 *Id*. Pasal 104-129

ditujukan pada Karma didasarkan pada rapat perencanaan tanggal 28 November 2004 di Museum Universitas Cenderawasih, di mana ia dan beberapa orang lain merencanakan peringatan tanggal 1 Desember.[44]

Dakwaan 3 didasarkan pada Pasal 154-155 KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.[45] Pasal 154 mendakwa individu yang menyuarakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan secara terbuka terhadap pemerintah, dan Pasal 154 (a) menghukum pelanggaran terhadap bendera nasional Indonesia. Pasal 155 memberikan hukuman yang lebih rendah untuk pelaku distribusi bahan publikasi permusuhan terhadap negara.

Amandemen UUD yang disahkan pada 2000 menitik-beratkan pada hak asasi manusia dan secara khusus bergantung pada standar yang diakui secara internasional seperti yang dikodifikasi dalam Deklarasi Universal HAM. UUD asli yang disahkan pada 1945 menjamin bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan...[46] Pada 2000, Pasal 28 (d) UUD 1945 diubah menjadi "setiap orang memiliki hak atas pengakuan, keamanan, perlindungan dan kepastian di bawah hukum yang adil dan memperlakukan semua orang setara di depan hukum.[47]

Pasal 28(e) berisi dua jaminan atas kebebasan individu. Pertama, setiap orang berhak atas kemerdekaan agama, menyampaikan pemikiran dan ajaran sesuai dengan hati nurani.[48] Ketentuan ini diikuti dengan persyaratan yang lebih tradisional di mana setiap orang memiliki hak untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengekspresikan pendapatnya.[49] Kebebasan ini, bersama dengan beberapa lainnya, dijamin dalam pasal penegasan krusial: - Hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, bebas berpikir dan bersikap, beragama, hak untuk tidak diperbudak, untuk diperlakukan setara di mata hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM fundamental

44 Catatan Pengacara, *supra* nota 8, pada 9

45 KUHAP, *supra* nota 14, Pasal 153–181

46 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 [UUD '45] [Konstitusi] art. 27(1) (Bahasa Indonesia) *bisa dibaca di* http://www.humanrights.asia/countries/indonesia/laws/uud1945_en

47 *Id*. Di pasal 28(d)(1)

48 *Id*. Di pasal 28(e)(2)

49 *Id*. Di pasal 28(e)(3)

yang *tidak dibatasi dalam kondisi apapun* (penekanan ditambahkan).[50]

Hak Karma di bawah konstitusi Indonesia jelas dilanggar. Di pengadilan, hakim mengeluarkan komentar yang menghina Kristen, agama Karma. Aksi pengibaran bendera adalah wujud kebebasan berekspresi: bendera Bintang Kejora adalah simbol bagi rakyat Papua merayakan kemerdekaan mereka dari Belanda. Selain itu, dakwaan makar terhadap Karma melanggar kebebasan berserikat. Mengacu pada amandemen UUD yang disahkan pada 2000, kesemuanya merupakan HAM yang tidak bisa dilanggar dalam keadaan apapun.[51] Sejalan dengan argumen ini, pada Juli 2007, Pasal 154 dan 155 yang dipakai untuk mendakwa Karma dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, Pemerintah menolak seruan membebaskan tahanan yang dikurung akibat pasal itu.[52]

(i) Irregularities in the Appeal Process

Hak banding Karma menangapi keputusan dan hukuman pengadilan ditolak secara tidak benar. Seperti disebutkan di atas, tampak bahwa permohonan Karma dihentikan karena bandingnya tidak ditransfer oleh Pengadilan Negara ke Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung (MA) tidak dapat mengganjar pelanggaran Pasal 67 dan 244 KUHP, yang menjamin hak terdakwa untuk banding.

Selain itu, pernyataan dan aksi menghakimi yang dilakukan oleh hakim pengadilan, serta kalimat yang direkomendasikan tiga kali oleh jaksa negara, menunjukkan keberpihakan telah menciderai peradilan. Keberpihakan tersebut secara eksplisit dilarang KUHP Pasal 158, yang menetapkan bahwa "hakim dilarang menunjukkan sikap atau ucapan selama persidangan, tidak peduli dia menganggap terdakwa bersalah atau tidak."

(ii) Ekspresi Budaya vs Kedaulatan

Hukum Indonesia membedakan antara ekspresi budaya dan

50 *Id*. Di pasal 28(i)(1)
51 *Id*
52 HUMAN RIGHTS WATCH, INDONESIA: BOLD COURT DECISION GOOD FOR FREE EXPRESSION (July 19, 2007),http://www.hrw.org/en/news/2007/07/18/indonesia-bold-court-decision-good-free-expression

kedaulatan, yang pertama diperbolehkan sedangkan yang terakhir dilarang. Ketika Indonesia mengesahkan Otonomi Khusus untuk Papua pada 2001, beberapa wilayah memberi warga Papua otonomi lebih besar untuk memerintah.[53] Di bawah Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati, pengibaran bendera secara konsisten ditafsirkan sebagai ekspresi budaya. Namun, interpretasi selanjutnya membalik pola ini, dan garis antara budaya dan kedaulatan menjadi benar-benar kabur untuk dipakai sebagai dasar persidangan. Di satu sisi Pasal Pembukaan Bab II UU Otonomi Khusus secara eksplisit mengizinkan keberadaan bendera regional Papua—Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai kebesaran dan panji agung serta simbol kultural keagungan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah[54]—undang-undang juga mensyaratkan bahwa bendera tersebut tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.[55] Tidak ada penjelasan bagaimana bendera bisa diposisikan sebagai ekspresi budaya saja, dan bukan kedaulatan.

b. Hukum Internasional

Penahanan Karma tergolong sewenang-wenang[56], untuk menindas kebebasan seseorang sesuai Kategori II dan Kategori III berdasarkan klasifikasi kasus seperti definisi Pokja PBB.[57] Kasus ini memenuhi

53 Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, *bisa dilihat di* http://www.papuaweb.org/goi/otsus/files/otsus-en.html.

54 *Id*

55 *Id*

56 Pelanggaran kebebasan secara sewenang-wenang didefinisikan sebagai tiap—pelanggaran kebebasan kecuali di ranah tersebut dan sejalan dengan prosedur yang diatur hukum. International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16), at 52U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, berlaku efektif 23 Maret 1976, di pasal 9(1) [selanjutnya disingkat ICCPR]. Pelanggaran kebebasan semacam itu secara spesifik dilarang menurut hukum internasional. *Id*. "Tak seorangpun boleh ditangkap sewenang-wenang, ditahan, atau dibuang. Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A (III), U.N. Doc. A/810, di pasal 9 (1948) [selanjutnya disingkat UDHR]. "Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan hanya bisa dijalankan jika memenuhi ketentuan hukum…"

57 Kategori II pelanggaran kebebasan terjadi, "ketika pelanggaran kebebasan itu terkait dengan penerapan hak kemerdekaan yang diatur dalam pasal 7, 13, 14, 18, 19, 20, dan 21 UDHR dan, sejauh ini seperti yang diperhatikan pihak Negara, dalam pasal 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26, dan 27 ICCPR. Office of the High Comm'r for Human Rights, United Nations, Fact Sheet No. 26: The Working Group on Arbitrary Detention, pt. IV(B) [hereinafter Fact Sheet No. 26]. Kategori III pelanggaran kebebasan terjadi, "ketika keseluruhan atau sebagian ketidakmauan mematuhi norma internasional terkait dengan hak atas persidangan adil, mengemuka dalam UDHR dan dalam instrumen relevan yang diterima negara yang bersangkutan, sama kedudukannya seperti

persyaratan Kategori II karena penangkapan dan penahanan Karma terkait dengan hak dasarnya atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat seperti dalam Pasal 19 dan 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), dan Pasal 19, 21 dan 22 dari Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR). Kasus ini memenuhi persyaratan Kategori III karena Pemerintah Indonesia gagal mematuhi standar minimum internasional atas pengadilan yang adil. Ketika pemerintah mendakwa Karma, perlindungan dasar dalam Pasal 9, 10 dan 11 UDHR dilanggar.

Indonesia meneken ICCPR pada Februari 2006. Blak-blakan, Indonesia mengaku masih dalam proses harmonisasi hukum, khususnya hukum pidana, dengan komitmennya berdasarkan ICCPR.[58] Namun, Indonesia harus meratifikasi HAM dalam aturan internasional itu ke dalam aturan negeri secara mandiri.[59]

Penahanan Karma melanggar komitmen Indonesia atas UDHR dan ICCPR. Meskipun Karma dihukum dan dipenjara sebelum Indonesia menyetujui ICCPR, penahanan yang sedang berlangsung tetap melanggar ketentuan UDHR, dan pemenjaraan dirinya pasca ditanda-tanganinya ICCPR gara-gara aksi yang dilindungi ICCPR jelas merupakan pelanggaran Konvensi tersebut.[60] Komentar umum Komite HAM PBB poin 26 menyatakan bahwa hak-hak individu yang terkandung dalam ICCPR menjadi hak warga negara perorangan sejak negara mereka meneken ICCPR. Karenanya, tindakan selanjutnya yang ditujukan untuk mencabut hak-hak itu dari individu tidak bisa dibenarkan.[61]

---

pelanggaran kebebasan berkarakter sewenang-wenang. Di luar itu, dalam membuat determinasi Kategori III, Pokja akan mengacu prinsip Perlindungan Semua Pihak dari Berbagai Penahanan atau Pemenjaran dan—jika sebuah Negara tergabung dalam ICCPR—pasal 9 serta 14 ICCPR.

58 U.N. Human Rights Council, Rep. of the Working Group on the Universal Periodic Review Indonesia, A/HRC/8/23, halaman 6 (14 May 2008)

59 Pasal 7 (2) UU No. 39/1999 tentang HAM, *di* http://asiapacificforum.net/members/apf-member-categories/full-members/indonesia/downloads/legal-framework/indonesiaact.pdf.

60 Argument ini tidak berarti dan tak harus mensyaratkan ICCPR memiliki efek retroaktif.

61 U.N. Human Rights Comm., General Comment 26 to the ICCPR, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/Rev.1 (1997) ("Hak yang terpatri dalam Perjanjian milik rakyat yang hidup di wilayah negara peserta. Komite HAM telah berulang-kali menegaskan pandangan itu, seperti terlihat dari praktiknya dalam rentang panjang, sehingga sekali rakyat mendapat perlindungan hak di bawah Perjanjian ini, perlindungan tersebut berlaku di wilayahnya dan terus menjadi bagian dari mereka, tidak peduli ada perubahan di Pemerintahan negara peserta, termasuk disintegrasi menjadi lebih dari satu negara atau keberlangsungan Negara atau tindakan dalam bentuk apapun di Negara

Penahanan Karma pasca-persetujuan ICCPR tidak lagi bisa dibenarkan. Indonesia tidak menunjukkan upaya penumbuh-kembangan, deklarasi, atau pemahaman yang bisa mencegah terpangkasnya penerapan ICCPR untuk warganya yang dipenjara, setelah meneken perjanjian itu dengan undang-undang yang bertentangan dengan ICCPR. Selain itu, terlepas dari kewajiban ICCPR, penahanan tersebut jelas berada di bawah Kategori II mandat Pokja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang. Saat ICCPR tidak berlaku, Pokja memakai UDHR sebagai acuan.[62]

Ketentuan utama hukum internasional yang dilanggar pada penangkapan, peradilan dan penahanan Karma adalah UDHR Pasal 9, 10, 11, 19 dan 20, dan ICCPR Pasal 19(1), 19(2), 21 dan 22. Perlakuan Karma di penjara juga melanggar Pasal 22(2) Peraturan Standard Minimum PBB tentang Perlakuan Tahanan.[63]

(i) Pelanggaran Hak Kebebasan Berekspresi Karma

UDHR Pasal 19 mengatur "hak kebebasan berpendapat dan berekspresi", dan ICCPR Pasal 19 (1) menyatakan "hak memegang pendapat tanpa gangguan". ICCPR Pasal 19 (2) juga menyebutkan bahwa

> Tiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain sesuai dengan keinginannya.

Penangkapan, penahanan dan pemenjaraan Karma hanya karena pengibaran bendera melanggar Pasal 19 dari UDHR dan ICCPR. Sementara ICCPR Pasal 19 (3) menyatakan bahwa, selama dilindungi hukum dan sepanjang diperlukan, pembatasan kebebasan berekspresi dapat dikenakan pembatasan-untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum tertentu. Karena pengakuannya atas ICCPR, Pemerintah Indonesia dalam hal ini belum membela tuduhan pelanggaran HAM. Bahkan jika dilakukan di sini, klaim tersebut akan gagal di bawah interpretasi yang berlaku dan otoritatif atas pengecualian

peserta yang ditujukan untuk melepas rakyat tersebut dari hak yang telah dijamin Perjanjian").

62 Laporan Kunjungan Pokja, Lembaran Fakta No. 26*, supra* nota 40.

63 Peraturan Standard Minimum PBB seputar Perlakuan terhadap Tahanan, 30 Agustus 1955.

tersebut. Komentar Umum Poin 29 Komite HAM menyatakan bahwa setiap pengecualian yang didasarkan pada masalah keamanan nasional harus sesuai dengan persyaratan proporsionalitas dan kebutuhan:

> Persyaratan mendasar bagi tiap tindakan yang bertentangan dengan Perjanjian... adalah bahwa tindakan tersebut terbatas pada tingkat yang diperlukan dalam situasi mendesak.... Kewajiban untuk membatasi pelanggaran dalam situasi demikian mencerminkan prinsip proporsionalitas yang umum untuk mengurangi dan membatasi kekuasaan. Selain itu, fakta bahwa pengurangan kadar Perjanjian dari ketentuan khusus yang mungkin dengan sendirinya dibenarkan oleh urgensi situasi, tidak meniadakan persyaratan bahwa langkah khusus yang diambil ke arah sana harus ditunjukkan sebagai syarat terpenuhinya situasi darurat.[64]

Prinsip Johannesburg 1995 tentang Keamanan Nasional, Kebebasan Berekspresi, dan Akses Informasi juga mengandung prinsip-prinsip yang bisa dipakai untuk melakukan pengecualian terkait keamanan nasional. Prinsip 6 menyatakan bahwa selain membocorkan rahasia negara, penyampaian ekspresi dapat dihukum sebagai ancaman keamanan nasional hanya jika pemerintah dapat menunjukkan bahwa ekspresi tersebut dimaksudkan untuk dan cenderung menimbulkan kekerasan komunal, serta menunjukkan hubungan langsung antara penyampaian ekspresi dan kekerasan yang tengah diantisipasi.[65]

Meskipun Pemerintah Indonesia terus menempatkan angkatan bersenjata, Papua belum menjadi zona operasi militer khusus karena status itu dicabut pada 1998. Begitu pula dengan tak dijadikannya Papua sebagai zona alternatif kekuasaan "darurat" yang bisa membantu membenarkan pengurangan kewajiban ICCPR.

(ii) Pelanggaran Hak Karma untuk Bebas Berkumpul dan Berserikat

UDHR Pasal 20 dan ICCPR Pasal 21 dan 22 menjamin hak berkumpul secara damai dan kebebasan berserikat. Tak diragukan

64 *Id*

65 Prinsip-Prinsip Johannesburg Seputar Keamanan Nasional, Kebebasan Ekspresi, dan Akses terhadap Informasi, E/CN.4/1996/39 (1996).

lagi, penangkapan Karma pada upacara pengibaran bendera yang damai melanggar hak-hak tersebut. Meskipun ICCPR Pasal 21 dan 22 memberikan pengecualian untuk keamanan nasional, keselamatan dan ketertiban umum[66], pembatasan yang sama terkait upaya mengurangi kadar penerapan kebebasan berekspresi juga berlaku di sini, dan dengan alasan yang sama, keduanya tak pernah digunakan bersama-sama.

(iii) Pelanggaran Hak Karma atas Standard Minimum Perlakuan di Penjara

Peraturan Standar Minimum PBB seputar Perlakuan terhadap Tahanan Pasal 22 (2) menyatakan bahwa "tahanan sakit yang membutuhkan perawatan spesialis akan dipindah ke institusi khusus atau rumah sakit sipil". Penolakan dan penundaan transfer medis untuk Karma, meski berasal dari rekomendasi jelas dari dokter yang berkompeten, melanggar kewajiban ini.[67]

(iv) Pelanggaran Hak Karma untuk Mendapat Persidangan Adil

Pasal 9 UDHR melarang penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan UDHR Pasal 10 memberikan hak "mendapat keadilan dan dengar pendapat umum di pengadilan yang independen dan tidak memihak. UDHR Pasal 11 mengharuskan siapapun yang dituduh melakukan pelanggaran pidana "dijamin sepenuhnya untuk mendapat pembelaan." Pernyataan bernada menghina oleh Hakim A. Lakoni Hernie.[68], anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, kepada Karma dan jumlah hukuman yang tiga kali lebih lama dari tuntutan jaksa, merupakan bukti jelas peradilan yang memihak dan melanggar UDHR Pasal 10. Keadaan penangkapan dan penahanannya, termasuk berbagai pelanggaran hukum Indonesia seperti diuraikan di atas, melanggar UDHR Pasal 9. Dan pelanggaran UDHR Pasal 10 termasuk kegagalan mengirimkan pengajuan banding Karma ke Pengadilan

66 ICCPR, pasal 21 ("Tak boleh ada pembatasan pelaksanaan hak ini kecuali yang diwajibkan di mata hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis terkait dengan kepentingan keamanan nasional atau keselamatan publik, serta ketertiban umum, upaya menjaga kesehatan atau moral publik atau perlindungan hak dan kebebasan pihak lain") Lihat juga ICCPR, pasal 22.

67 Peraturan Standard Minimum, Pasal 22(2), *supra* nota 59.

68 *Lihat* Indonesian Criminal Code (KUHAP), *supra* nota 14.

Tinggi Jayapura, waktu dengar pendapat yang singkat dan seenaknya hingga tidak melibatkan tim pembela, dan penolakan banding Karma.

VI. Kesimpulan

Pemerintah Indonesia telah berusaha mengintimidasi dan membungkam Karma sebagai konsekuensi dari pelaksanaan sah hak-hak Karma yang dilindungi hukum Indonesia dan internasional. Atas dasar itu, penangkapan, dakwaan, dan penahanan Karma melanggar HAM yang diakui dunia dan Indonesia untuk kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat dan mendapat persidangan adil. Penahanannya adalah "tindakan sewenang-wenang" di bawah Kategori II dan III.

TERLIHAT BAHWA LANGKAH INTERNAL, TERMASUK BANDING, YANG DILAKUKAN TERUTAMA DENGAN OTORITAS HUKUM DAN ADMINISTRATIF, KHUSUSNYA DALAM UPAYA MENGGUGAT PENAHANAN DAN, JIKA DIMUNGKINKAN, HASIL MEREKA DAN ALASAN MENGAPA LANGKAH DEMIKIAN ATAU BANDING TIDAK EFEKTIF ATAU KENAPA TIDAK DITINDAKLANJUTI.

Karma dihukum pada 2005 atas kejahatan yang berkaitan dengan upacara pengibaran bendera pada Desember 2004. Seperti dijelaskan secara rinci di atas, Karma terus mengejar upaya banding melalui pengadilan negeri di Indonesia dan tidak berhasil. Semua banding, termasuk ke Mahkamah Agung Indonesia, telah gagal. Karma tetap dalam penahanan sewenang-wenang, yang melanggar hukum Indonesia dan internasional.

NAMA LENGKAP DAN ALAMAT PARA PIHAK YANG MENYAMPAIKAN INFORMASI (NOMOR TELEPON DAN FAX, JIKA MEMUNGKINKAN)

Frederick Fedynyshyn dan Eva Deitz
Hogan Lovells LLP
555 Thirteenth Street, NW
Washington, DC 20004
Amerika Serikat
+1 (202) 637 5600 (tel); +1 (202) 637 5910 (fax)
frederick.fedynyshyn@hoganlovells.com
eva.deitz@hoganlovells.com

Michael Sulmeyer
Stanford Law School
+1 (202) 210 7532
msulmeyer@gmail.com

Tarun Chhabra
Harvard Law School
+1 (318) 623 4308
tchhabra@gmail.com

Maran Turner and Sachiko Jensen
Freedom Now
1776 K Street, NW, Suite 811
Washington, DC 20006
United States of America
+1 (202) 223-3733 (tel); +1 (202) 223-1006 (fax)
mturner@freedom-now.org
sjensen@freedom-now.org

EPILOG

Menemui Filep Karma

Oleh **Anugerah Perkasa**

FILEP JACOB SEMUEL KARMA tak pernah bisa melupakan peristiwa 14 tahun silam pada suatu pagi di bulan Juli, di tempat kelahirannya sendiri, Biak, Papua. Bersama ratusan demonstran lainnya, dia mulai dikepung dan ditembaki aparat keamanan gabungan di sebuah tempat Tower Air, tak jauh dari pelabuhan kota tersebut.

Mereka telah bertahan selama empat hari untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora, lambang kemerdekaan bangsa Papua, di menara tersebut. Kejadian 6 Juli 1998 itu kelak dikenal dengan peristiwa Biak Berdarah.

Filep sendiri ditendang kepalanya lebih dari sepuluh kali. Kedua kakinya ditembak peluru karet. Kepalanya dipopor dengan gagang senjata hingga pingsan sampai sadar kembali. Filep diseret, sebelum diangkut ke mobil truk bersama demonstran lainnya.

"Saya bersiap-siap karena akan dilempar ke lantai yang keras. Tapi, mengapa justru empuk?" kata Filep pada akhir September lalu. "Ternyata, tubuh saya jatuh di tumpukan manusia."

Selama dua pekan pula, Filep tak mendapatkan perawatan medis yang serius akibat luka tembak itu. Ketika dia bercerita, saya melihat kedua bekas itu ada di bagian kiri dan kanan kedua kakinya. Dia hanya

mendapatkan obat antiseptik dan meminum obat antibiotik saat berada di tahanan Kepolisian Resor Biak Numfor. Ini tentunya, sebelum dibawa ke rumah sakit Angkatan Laut, di kawasan LANAL, kota tersebut. Menurut Filep, luka yang membusuk itu membuat penjaga yang membawanya ke rumah sakit, lebih banyak menghirup udara dari luar mobil.

"Peristiwa Biak adalah kejadian yang juga dikenal dengan pusara tanpa nama, nama tanpa pusara," ujar Filep. "Sampai sekarang tidak ada hukuman bagi para pelaku penembakan dan kekerasan. Ini yang tetap saya perjuangkan."

Saya bertemu Filep, seorang tahanan politik sekaligus tokoh Papua yang berpengaruh, untuk pertama kalinya pada September 2012. Kami bertemu di ruang Anggrek nomor 12, Rumah Sakit PGI, Cikini, Jakarta Pusat, guna menjalani perawatan atas dugaan tumor usus. Selama ini, saya hanya memperhatikan pemberitaannya di pelbagai media maupun hasil riset pelbagai organisasi pemantau hak asasi manusia (HAM).

Saya melihat sosok yang sederhana. Janggut dan rambutnya dibiarkan memanjang. Dia mencucinya saat mandi, menguncir dan melilitkan rambutnya ke batang leher agar terlihat rapi. Filep, kesan saya, adalah orang yang hangat dan bersahabat.

Filep dilahirkan di Biak, 53 tahun silam dari keluarga elit. Ayahnya, Andreas Karma, adalah mantan Bupati Wamena pada awal 1970 hingga menjelang akhir 1980. Dia juga adalah alumnus Universitas Sebelas Maret, Solo, Jawa Tengah dan mulai bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada sekitar 1989.

Namun, ketidakadilan pemerintah Indonesia terhadap orang- orang Papua, membuatnya gerah. Karena peristiwa Biak Berdarah, pengadilan akhirnya menghukumnya 6,5 tahun pada awal 1999 setelah dianggap makar. Namun dirinya bebas demi hukum setelah mengajukan banding pada November di tahun yang sama.

Empat tahun berselang, Filep kembali mengorganisir peringatan kedaulatan Papua pada 1 Desember 2004. Dia kembali ditangkap dan dijatuhi hukuman 15 tahun pada Oktober 2005 karena tuduhan yang sama. Dia dipenjara hingga hari ini.

"Penjagaan sekarang tidak terlampau ketat. Tidak seperti dulu,

intelijen dan kepolisian berjaga-jaga di taman depan kamar," ujarnya pada saya. "Dulu kalau jalan-jalan di seputar rumah sakit, suster harus menelepon satpam dahulu."

Ini adalah kali kedua bagi Filep untuk dirawat di Jakarta. Pada Juli 2010, dia juga dirawat di rumah sakit yang sama untuk menjalani pengobatan dan bedah prostat. Sementara pada Maret lalu, dokter di Jayapura merekomendasikannya untuk segera berobat ke Jakarta karena dugaan inflamasi usus hingga tumor.

Namun, mengurus izin berobat ke luar penjara juga bukanlah perkara gampang. Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura, Papua, awalnya ingin Filep dipindahkan ke LP Cipinang, Jakarta Timur, selama berada di ibukota. Tapi usulan itu ditolaknya. Seorang kawan, kata dia, juga menyarankannya untuk menolak keinginan tersebut karena berurusan macam-macam di Cipinang harus memakai uang pelicin.

Masalah lainnya adalah biaya pengobatan. Filep bersama keluarganya harus membiayai sendiri ongkos transportasi bolak-balik Jakarta-Jayapura -bahkan untuk dua penjaga LP yang ditugaskan menjaganya- hingga perawatan medis di rumah sakit.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, tak mau menggelontorkan uang sedikit pun untuk perawatan tahanan politik tersebut. Dalam surat terbukanya di akun Facebook, Filep mengatakan pemerintah mengklaim tak memiliki uang untuk pengobatannya sehingga membutuhkan dana untuk berobat. Hasil penggalangan dana dari pelbagai pihak akhirnya mencapai sekitar Rp115 juta.

"Ketika tahu rekomendasi itu, Kementerian Hukum dan HAM menolak untuk membiayai perawatan di Jakarta karena dianggap terlalu mahal," ujarnya pada Juni lalu. "Itu mengapa saya memohon bantuan."

Saya pun bertemu anggota keluarga dan kerabat Filep selama berada di rumah sakit pada September lalu. Dari anak sulungnya, Audryne Karma, Margaretha Karma, adik kandungnya, hingga Soleman Aroma, kerabat yang membantu keluarga Karma.

Margaretha adalah pegawai negeri sipil di Jayapura, sedangkan Audryne baru magang setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran, Bandung pada 2010. Soleman sendiri bekerja lepas. Keluarga itu juga dibantu oleh Ruth Ogetay, perempuan muda

asal Paniai, Papua yang kini tinggal di Jakarta.

Dari ruangan itu, saya juga mengenal gaya gurau orang-orang Papua. Mereka menyebutnya cerita Mop.

Ini bermula dari isi SMS Ruth untuk meminta saya datang lebih cepat ke rumah sakit. "Kami tunggu *ka tempo*," tulis Ruth dalam pesannya. Bodohnya, saya berpikir ada wartawan *Koran Tempo* yang ingin wawancara Filep.

Sesampainya di kamar, tak ada satu reporter pun. Saya baru tahu setelahnya, arti *tempo* adalah untuk bersegera atau menyuruh untuk cepat. Semua orang di ruangan terbahak dan lumayan bikin muka merah padam. Saya pun menjadi bahan olok-olok setelahnya. "Ayo, Nugi *tempo*." Setelah itu mereka tertawa. Nugi adalah nama panggilan saya.

"Ada orang Jawa naik kapal untuk transmigrasi ke Papua dan bertemu orang Papua. Ketika ingin makan bekalnya di kapal, orang Jawa bilang: mari mas, makan," ujar Filep menimpali. "Orang Papua langsung balas: ah kebetulan, saya juga lapar."

KALA MENEMUI FILEP KARMA, kami tentu tak hanya berbincang soal gurauan dari Papua. Masalah lainnya, adalah hukuman yang dijalani Filep karena aspirasi politiknya sendiri hingga soal Otonomi Khusus di Papua. Masing-masing punya kritik.

Filep mengatakan tantangan orang-orang Papua akan lebih berat di masa mendatang akibat adanya Otonomi Khusus. Masalah bermunculan dari korupsi, mental pejabat yang mementingkan kekuasaan, hingga mental mengemis masyarakat, tanpa mau berusaha lebih keras.

Jika Papua merdeka, katanya, mereka kemungkinan besar akan membandingkan mana yang lebih sejahtera: menjadi bagian dari Indonesia atau terpisah sama sekali. Kesimpulan Filep, program otonomi justru menghancurkan psikologi orang-orang Papua secara sistematis. Di tingkat elite hingga lapisan paling bawah.

Dua organisasi pemantau HAM internasional, yakni Amnesty International (AI) dan Human Rights Watch (HRW) secara berkesinambungan telah meminta pemerintah Indonesia agar membebaskan Filep tanpa syarat sesegera mungkin. Mereka juga mendesak pemerintah

menyetop semua prosekusi terhadap ekspresi politik yang dipaparkan secara damai, baik di Papua maupun Maluku. Khusus masalah Filep, advokasi dua organisasi tersebut telah dimulai sedikitnya sejak 7-12 tahun terakhir.

"Memenjarakan aktivis yang menyuarakan pandangan politik secara damai adalah noda untuk Indonesia," kata Phil Robertson, Deputi Direktur HRW Asia terkait dengan laporan Prosecuting Political Aspiration: Indonesia's Political Prisoners pada Juni 2010. "Ini tidak sejalan dengan aspirasi Indonesia sebagai negara demokratis."

"Masyarakat dari lebih 80 negara di dunia meminta pembebasan tahanan nurani Filep Karma," kata Donna Guest, Deputi Direktur Asia AI terkait dengan kampanye Writing for Rights, pada Desember 2011. "Ratusan ribu orang dari seluruh dunia mengirim pesan yang jelas kepada pemerintah Indonesia untuk menjunjung tinggi hak kebebasan berbicara."

Soal tahanan politik, Filep Karma tak sendirian. National Papua Solidarity (Napas) dan Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua (SKPHP) mencatat jumlah tahanan politik Papua periode 2005-2012 pada masing-masing lembaga pemasyarakatan di provinsi tersebut. Masing-masing adalah Abepura (lima orang); Biak (tiga orang); Fakfak (enam orang); Nabire (dua orang); Serui (dua orang); Timika (tiga orang); dan Wamena (delapan orang).

Kedua organisasi itu juga mencatat sedikitnya empat tahanan politik mengalami penyiksaan luar biasa dalam penjara, yakni Ferdinand Pakage (mengalami penyiksaan hingga buta permanen), Filep Karma (masalah dengan prostat), Jefrai Murip (menderita stroke), serta Kanisius Murip (hilang ingatan).

Mereka mengatakan negara selama ini membiarkan para tahanan menderita, sekaligus tak memberikan fasilitas kesehatan yang memadai.

"Negara abai dari tanggung jawab untuk memulihkan hak-hak kesehatan dan tak mengakui adanya tahanan politik di Papua," kata Marthen Goo, Koordinator Napas, dalam sebuah diskusi mengenai kontroversi tahanan politik, Agustus lalu. "Pemerintah membiarkan mereka menderita." Aktivitas Filep juga menekan kondisi keuangan keluarga Karma.

Audryne Karma -yang memberikan pidatonya pada acara Mid-

Atlantic Regional Conference di Washington D.C. atas undangan Amnesty International Amerika Serikat- memaparkan persoalan tersebut di hadapan peserta konferensi, November 2011. Dia juga meminta bantuan segala pihak untuk membebaskan ayahnya dari penjara. Audryne memiliki adik bernama Andrefina, yang baru lulus Fakultas Farmasi, Universitas Padjajaran, kala itu. Mereka hanya dua bersaudara.

"Pendapatan ibu sebagai pegawai negeri tak mencukupi untuk pendidikan dan kebutuhan kami. Sehingga keluarga besar lainnya menyediakan tambahan," katanya. "Ketika kami mendengar kabar bapak dihukum 15 tahun, saya merasakan ketidakpastian di masa depan."

"Kami sering iri karena teman-teman memiliki keluarga yang berkunjung ketika ulang tahun atau Hari Natal. Kami tak merasakan itu," papar Audryne lagi. "[Namun] Kami tetap memperjuangkan pembebasan tanpa syarat untuk bapak, dan kami sendiri agar bersatu sebagai keluarga yang bahagia."

Sebulan setelahnya, the United Nations Working Group on Arbitrary Detention menyampaikan opini legalnya bahwa pemerintah Indonesia telah melanggar hukum internasional dengan menahan Filep Karma. Kelompok kerja Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) itu meminta agar tahanan politik tersebut dibebaskan segera.

Namun, pemerintah Indonesia dalam jawaban resminya menyatakan bahwa hukuman Karma adalah untuk kepentingan lebih luas. Di sisi lain, pemerintah, melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, sebelumnya juga menolak terminologi tahanan politik di Indonesia. Dalam pelbagai pemberitaan, Djoko menyatakan yang ada hanyalah para pelaku kriminal.

"Hukuman terhadap dirinya, menurut pemerintah, adalah untuk keamanan nasional yang lebih luas di seluruh kepulauan," demikian laporan resmi kelompok kerja tersebut, mengutip jawaban pemerintah Indonesia. "Karma juga menikmati akses ke fasilitas kesehatan dan hak menerima kunjungan pengacaranya dan keluarganya."

Namun, keterangan Margaretha Karma membantah soal akses fasilitas kesehatan. Mulai dari penjara pada 1998 silam hingga yang terakhir sejak 2004. Menurutnya, pemerintah sama sekali tak mau

menanggung biaya dua petugas, masing-masing dari kepolisian dan lembaga pemasyarakatan, untuk mengawal Filep ke Jakarta.

Akhirnya kesepakatan pun tercapai: keluarga akan hanya membiayai petugas kepolisian. Masalahnya, dua petugas tersebut -masing-masing dari LP Abepura, Capung Wiguna dan polisi dari Kepolisian Sektor Abepura, Leo Turnip- tak bertugas dengan baik. Keduanya masing-masing meninggalkan Rumah Sakit PGI Cikini untuk kembali ke kampung halamannya setelah mendarat di Jakarta. Capung ke Jawa Tengah dan Leo ke Sumatra Utara.

Hanya ada satu petugas LP Cipinang baru yang berjaga-jaga. Masalah keuangan lainnya, kembali muncul. Otoritas LP Abepura kemudian mengirimkan salah satu petugasnya, Mattheus Awi, ke Jakarta untuk menggantikan rekannya. Menurut Margaretha, keluarga akan kembali mengeluarkan biaya makan dan ongkos tiket pesawat ke Jakarta-Jayapura, setelah perawatan selesai dilakukan.

"Filep itu tahanan negara, jadi negara yang seharusnya mengobati ketika sakit," kata Margaretha kepada saya. "Tetapi kalau seperti ini, negara bilang tidak ada uang, sebaiknya negara bubar saja. Masak mengobati satu orang saja tidak sanggup?"

"Pak Filep orang yang keras. Keluarga mendukung perjuangannya, karena kami tahu dia melakukannya bukan untuk jabatan," kata Margaretha lagi. "Harapan saya, pemerintah NKRI membebaskan Filep Karma tanpa syarat."

Sokongan internasional untuk pembebasan Filep juga datang dari organisasi Freedom Now yang berbasis di Washington D.C. Freedom Now bekerja untuk membebaskan para tahanan politik, termasuk Filep, melalui upaya hukum, politik dan advokasi. Organisasi itu juga menyatakan Filep adalah klien pro bono mereka.

Sementara itu, laporan terakhir Komisi untuk Orang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berjudul Mempertimbangkan Amnesti bagi Tahanan Politik Papua, juga menyerukan diberikannya amnesti kepada para tahanan politik di provinsi tersebut.

Lembaga itu mengungkapkan langkah-langkah pemberian mekanisme pembebasan tersebut di antaranya adalah mengidentifikasi para tahanan politik, melakukan dialog intensif pelbagai pihak serta

melakukan lobi kepada Presiden dan kalangan DPR RI.

Pihak-pihak yang dimaksud, demikian Kontras, di antaranya adalah Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, Kementerian Hukum dan HAM, Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM dan organisasi sipil.

"Pemberian amnesti akan memulihkan kepercayaan publik, khususnya bagian dari masyarakat yang memiliki ketidakpercayaan terhadap pihak penguasa," demikian laporan Kontras. "Juga bisa menjadi insentif bagi otoritas nasional untuk menegaskan kedaulatannya dalam menyelesaikan suatu konflik domestik yang mendapat sorotan komunitas internasional."

Dukungan maupun simpati kemanusiaan juga datang dari pelbagai belahan dunia. Dari Amerika Serikat, Australia, Kanada, Perancis hingga Swedia. Dari taman kanak-kanak hingga orang dewasa. Filep mendapatkan ribuan surat yang mengalir melalui pos ataupun yang diantarkan langsung oleh koleganya.

Filep juga tahu benar arti penting sokongan keluarga untuk perjuangannya yang belum selesai.

Dia menceritakan ketika Audryne masih duduk di SMA, gadis itu sempat menanyakan mengapa dirinya -dan adiknya Andrefina- tak mendapatkan perhatian penuh, seperti tugas ayah pada umumnya. Audryne juga mempertanyakan mengapa pikiran bapaknya tercurah pada masalah orang-orang lain di Papua.

"Saya menjawabnya dengan meminta maaf pada Audryne," kata Filep kepada saya pada suatu pagi, pertengahan September lalu. "Tetapi, ketika saya memikirkan orang banyak di Papua, mereka berdua selalu ada di dalamnya."

Pekerjaan Filep Karma untuk Papua sangat berharga menurut pengalaman saya. Selama 20 tahun dia bekerja keras agar situasi di Papua bisa dikenal di seluruh dunia.

Carmel Budiardjo, aktivis Hak Asasi Manusia, pendiri organisasi Tapol dan penerima Right Livelihood Award

Suara Filep Karma bergema di tanah leluhur kami. Ia adalah pesan bisu para korban penindasan Indonesia sejak 1962.

Benny Giay, pendeta dan ketua Sinode Gereja Kingmi Papua

Filep Karma mengajak kita jujur melihat persoalan Papua. Ketidakadilan. Diskriminasi. Rasialisme. Ketidakkompakan. Ia berarti karena Karma korban ketidakadilan tersebut.

Imam Shofwan, ketua Yayasan Pantau di Jakarta

Bagian paling menyentuh dari kisah Filep Karma adalah ketika ia berani meninggalkan segala kemapanannya dan menapaki liku perjuangan ini.

Frederika Korain, pengacara dan aktivis hak perempuan di Jayapura



Filep Karma pegawai negeri Jayapura. Pada 1 Desember 2004, dia pidato soal peminggiran etnik Papua di tanah Papua dengan pasang bendera Bintang Kejora. Dia dihukum makar dan dipenjara 15 tahun. Dia menggugat ke Perserikatan Bangsa-bangsa. Pada November 2011, UN Working Group on Arbitrary Detention memutuskan Indonesia harus bebaskan Karma segera dan tanpa syarat. Pemerintah Indonesia menolak keputusan peradilan PBB.

ISBN 978-602-17071-4-2

9 786021 707142

Penerbit Deiyai